



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023**



Dra. Hj. Umi Azizah
Bupati Tegal



Sabilillah Ardie, B.Sc
Wakil Bupati Tegal

KATA PENGANTAR

Ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpah, berkah dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 69 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut mencakup **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**. Bahwa pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dilakukan atas pengelolaan anggaran dan capaian kinerja disampaikan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menerapkan prinsip Akuntabilitas.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

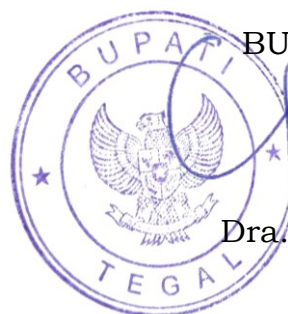
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024, tahun anggaran 2022 adalah tahun ke-3 atas pelaksanaan RPJMD dimaksud. Sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 tercantum beberapa catatan sebagai bahan koreksi kami atas pelaksanaan program dengan didukung: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Kami telah melakukan reviu, pembenahan dan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024, penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja antara Bupati Tegal dengan Kepala PD, dan Kepala PD ditindaklanjuti sampai dengan pejabat Administrator dan Pengawas, diikuti dengan Rencana Sasaran Kinerja Pegawai setiap ASN. Diperkuat dengan penandatanganan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan penguatan Reformasi Birokrasi pada semua PD (Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024). Dengan langkah ini diharapkan kinerja meningkat dan sasaran dapat tercapai, dengan menerapkan prinsip *value for money* + (Ekonomis, Efektif, Efisien) dan Manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Sehingga visi Kabupaten Tegal : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal Yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia”** dapat diwujudkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga spirit “**Mbangun Berkah, gawe Bungah**” dapat menjadi pengungkit untuk selalu berbenah guna mewujudkan Hari Esok yang lebih baik. Semoga Niat dan Usaha yang kita lakukan, senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Terimakasih.

Slawi, 30Maret 2023

BUPATI TEGAL
Dra. UMI AZIZAH

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 menyajikan hasil pengukuran perjanjian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2022 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tegal **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal Yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia”**.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2022, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP

tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerja sama guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tegal di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 dapat dikatakan Baik/Berhasil. Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 27 Tujuan dan Sasaran RPJMD dan 31 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 126 Program yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 menunjukkan bahwa :

Persentase nilai rata-rata capaian kinerja dari 27 tujuan dan sasaran adalah 107,58% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun bila dilihat dari capaian kinerja Indikator Kinerja Utama, maka diperoleh hasil sebagai berikut : capaian dari 31 indikator tujuan dan sasaran RPJMD tersebut 29 (dua puluh tiga) indikator dengan kategori Sangat Tinggi, 1 (satu) indikator dengan kategori Sedang, dan 1 (satu) indikator Rendah.

Dengan demikian masih terdapat tujuan dan sasaran maupun Indikator Kinerja Utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022, antara lain :

1. Mereviu kembali pohon kinerja/*logical framework* yang telah disusun dengan mengacu pada PermenpanRB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan agar sasaran dan indikator kinerja yang digunakan lebih berorientasi hasil serta

- memenuhi kriteria SMART (*spesific, achieveble, relevant, dan timebond*) dan cukup baik level Pemda dan PD
3. Menyempurnakan IKU pada PD dengan menambahkan formulasi perhitungan dan sumber data yang digunakan dalam menghitung indikator kinerja, dan memastikan formulasi perhitungan yang digunakan telah sesuai untuk menggambarkan indikator kinerja.
 4. Mengoptimalkan aplikasi pengukuran kinerja secara organisasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara organisasi maupun unit kerja.
 5. Melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan rencana aksi berkala, dan meningkatkan kualitasnya dengan melengkapi informasi analisis pencapaian kinerja, dan memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan pendukung kinerja pada tahun berikutnya.
 6. Meningkatkan kesetaraan kualitas laporan kinerja seluruh OPD dengan informasi yang memadai tentang analisis faktor pengungkit capaian kinerja dan rekomendasi perbaikan (langkah kerja/target)) yang spesifik untuk perencanaan tahun berikutnya.
 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan tindak lanjut PD atas rekomendasi perbaikan hasil evaluasi internal serta membuat pelaporannya.

Semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal bersama dengan stakeholders yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia Secara Merata.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Kondisi Geografis Kabupaten Tegal.....	2
2. Kondisi Demografis dan Sosiologis Kab. Tegal	3
3. Susunan Organisasi	12
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP.....	9
1. Dasar Hukum.....	9
2. Tujuan LKjIP	10
3. Manfaat LKjIP.....	10
C. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA	12
B. RENCANA STRATEGIS	20
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	32
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	43
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	45
1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	45
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	53
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	180
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	180
2. Analisa Efisiensi	192
D. PRESTASI dan PENGHARGAAN.....	196

BAB IV	PENUTUP	198
A.	TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN KABUPATEN TEGAL	198
B.	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG	205

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Data Persebaran Penduduk di Kabupaten Tegal 2022.....	3
Tabel 1.2	: Data Tingkat Pendidikan ASN di Kab. Tegal	6
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD tahun 2022	26
Tabel 2.2	: Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD tahun 2022	26
Tabel 2.3	: Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD tahun 2022	26
Tabel 2.4	: Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD tahun 2022	27
Tabel 2.5	: Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD tahun 2022	27
Tabel 2.6	: Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal.....	32
Tabel 2.7	: Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab. Tegal Tahun 2022	35
Tabel 2.8	: Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022	38
Tabel 2.9	: Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022 Perubahan ..	40
Tabel 3.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	44
Tabel 3.2	: Capaian IKU tahun 2022	46
Tabel 3.3	: Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja tahun 2022	52
Tabel 3.4	: Pengukuran Kinerja Pemerintah Kab. Tegal tahun 2022...	54
Tabel 3.5	: Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Aparatur Transparansi akuntabilitas.....	57
Tabel 3.6	: Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Aparatur Transparansi Akuntabilitas tahun 2020-2022	59
Tabel 3.7	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	61
Tabel 3.8	: Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020- 2022	62
Tabel 3.9	: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	63
Tabel 3.10	: Capaian Indikator Kinerja Utama SPBE.....	65
Tabel 3.11	: Indek SPBE 2018-2022.....	66
Tabel 3.12	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja.....	69
Tabel 3.13	: Capaian Nilai Sakip Kab Tegal.....	70
Tabel 3.14	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuanga Daerah	71

Tabel 3.15 : Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan ..	72
Tabel 3.16 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	74
Tabel 3.17 : Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Manejemen Kepegawaian Daerah Tahun 2019-2022	75
Tabel 3.18 : Capaian indikator indeks Infrastuktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan	77
Tabel 3.19 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	80
Tabel 3.20 : Capaian indikator persentase infrastrukturu pekerjaan umum yang mantap	81
Tabel 3.21 : Capai Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang Mantap Tahun 2020-2022.....	82
Tabel 3.22 : Capai infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak Tahun 2020-2022.....	84
Tabel 3.23 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan	85
Tabel 3.24 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan Tahun 2020-2022 ...	85
Tabel 3.25 : Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	89
Tabel 3.26 : Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2022.....	89
Tabel 3.27 : Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	90

Tabel 3.28	: Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	92
Tabel 3.29	: Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Tahun 2020-2022	93
Tabel 3.30	: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	96
Tabel 3.31	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tegal	96
Tabel 3.32	: Capaian sasaran meningkatnya produktivitas di sektor Pertanian	98
Tabel 3.33	: Capaian Kinerja Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022	101
Tabel 3.34	: Capaian Kinerja Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Tahun 2020-2022.....	102
Tabel 3.35	: Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tegal.....	103
Tabel 3.36	: Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/ Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2022	104
Tabel 3.37	: Sertifikasi Produk IKM di Kabupaten Tegal	104
Tabel 3.38	: Standarisasi IKM di Kabupaten Tegal	105
Tabel 3.39	: Data Perusahaan yang telah dilaksanakan pengawasan dan verifikasi teknis atas pengajuan proses izin usaha industri (IUI)	106
Tabel 3.40	: Perusahaan SIINas dan IUI	108
Tabel 3.41	: Capaian sasaran meningkatnya produktivitas di sektor pariwisata	109
Tabel 3.42	: Capaian Kinerja Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan Tahun 2022.....	111
Tabel 3.43	: Capaian Kinerja Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan Tahun 2020-2022	112
Tabel 3.44	: Capaian mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	113
Tabel 3.45	: Perbandingan IPM Tegal dengan Kab/Kota Sekitar	115
Tabel 3.46	: IPM Tahun 2018-2022.....	115
Tabel 3.47	: Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2022	117

Tabel 3.48	: Komponen Pembentuk Indikator Pembangunan Gender Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2021	117
Tabel 3.49	: Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	119
Tabel 3.50	: Capaian Indikator Kinerja Pendukung Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat Tahun 2022....	120
Tabel 3.51	: Perbandingan Capaian Kinerja Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat Tahun 2020 s.d. 2022.....	121
Tabel 3.52	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	128
Tabel 3.53	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pemuda.....	137
Tabel 3.54	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pemuda Tahun 2020-2022	139
Tabel 3.55	: Capaian kinerja Tujuan Menekan Laju Kemiskinan.....	140
Tabel 3.56	: Capaian kinerja Tujuan Menekan Laju Kemiskinan Tahun 2020-2022	141
Tabel 3.57	: Capaian Sasaran Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	143
Tabel 3.58	: Capaian Indeks Kedalam Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan dengan daerah sekitar.....	144
Tabel 3.59	: Capaian Sasaran Laju Tingkat Pengangguran.....	145
Tabel 3.60	: Capaian Sasaran Laju Tingkat Pengangguran Tahun 2020-2023.....	146
Tabel 3.61	: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	148
Tabel 3.62	: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Tahun 2020-2022	148
Tabel 3.63	: Cakupan Patroli Siaga dan Pelaporan Pengaduan yang Tertangani terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2018-2022	149
Tabel 3.64	: Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun	

	2018-2021	150
Tabel 3.65	: Capaian sasaran meningkatnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	152
Tabel 3.66	: Capaian sasaran meningkatnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan Tahun 2020-2022	153
Tabel 3.67	: Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2017-2022	153
Tabel 3.68	: Capaian Kinerja Tujuan Menurunnya Risiko Bencana.....	156
Tabel 3.69	: Capaian Kinerja Tujuan Menurunnya Risiko Bencana Tahun 2020-2022.....	156
Tabel 3.70	: Potensi Luas Bahaya Kabupaten Tegal.....	157
Tabel 3.71	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menurunkan Risiko Bencana.....	161
Tabel 3.72	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menurunkan Risiko Bencana Tahun 2020-2022.....	162
Tabel 3.73	: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	169
Tabel 3.74	: Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatkan Pelestarian Dan Pewarisan Kebudayaan	178
Tabel 3.75	: Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatkan Pelestarian Dan Pewarisan Kebudayaan Tahun 2021-2022.....	178
Tabel 3.76	: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tegal	181
Tabel 3.77	: Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022.....	185
Tabel 3.78	: Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022.....	195
Tabel 4.1	: Capaian Kinerja Kabupaten Tegal 2022	200

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Peta Administrasi Kabupaten Tegal	3
Gambar 1.2 : Persentase Penduduk Usia Kerja	5
Gambar 3.1 : Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi	61
Gambar 3.2 : Evaluasi SPBE	68
Gambar 3.3 : Diagram Capaian Kinerja Sasaran Pengelolaan Keuangan Daerah	73
Gambar 3.4 : Bupati menerima laporan hasil pemeriksaan	74
Gambar 3.5 : Pemulihan Lahan Tercemar di Pesarean	91
Gambar 3.6 : Pengambilan Sampel Kualitas Air.....	91
Gambar 3.7 : Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.....	118
Gambar 3.8 : Penduduk menurut kelompok usia sekolah	122
Gambar 3.9 : Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan	123
Gambar 3.10 : Pemberian Bantuan Personil Peserta Didik Bagi Siswa Sekolah Dasar	125
Gambar 3.11 : Pemberian Bantuan Personil Peserta Didik Bagi Siswa	125
Gambar 3.12 : Pemberian Bantuan Personil Peserta Didik.....	126
Gambar 3.13 : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Bantuan Alat Peraga	126
Gambar 3.14 : Bantuan Alat Peraga IPA Biologi Tahun 2022	127
Gambar 3.15 : Pengadaan Meubeler Sekolah.....	127
Gambar 3.16 : Rehab Sarana Prasarana Sekolah	127
Gambar 3.17 : Grafik angka harapan hidup Kab. Tegal.....	129
Gambar 3.18 : Angka Kematian Ibu di Kab. Tegal.....	131
Gambar 3.19 : Angka Kematina Bayi di Kab. Tegal	133
Gambar 3.20 : Angka Kematian Balita di Kab Tegal	135
Gambar 3.21 : Perbandingan AHH di Eks Karisidenan Pekalongan...	136
Gambar 3.22 : Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).....	158

Gambar 3.23	: Kegiatan Penanaman di Desa Batunyana Kecamatan Bojong	158
Gambar 3.24	: Kegiatan Susur Sungai.....	159
Gambar 3.25	: Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebencanaan Bersama Universitas Diponegoro	160
Gambar 3.26	: Kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Terpadu N	160
Gambar 3.27	: Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)..	164
Gambar 3.28	: Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Rawan Bencana.....	165
Gambar 3.29	: Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	166
Gambar 3.30	: Upaya-Upaya Penanggulangan Bencana	168
Gambar 3.31	: Kegiatan Lawatan Sejarah	171
Gambar 3.32	: Kegiatan Jejak Tradisi kepada Siswa Sekolah	172
Gambar 3.33	: Musium Sekolah	173
Gambar 3.34	: Kegiatan Lomba Cerdas Cermat	174
Gambar 3.35	: Pembacaan Kita Rambang di Desa Danaraja Margasari	174
Gambar 3.36	: Penjamasan Makam Amangkurat	173
Gambar 3.37	: Pembagian Buku Sejarah	175
Gambar 3.38	: Situs Sejarah	176
Gambar 3.39	: Monev Pakem.....	176
Gambar 3.40	: Dialog Budaya.....	177
Gambar 3.41	: Pertunjukan Kesenian Rakyat Jawa Tengah dan Pagelaran Wayang Golek	180

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
2. Dokukmen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022
3. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana dalam Peraturan tersebut mengamanatkan setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran atau tujuan strategis Instansi Pemerintah dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kemudian dilaporkan kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Demi terwujudnya penyelenggaraan *Good Governance* yang merupakan perwujudan dari tata kelola Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa. Kabupaten Tegal telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai visi dan misi dalam melaksanakan program di setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Gambaran umum tentang Kabupaten Tegal akan digambarkan dari kondisi geografis, kondisi demografis, Sosiologis, Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Tegal, Struktur Organisasi Kabupaten Tegal. Lengkapnya sebagai berikut:

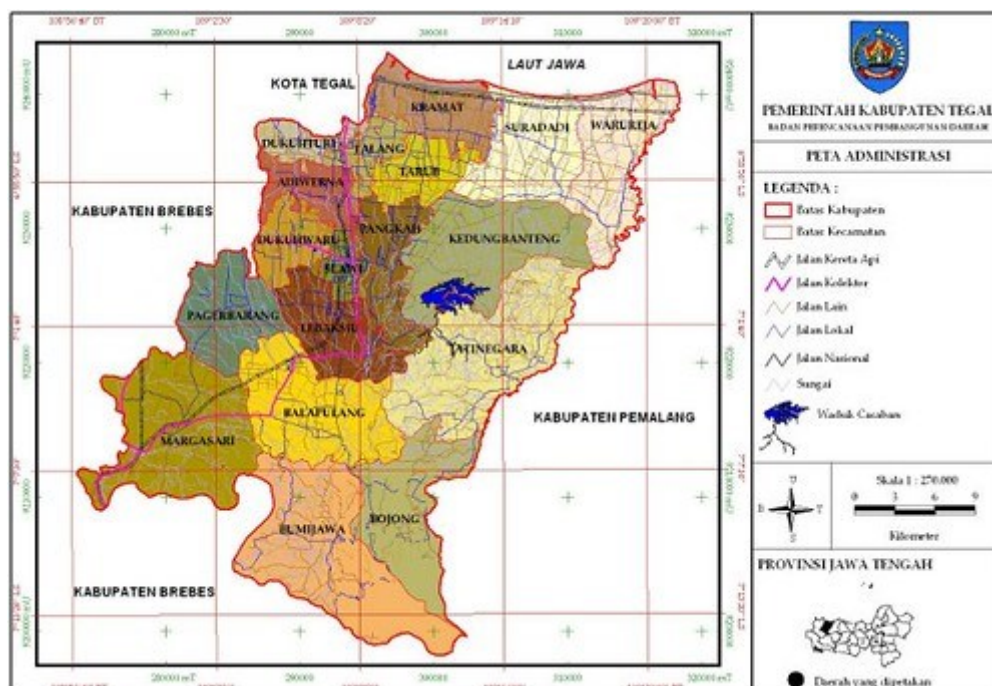
1. Kondisi Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota berada di Slawi. Terletak antara 108°57'6" s/d 109°21'30" Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'30" Lintang Selatan. Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Kabupaten Tegal berada di kawasan strategis pantai utara Pulau Jawa dan garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha. Lokasi strategis tersebut merupakan pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto atau Cilacap. Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa jalur utama, sebagai berikut:

- Jalan Tol Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Tegal – Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta–Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi – Purwokerto– Yogyakarta – Solo

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Tegal



2. Kondisi Demografis dan Sosiologis Kabupaten Tegal

a. Kependudukan

Menurut sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal Data penduduk pada semester II Tahun 2022 berjumlah 1.664.588 jiwa yang terdiri dari 847.602 laki-laki dan 816.986 Perempuan. Berikut merupakan tabel persebaran penduduk di Kabupaten Tegal yang tersebar di 18 Kecamatan.

Tabel 1.1

Data Persebaran Penduduk di Kabupaten Tegal 2022

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Margasari	58.618	56.917	115.535
2	Bumijawa	53.161	49.753	102.914
3	Bojong	40.615	38.346	78.961
4	Balapulang	50.550	48.535	99.085
5	Pagerbarang	33.045	32.344	65.389
6	Lebaksiu	50.343	49.515	99.858
7	Jatinegara	32.946	31.294	64.240
8	Kedungbanteng	24.045	23.342	47.387
9	Pangkah	60.042	57.929	117.971
10	Slawi	40.002	39.779	79.781
11	Adiwerna	69.770	66.542	136.312

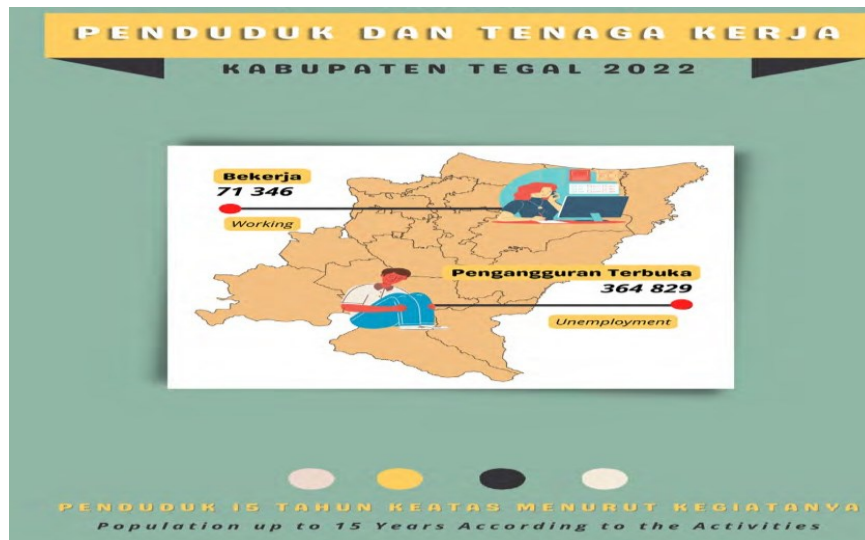
12	Talang	55.239	52.626	107.865
13	Dukuhturi	52.186	49.691	101.877
14	Tarub	45.486	44.046	89.532
15	Kramat	59.825	58.738	118.563
16	Suradadi	49.686	47.743	97.429
17	Warureja	36.019	34.600	70.619
18	Dukuhwaru	36.024	35.246	71.270
TOTAL		847.602	816.986	1.664.588

Dari data tabel di atas dapat lihat bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Tegal paling padat di daerah Kecamatan Adiwerna dengan jumlah penduduk sebesar 136.312 dan wilayah Kecamatan Jatinegara dengan jumlah penduduk sedikit sebesar 64.240 Jiwa.

b. Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tegal pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal pada Tahun 2021/2022 sebesar 19.919 pekerja terdiri dari 8.521 laki-laki dan 11.398 perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir SMK yaitu sebesar 59,5 persen (11.891 orang). Angkatan kerja di Kabupaten Tegal tahun 2021/2022 mencapai 715.845 orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,24 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,97 persen.

Gambar 1.2
Persentase penduduk usia kerja Kabupaten Tegal



Sumber : Kabupaten Tegal dalam angka 2022

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan semakin cerdas yang selanjutnya akan membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi. Jumlah sekolah, murid dan guru pada tahun 2021/2022 sebanyak 695 gedung sekolah, setiap siswa sekolah menampung 187 siswa dan 10 guru, dimana setiap guru menanggung 20 siswa. Dari 114 sekolah SMP, rata-rata menampung 419 siswa dan tenaga pengajar 23 guru untuk setiap sekolah. Rasio murid terhadap guru adalah 1 banding 18. Pada jenjang SMA pada tahun 2021/2022 terdapat 26 gedung sekolah, setiap sekolah rata-rata menampung 446 siswa dan 25 guru dengan rasio murid terhadap guru adalah 1 banding 18.

d. Kesehatan

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal yang bekerjasama dengan pihak swasta . Hal ini terlihat dari banyaknya sarana dan prasaran kesehatan maupun tenaga medis yang tersedia semakin meningkat. Pada tahun 2022 jumlah rumah sakit sebanyak 9

buah. Jumlah puskesmas sebanyak 29 buah yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Tegal yang didukung dengan tenaga kesehatan 216 Dokter/Doket Gigi, 849 Perawat dan 893 bidan.

e. Agama

Untuk meningkatkan kualitas umat beragama maka pembangunan dibidang agama tak bisa di abaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pelaksanaannya terhadap praktek ibadah maka dibutuhkannya tempat untuk ibadah. Keberadaan tempat ibadah merupakan sarana pembentukan dan pembinaan moral yang tangguh. Jumlah tempat ibadah pada tahun 2022 sebanyak 3.538 Masjid dan Mushola, 21 Gereja Kristen dan Katholik, 3 Pura dan 1 Vihara.

f. Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal memiliki sumber daya manusia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2022 berjumlah 9.676 dengan rincian berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 4.280 dan perempuan 5.396. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan formal Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tegal sebagian besar berpendidikan Sarjana strata 1 (S-1).

Tabel 1.2

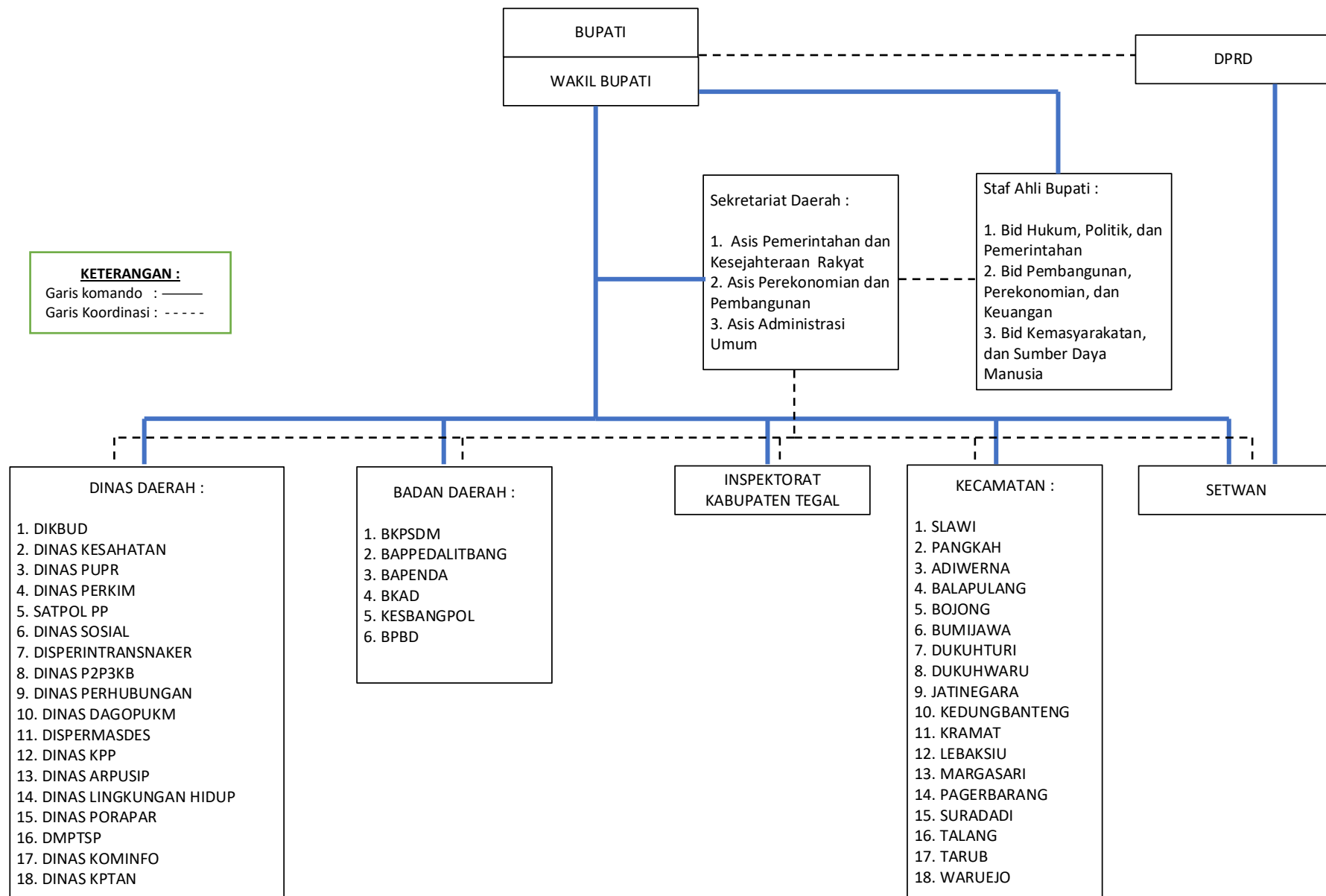
Data Tingkat Pendidikan ASN di Kabupaten Tegal

Pendidikan formal	SD	SLTP	SLTA	SLTA/Kej urusan	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3
Jumlah Gol.	69	202	1034	20	15	334	931	262	6303	504	2

g. Struktur Organisasi Kabupaten Tegal

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Tegal dipimpin oleh Bupati sebagai Kepala Daerah yang dibantu oleh Wakil Bupati. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan

Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut ini:



B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.
- i. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tegal disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Kabupaten Tegal Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Tegal, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya. Dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran, yang terdiri atas :

- Lampiran I : Dokumen PK (Perjanjian Kinerja Tahun 2022)
Lampiran II : IKU Pemerintah Kab. Tegal Tahun 2022
Lampiran III : Lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka sistem pembangunan nasional, maka seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan RPJPD Kabupaten Tegal 2005-2025 dengan Perda Nomor 23 Tahun 2008 dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 yang telah diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun

2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Pemanfaatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Kabupaten Tegal. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

1. SIPD

Sistem informasi saat ini berkembang dengan pesat dan makin dinilai tinggi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi yang dapat berjalan secara online memudahkan penggunaannya untuk mengakses data dimana saja dan kapan saja. Dan sistem informasi yang dibangun tepat akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunaannya dalam pengambilan keputusan. Itulah yang saat ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau perkembangan pemerintah dengan membangun sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pembangunan sistem informasi tersebut dilatarbelakangi lemahnya pemanfaatan data-data pembangunan. Hal itu didasari pula karena data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing Perangkat Daerah serta tidak diperbaharui secara berkala, kemudian instansi yang berfungsi sebagai unit perencanaan pemerintah dalam hal ini Bappeda, mengalami kendala dalam mengumpulkan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena lemahnya koordinasi antara Bappeda dan Perangkat Daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah selain mengatasi kendala di atas juga merupakan amanah dari UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ganti dengan UU 23 Tahun 2014. Kebijakan ini kemudian dibentuk dalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi pedoman bagi pemerintah

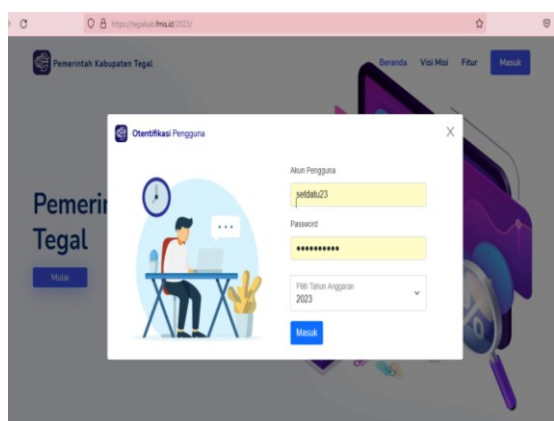
dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014, Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

SIPD berfungsi sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Tentunya sistem informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

Fungsi lainnya SIPD adalah sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini terdiri dari 8 (delapan) Kelompok data. Tiap kelompok data diuraikan ke dalam jenis data. Pengumpulan data di daerah bersumber dari data yang dimiliki oleh seluruh SKPD dan/atau sumber lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. FMIS (*Financial Management Information System*)

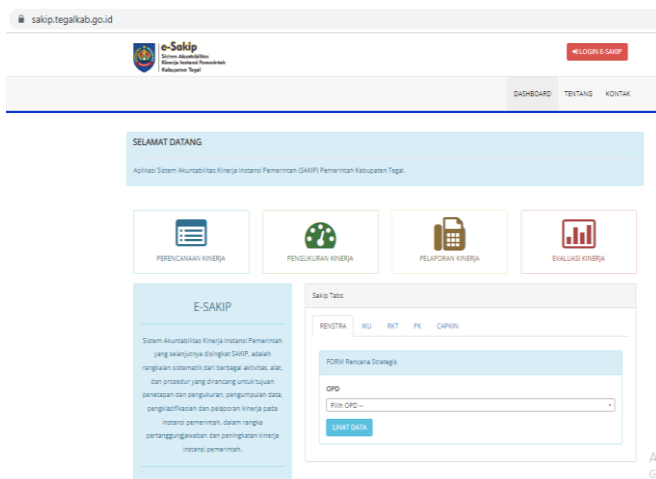
Aplikasi FMIS merupakan pengembangan Aplikasi SIMDA yang sudah dibangun sejak 2003 dan digunakan secara massif oleh pemerintah daerah, dengan dukungan pengembangannya seperti SIMDA BMD, SIMDA Gaji,



SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan dan SAKIP, dan *Cash Management System*. SIMDA juga sudah digunakan untuk pertukaran data antara lain dengan pihak perbankan, LKPP, Kementerian Keuangan RI dan BPK RI.

3. ESAKIP

Sesuai catatan dan rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas Hasil Evaluasi LAKIP Kabupaten Tegal Tahun 2020 yang dievaluasi tahun 2021, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diharapkan adanya pengembangan sistem dan prosedur pengumpulan data kinerja melalui teknologi informasi (TI) yang dapat diverifikasi dan tepat waktu sehingga data kinerja yang disajikan lebih dapat diandalkan. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Tegal. Dengan sistem aplikasi ini diharapkan dapat membantu Perangkat Daerah dalam pelaporan kinerja karena dapat dilaporkan secara elektronik darimana saja dan kapan saja sepanjang dijangkau jaringan internet sehingga Perangkat Daerah dapat melaporkan secara rutin setiap triwulan tepat waktu.

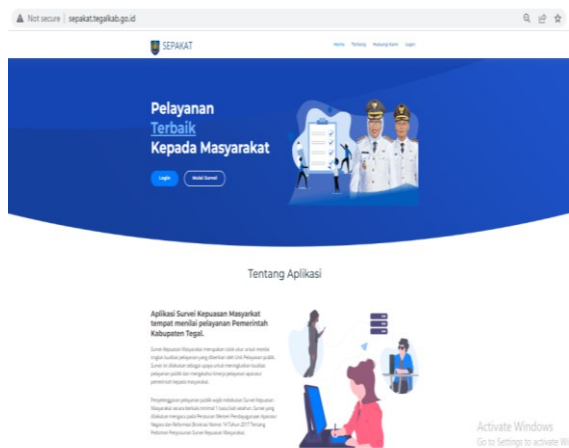


Meskipun menu yang tersedia dalam aplikasi sistem e-SAKIP ini masih belum lengkap namun upaya pengembangan akan terus dilaksanakan sesuai kebutuhan dan mengantisipasi adanya perubahan regulasi yang

berakibat adanya perubahan akuntabilitas kinerja, termasuk dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lainnya yang sudah ada seperti Simrenbangda, Simkeuda, dan Sistem Pengendalian Operasional Kegiatan.

Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah juga dapat memantau kinerja bawahan setiap saat jika diperlukan karena bisa dimonitor secara langsung melalui laptop, tablet maupun smartphone dengan memanfaatkan username dan password yang sudah ada. Dengan demikian, pengendalian dan pengawasan terhadap capaian kinerja PD dapat dilakukan dengan mudah dan sesuai target yang ditetapkan.

4. SEPAKAT (Survei Kepuasan Masyarakat)



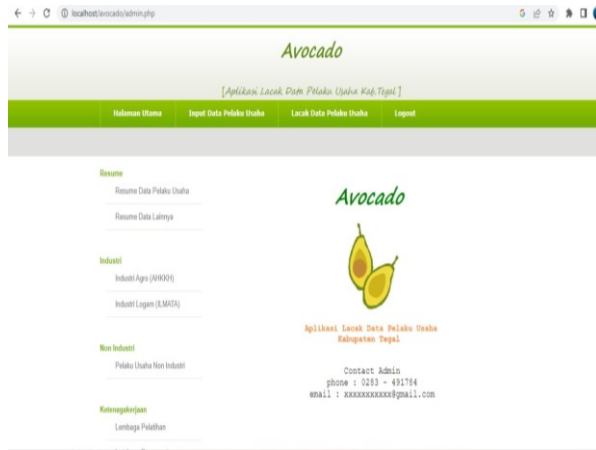
Dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan pendampingan survei kepuasan masyarakat secara mandiri pada masing-masing Perangkat Daerah agar

dapat diperoleh hasil survei kepuasan masyarakat Kabupaten Tegal. Hasil survei tersebut berupa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan cerminan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tegal. Guna memberikan kemudahan, mengikuti perkembangan teknologi, dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik di Kabupaten Tegal.

Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang untuk ikut berperan serta dalam mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui penilaian kualitas pelayanan publik. Perangkat Daerah pun dapat mengetahui penilaian dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan dan mengevaluasinya untuk perbaikan kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal akan membangun aplikasi survei

kepuasan masyarakat untuk membantu pelaksanaan dan pelaporan survei atas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tegal.

5. AVOCADO



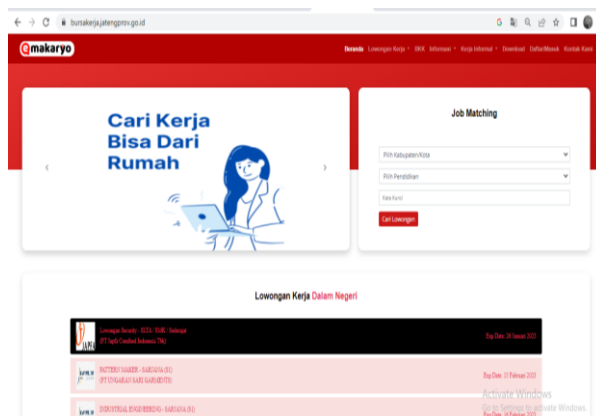
Avocado (aplikasi lacak data pelaku usaha Kabupaten Tegal) dapat digambarkan sebagai aplikasi web yang bersifat internal (intranet) dan hanya bisa diakses dalam lingkup terbatas yang menyediakan layanan, seperti :

- Input Data Pelaku Usaha di Kabupaten Tegal.
- Pencarian Data Pelaku Usaha di Kabupaten Tegal.
- Updating Data Pelaku Usaha di Kabupaten Tegal
- Rekapitulasi Data Pelaku Usaha di Kabupaten Tegal.

Dalam hal penyediaan data pelaku usaha, Avocado (Aplikasi Lacak Data Pelaku Usaha Kabupaten Tegal), sekurang – kurangnya memuat :

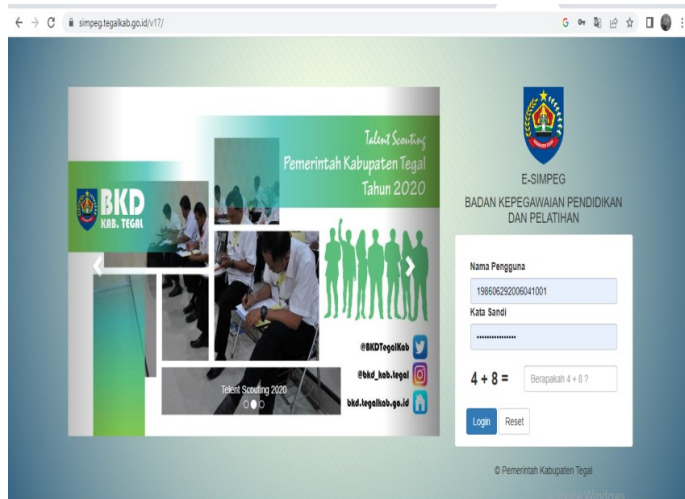
- Data identitas pelaku usaha,
- Data Jumlah Pelaku Usaha Keseluruhan,
- Data Tenaga Kerja, dll.

6. E-Makaryo



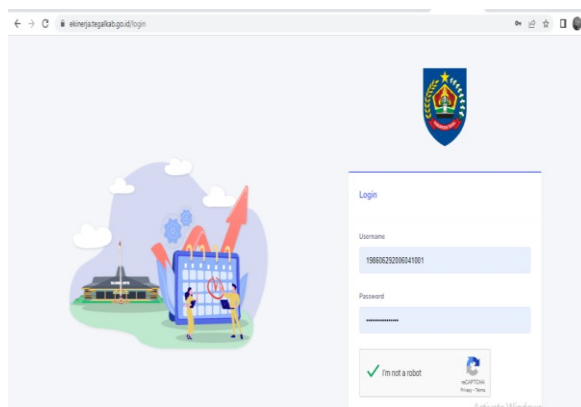
E-Makaryo (Bursa Kerja Jawa Tengah) adalah sistem yang mempertemukan antara penyedia kerja, pencari kerja, dan BLK Seluruh Jawa Tengah. Di mana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Pengelolanya.

7. E-Simpeg



Simpeg adalah aplikasi berbasis Elektronik Sistem Pegawai yang menyangkut berkaitan dengan biodata para pegawai ASN di lingkungan kab. Tegal. Seperti data pribadi sampai riwayat – riwayat.

8. E-Kinerja

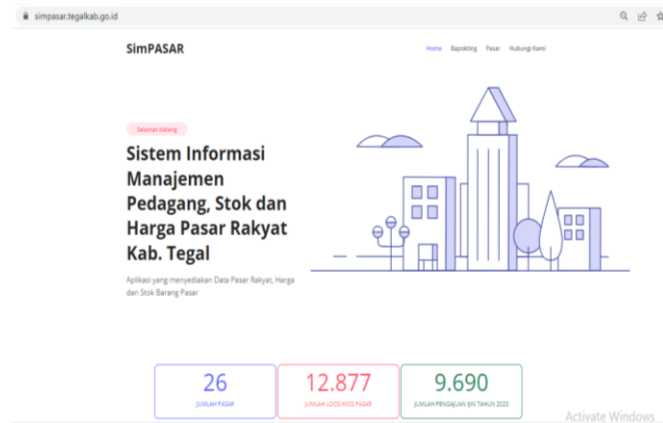


Aplikasi e Kinerja adalah sebuah aplikasi berbasis *website* untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Aplikasi E-Kinerja memberikan output nilai Aktivitas Kinerja (AK).

Data Aktivitas Kinerja (AK) ini menjadi salah satu indikator yang digunakan pembayaran TPP bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

8. Simpasar (Sistem Informasi Manajemen Pedagang, Stok dan Harga Pasar Rakyat Kabupaten Tegal)



B. RENCANA STRATEGIS

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tegal telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Tegal sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dimaksud, adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal Yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia”
“mbangun berkah, gawe bungah”

Visi Kabupaten Tegal tersebut, merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tegal dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Arti visi :

- Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan berkelanjutan.
- Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimistis, semangat belajar yang tinggi,

ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

- Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.
- Berakhlak mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

2. Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1) **Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.**

Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, *downsizing* dan *rightsizing*, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya

pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan *e-government* sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

2) Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan *backlog* rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

3) Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini memiliki makna pembangunan ekonomi rakyat yang kokoh dan maju yaitu adanya hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkeadilan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah. Dalam konsep ekonomi, artinya masyarakat mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan. Konsep pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kabupaten Tegal dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran). *Pro Growth Strategy* juga mencakup strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. *Pro-growth* selanjutnya diharap dapat mendorong program pengentasan kemiskinan atau *Pro-poor* dan penciptaan lapangan kerja atau *Pro-job*.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit* 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, diharapkan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan juga tidak menimbulkan gradasi lingkungan (*Enviromental Gradient*). Penerapan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi

tinggi yaitu pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri pengolahan harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatannya.

4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi ini memiliki makna peningkatan kualitas hidup manusia untuk membentuk karakter dan kualitas sumberdaya manusia yang pintar, sehat, sejahtera dan berakhlak mulia melalui penyelenggaraan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata dan bermutu. Instrumen dasar dalam penguatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah perangkat ampuh dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, serta harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan lintas sektor. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi tujuan utama dalam implementasi Misi keempat ini, dengan sasaran antara lain peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemberdayaan dan pembangunan gender serta peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan pemanfaatan atas hasil pengkajian kelitbangan untuk dapat diterapkan dalam rangka mendukung program-program bidang pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi juga menjadi faktor yang penting dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Untuk itu,

pemanfaatan teknologi informasi pada upaya peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja/organisasi merupakan satu kesatuan kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem.

5) Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Misi ini memiliki makna untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkuat kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator

kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN
Misi I : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel, dan Efektif Melayani Rakyat.	
A.1. Mewujudkan transparansi akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan	A.1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	A.1.2. Meningkatnya Kualitas manajemen Kinerja
	A.1.3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
	A.1.4. Meningkatnya Kualitas manajemen Kepegawaian Daerah

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN
Misi II : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan	
B.1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berwawasan Lingkungan	B.1.1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap
	B.1.2. Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan
	B.1.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN
Misi III : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	
C.1. Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan	C.1.1. Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian
	C.1.2. Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan
	C.1.3. Meningkatnya Produktivitas

Pariwisata	Pariwisata
	C.1.4. Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Misi 4 RPJMD Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
D.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	D.1.1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat
	D.1.2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
	D.1.3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender
	D.1.4. Meningkatnya Produktivitas Pemuda
D.2. Menekan Laju Kemiskinan	D.2.1. Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
	D.2.2. Menekan Laju Tingkat Pengangguran

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Misi 5 RPJMD Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN
Misi V : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal	
E.1. Meningkatkan Kententraman dan Keterdiban Umum masyarakat	E.1.1. Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakan
E.2. Menurunnya Resiko Bencana	E.2.1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana
E.3. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	E.3.1. Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan ada 9 (sembilan) yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;

Mewujudkan sebuah pelayanan yang mudah cepat dan transparan kepada masyarakat, melalui pelayanan satu pintu, diwujudkan dengan menciptakan satu pusat sistem layanan terpadu, merupakan muara dari berbagai sistem pelayanan yang tersebar di berbagai instansi dalam sebuah *mall* pelayanan publik berbasis digital.

2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;

Sebuah program penumbuhan wirausaha dengan upaya yang terstruktur dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bukan hanya membuat barang dan jasa tetapi mengembangkan keterampilan menciptakan transaksi untuk membuat nilai tambah, dan menumbuhkan kemampuan menakar peluang bisnis beserta dengan risikonya, dengan mewujudkan peluang berwirausaha secara nyata akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang serta Pengembangan Wilayah;

Strategi yang akan dilakukan adalah pemeliharaan jalan antara lain dengan cara pendayagunaan mandor jalan dan unit reaksi cepat penambalan jalan untuk mengantisipasi secara cepat setiap kerusakan jalan yang terjadi dan pemilihan jenis konstruksi jalan yang lebih tahan terhadap kerusakan serta mulai melengkapi jalan dengan konstruksi drainase. Selain itu dilakukan pengembangan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kawasan yang progresif. Strategi yang dilakukan adalah mempersiapkan prasyarat project-project dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang.

4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;

Upaya pengurangan luas Kawasan kumuh merupakan upaya kolaboratif baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa dan para pihak swasta. Upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan Bantuan RTLH melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Upaya Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa RTLH. Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten adalah dengan Program Kampung Ora Kumuh. Diharapkan Dana Desa dari Pemerintah Desa juga fokus pada penanganan kumuh. Dengan upaya kolaborasi ini kawasan kumuh akan tuntas ditangani dengan cepat.

5. Penanganan Dampak Covid-19

Penanganan dampak covid-19 tetap perlu dilakukan dalam periode perencanaan pasca tahun 2020. Penanganan dampak covid-19 dilakukan terhadap penanganan lanjutan covid-19 (kuratif) berupa upaya penjaminan kualitas kesehatan publik. Penanganan lanjutan covid-19 dilakukan dengan menjamin setiap penduduk Tegal yang terinfeksi atau berpotensi terinfeksi. Pemulihan sosial pasca covid-19 dilakukan melalui upaya pemenuhan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*). Sementara pemulihan ekonomi pasca covid-19 dilakukan melalui kebijakan khususnya terkait stimulus ekonomi masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingga kecil harus dikeluarkan melalui berbagai program/kegiatan. Transformasi ekonomi wilayah potensial melalui digitalisasi ekonomi, kolaborasi ekonomi hingga inovasi implementasi budaya kerja baru (*new normal*).

6. Penataan Kota Slawi

Secara jaringan infrastruktur transportasi, Kota Slawi terdiri dari 9 koridor utama. Penataan Kota Slawi selain harus memberikan makna

pada kota (*city branding*), juga harus memperhatikan 3 aspek yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Aspek Aksesibilitas meliputi jaringan jalan, jaringan, drainase dan prasarana sarana utilitas (PSU). Aspek Amenitas meliputi kelengkapan jalan seperti jalur, rabu, parking area dan taman untuk menambah keindahan dan identitas sebuah koridor. Sedangkan aspek atraksi meliputi kelengkapan dan atraksi serta aktifitas manusia untuk mengisi ruang – ruang yang telah disediakan. Pada RPJMD perubahan penataan kota Slawi akan focus pada 2 Koridor, yaitu koridor 1 dan 2 yang lebih diwarnai sebagai pusat pemerintah dan ruang public. Diharapkan dengan Penataan Kota Slawi akan dapat memberikan kemanfaatan pemicu pertumbuhan ekonomi kawasan penyangga Kota Slawi.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, penanganan sampah dilakukan dengan penyediaan armada, TPS, TPS Terpadu dan Pembuatan TPA baru dengan sistem sanitary landfill, sedangkan pengurangan sampah dilakukan dengan upaya pengurangan sampah difokuskan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau kawasan untuk mengurangi beban sampah yang dibuang ke TPA. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik dan anorganik melalui pendekatan 3R yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle* adalah hal yang harus segera dilaksanakan agar dilakukan dengan penyelenggaraan, salah satunya dengan Program Desa Merdeka Sampah. Program Desa Merdeka sampah merupakan program yang didesain sebagai bantuan keuangan kepada desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga akan mengurangi timbulan sampah.

8. Pengembangan Sistem Berbasis Pemerintah Elektronik

Dalam penguatan integritas, selururuh aspek perlu dikuatkan tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan

Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. penekanan dalam penguatan integritas pemerintahan adalah bagaimana bisa smart dalam berpemerintahan. Penguatan seluruh aspek integritas harus bermuatan Smart. Oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi salah satu prasyarat akselerasi penguatan integritas ini antara lain dalam penerapan e-office dalam aspek tata kerja pemerintahan.

9. Pembinaan Olahraga, Pemberdayaan Pemuda dan Pelestarian Budaya.

Pembinaan olahraga diarahkan dengan memberikan sebesar besarnya kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka mewujudkan cita citanya menjadi olahragawan yang andal dan profesional, yang bisa menjadi kebanggaan pemerintah Kabupaten Tegal. Program ini dilakukan dengan upaya memberikan perhatian kepada olahragawan serta memberikan insentif dan penghargaan kepada atlet yang layak sesuai prestasinya. Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk mengoptimalkan kepeloporan pemuda dan pengembangan pemuda kreatif. Sementara pelestarian budaya diarahkan pada upaya pelestarian, pemajuan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, permainan tradisional, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa dan ritus, hingga cagar budaya.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal, maka Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tegal yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 pada Bab VIII tabel 8.2, Adapun Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat			
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten
5		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK
6		Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan			
7	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan
8		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak
9		Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten
10		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan			
11	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri dan		Pertumbuhan Ekonomi

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran
	Pariwisata		
12		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian
13		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri
14		Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap RAD Kabupaten
15		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			
16	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
17			Indeks Pembangunan Gender (IPG)
18		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan
19		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
20		Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Wirausahaan Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis
21	Menekan Laju Kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin
22		Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan
			Indeks Keparahan Kemiskinan
23		Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenang dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal			
24	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran
25		Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan
26	Menurunkan Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana
27		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah
28	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
29		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2022 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Perjanjian Kinerja dan melakukan perubahan pada Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
1	Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini; Tahunan	64,69
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,4
		3	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	82,15
3	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja	4	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	67,61
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	5	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP
5	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	6	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	76,42
6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	7	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Angka; Komulatif	77,26
7	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	8	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	78,80
		9	Persentase Infranstruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persen; Tahunan	76,93
8	Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan	10	Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	75,30
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,33

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
10	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	12	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	3,59-5,20
11	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	13	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	2,69-3,25
12	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	14	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; Tahunan	1,50-3,56
13	Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	15	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Persen; Tahunan	1,99
14	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	16	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	2,56-3,92
15	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	17	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	69,43
		18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	87,03
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	19	Indeks Pendidikan	Tahun; Tahunan	0,556
17	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	20	Indeks Kesehatan	Tahun; Tahunan	0,801
18	Meningkatnya Produktifitas Pemuda	21	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	400
19	Menekan Laju Kemiskinan	22	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,45-8,12
20	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	23	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,98
		24	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,15
21	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	25	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	10,21-9,42
22	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	26	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	Persen; Tahunan	86,66

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
	Masyarakat		terselesaikan		
23	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditekankan	27	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditekankan	Persen; Tahunan	86,66
24	Menurunnya Resiko Bencana	28	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	177,71
25	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menurunkan Resiko Bencana	29	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,72
26	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	30	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Indeks; Tahunan	55,27
27	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	31	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	Indeks, tahunan	65,50

E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

Adapun untuk perubahan anggaran di tahun 2022 di tetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 61

Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2022.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 2.869.008.063.000,00 dengan adanya perubahan anggaran bertambah sejumlah Rp. 91.258.508.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.960.266.571.000,00 dengan komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.704.362.172.289,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.257.524.134.711,00. Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Rencana Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan		
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	49.573.893.968
3		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	29.904311.440
4		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	541.115.460.000
5		Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	4.750.712.000
6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan		
7		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	195.685.061.000
8		Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan	12.450.310.000

No	Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran
9		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	25.369.797.400
10	Mewujudkan Perekonomian yang Kuat Berbasis Pertanian, Pengolahan dan Pariwisata		
11		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	10.714.872.450
12		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	728.000.000
13		Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	4.212.332.000
14		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	3.227.499.000
15	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		
16		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	318.069.810.000
17		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1.615.597.562.927
18		Meningkatnya Produktivitas Pemuda	8.275.971.000
19	Menekan Laju Kemiskinan		
20		Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	15.260.636.800
21		Menekan Laju Tingkat Pengangguran	4.749.653.000
22	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat		
23		Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	7.376.162.002

No	Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran
24	Menurunkan Resiko Bencana		
25		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	3.816.860.000
26	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		
27		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	1.650.000.000

Sumber : BPKAD dan Bappeda Kabupaten Tegal (diolah)

Tabel 2.9
Rencana Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022 Perubahan

No	Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan		
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	48.589.667.350
3		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	27.499.062.190
4		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	540.493.886.100
5		Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	4.635.712.000
6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan		
7		Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	209.285.125.500
8		Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan	13.082.310.000
9		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28.578.327.400

No	Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran
10	Mewujudkan Perekonomian yang Kuat Berbasis Pertanian, Pengolahan dan Pariwisata		
11		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	11.414.872.450
12		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	934.700.000
13		Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	4.874.832.000
14		Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	3.690.499.000
15	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		
16		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat Pendidikan	314.177.030.500
17		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat Kesehatan	129.185.423.694
18		Meningkatnya Produktivitas Pemuda	8.569.721.000
19	Menekan Kemiskinan Laju		
20		Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	23.260.678.300
21		Menekan Laju Tingkat Pengangguran	4.822.587.000
22	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Umum		
23		Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	7.215.926.502
24	Menurunkan Resiko Bencana		
25		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan	3.816.860.000

No	Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran
		Resiko Bencana	
26	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		
27		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	1.644.735.000

Sumber : BPKAD dan Bappeda Kabupaten Tegal (diolah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun ketiga dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019 - 2024, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja yang dikelompokkan dalam 5 (lima) misi besar.

A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Tegal dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2020. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Kemudian efisiensi dan tingkat efektifitas kinerja tidak terlepas dari capaian kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan. Untuk penghitungannya persasaran kinerja. Adapun cara penghitungannya sebagai berikut :

1. Tingkat Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = 100\% \text{ kinerja} - \% \text{ realisasi penggunaan anggaran}$$

2. Tingkat Efektifitas

$$\text{Efektifitas} = \frac{\% \text{ Kinerja}}{\% \text{ realisasi penggunaan anggaran}} \times 100\%$$

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat									
1.	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai; Tahunan	64,69	64,62	99,89
		1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai; Tahunan	82,15	81,38	99,06
				3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai; Tahunan	2,4	3,1	129,17
		2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	4.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	67,61	62,56	92,53
		3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	5.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	100
		4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	6.	Indeks Profesionalism e ASN	Skor; Tahunan	76,42	50,49	66,07
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.									
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan			7.	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan	Angka; Kumulatif	77,27	80,90	104,69
		5.	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	8.	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	78,80	82,36	104,51

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022
				9.	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persen; Tahunan	76,93	76,96	100,3
		6.	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	10.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	75,30	79,3	105,31
		7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,33	64,27	116,16

Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan

3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			12.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	3,59 – 5,20	5,14	100
		8.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	13.	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	2,69 – 3,25	1,67	62
		9.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	14.	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; Tahunan	1,50 – 3,56	4,43	124,43
		10.	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	15.	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Jumlah; Tahunan	1,99	4,5	226,13
		11.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	16.	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	2,56 – 3,92	2,62	100

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			17.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	69,43	69,53	100,14
				18.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	87,03	87,53	100,57
		12.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	19.	Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	0,556	0,5958	107,16

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022
		13.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	20.	Indeks Kesehatan	Poin; Tahunan	0,801	0,798	99,56
		14.	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	21.	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	400	397	99,25%
5.	Menekan Laju Kemiskinan			22.	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,45 – 8,12	7,9	100
		15.	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	23.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,98	0,95	100,2
				24.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,15	0,17	98
		16.	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	25.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	10,21 – 9,42	9,64	100
Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal									
6.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat			26.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	86,66	86,96	100,35
		17.	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	27.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persen; Tahunan	86,66	86,96	100,35
7.	Menurunnya Resiko Bencana			28.	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	177,71	176,85	100,48
		18.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	29.	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,72	0,74	102,78
8.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			30.	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Indeks; Tahunan	55,27	56,91	103
		19.	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	31.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Indeks; Tahunan	65,50	68,7	104,89

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

- a. Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat melalui transparansi, akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan, dapat dilihat dari indikator:
 1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, mencapai : 100,03% atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), mencapai : 102,16% atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 3. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mencapai : 111% atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 4. Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tegal, mencapai : 96,44 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 5. Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mencapai : 100 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 6. Nilai Indeks Profesionalitas ASN mencapai 66,07% atau dengan kategori sedang
- b. Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan, dapat dilihat dari indikator :
 1. Nilai Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan mencapai 104,69% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 2. Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap mencapai 104,5% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 3. Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan yang layak mencapai 100,3% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 4. Nilai Rasio Konektivitas Kabupaten mencapai 105,31% atau dengan kategori Sangat Tinggi

5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 116,16% atau dengan kategori Sangat Tinggi
- c. Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan melalui Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata, dapat dilihat dari indikator :
1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi, mencapai 100% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 2. Laju PDRB Sektor Pertanian mencapai 62% atau dengan kategori Rendah
 3. Laju PDRB Sektor Industri mencapai 124,43% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 4. Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten mencapai 226,13% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 5. Laju PDRB Sektor Perdagangan mencapai 100% atau dengan kategori Sangat Tinggi
- d. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menekan laju kemiskinan, dapat dilihat dari indikator :
1. Nilai Indeks Pembangunan Manusia, mencapai : 100,14 % atau dengan kategori Sangat Tinggi
 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG), mencapai : 100,57 % atau dengan Sangat Tinggi
 3. Indeks Pendidikan mencapai 107,16 atau dengan kategori Sangat Tinggi
 4. Indeks Kesehatan mencapai 99,56% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 5. Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis mencapai 99,25% atau dengan kategori Sangat Tinggi

6. Persentase Penduduk Miskin mencapai 100% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 7. Indeks Kedalam Kemiskinan mencapai 100,2% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 8. Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai 98% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 9. Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 100% atau dengan kategori Sangat Tinggi
- e. Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal, melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat; menurunkan resiko bencana serta peningkatan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, dapat dilihat dari indikator :
1. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan mencapai 100,35% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 2. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan mencapai 100,35% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 3. Indeks Resiko Bencana, mencapai 100,48% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 4. Indeks Kapasitas Daerah mencapai 102,78% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 5. Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan mencapai 103% atau dengan kategori Sangat Tinggi
 6. Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan 104,89% atau dengan kategori Sangat Tinggi

Rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 adalah sebesar 105,40%, atau dengan kategori Sangat Tinggi.

2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Tegal. Pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh satu) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan			1 Indikator
		1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2 Indikator
		2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1 Indikator
		3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Indikator
		4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	1 Indikator

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan			1 Indikator
		5.	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	2 Indikator
		6.	Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan	1 Indikator
		7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indikator
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			1 Indikator
		8.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	1 Indikator
		9.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	1 Indikator
		10.	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	1 Indikator
		11.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	1 Indikator
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			2 Indikator
		12.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	1 Indikator
		13.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Indikator
		14.	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	1 Indikator
5.	Menekan Laju Kemiskinan			1 Indikator
		15.	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	2 Indikator
		16.	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	1 Indikator
6.	Meningkatkan Ketentraman dan			1 Indikator

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator
	Ketertiban Umum Masyarakat	17.	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	1 Indikator
7.	Menurunnya Resiko Bencana			1 Indikator
		18.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Bencana	1 Indikator
8.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			1 Indikator
		19.	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan kebudayaan	1 Indikator

Secara umum pemerintah Kabupaten Tegal telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022
1.	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai; Tahunan	64,69	64,62	99,89
		1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai; Tahunan	82,15	81,38	99,06
				3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai; Tahunan	2,4	3,1	129,17
		2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	4.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	67,61	62,56	92,53
		3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	5.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	100

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022
		4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	6.	Indeks Profesionalisme ASN	Skor; Tahunan	76,42	50,49	66,07
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan			7.	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan	Angka; Kumulatif	77,27	80,90	104,69
		5.	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	8.	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	78,80	82,36	104,51
				9.	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persen; Tahunan	76,93	76,96	100,3
		6.	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	10.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	75,30	79,3	105,31
		7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,33	64,27	116,16
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			12.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	3,59 – 5,20	5,14	100
		8.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	13.	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	2,69 – 3,25	1,67	62
		9.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	14.	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; Tahunan	1,50 – 3,56	4,43	124,43
		10.	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	15.	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Jumlah; Tahunan	1,99	4,5	226,13
		11.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	16.	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	2,56 – 3,92	2,62	100
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			17.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	69,43	69,53	100,14

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022
				18.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	87,03	87,53	100,57
		12.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	19.	Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	0,556	0,5958	107,16
		13.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	20.	Indeks Kesehatan	Poin; Tahunan	0,801	0,798	99,56
		14.	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	21.	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	400	397	99,25
5.	Menekan Laju Kemiskinan			22.	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,45 – 8,12	7,9	100
		15.	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	23.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,98	0,95	100,2
				24.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,15	0,17	98
		16.	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	25.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	10,21 – 9,42	9,64	100
6.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat			26.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	86,66	86,96	100,35
		17.	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	27.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persen; Tahunan	86,66	86,96	100,35
7.	Menurunnya Resiko Bencana			28.	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	177,71	176,85	100,48
		18.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	29.	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,72	0,74	102,78
8.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			30.	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Indeks; Tahunan	55,27	56,91	103
		19.	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	31.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Indeks; Tahunan	65,50	68,7	104,89

Adapun capaian dari masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintah

Dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung tujuan kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan Budaya Anti Korupsi Dalam Pemerintah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	64,69	64,62	99,89	65,69

Capaian kinerja tujuan mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 99,89 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini mengalami peningkatan kualitas hal ini karena Pemerintah Kabupaten Tegal telah menindaklanjuti rekomendasi Kemenpanrb dalam implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tegal. Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil dari evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dituangkan dalam bentuk nilai yang dinamakan Indeks Reformasi Birokrasi.

Rincian hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	12,77
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,48
	III. Reform	30,00	35,85
B.	Komponen Hasil		
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,43
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,84
	3. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,15
	4. Kinerja Organisasi	10,00	6,35
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	64,62

Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 menggunakan data terakhir pada tahun 2021.

Hal-hal yang telah dilaksanakan guna meningkatkan capaian kinerja reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut :

- a. Menerapkan implementasi reformasi birokrasi pada semua perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi reformasi birokrasi pada perangkat daerah dengan menitik beratkan pada peran agen perubahan pada perangkat daerah.
- c. Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk menyempurnakan produk hukum yang dibentuk.
- d. Pemerintah Kabupaten Tegal sedang melakukan penyesuaian Peta Proses Bisnis baik di level pemerintah kabupaten maupun perangkat daerah.
- e. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM antara lain menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada

kinerja organisasi dan menjadikannya sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

- f. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan peraturan bupati terkait standar kompetensi jabatan.
- g. Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas di unit kerja pelayanan (RSUD dr. Soeselo) sehingga unit tersebut menjadi unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM.
- h. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM).

Capaian realisasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 64,62 masih belum melampaui target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 65,69, capaian tahun 2022 ini sudah 98,37% dari target akhir RPJMD sehingga diharapkan setelah berakhirnya RPJMD 2019-2024 target reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar 65,69 bisa tercapai.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Tegal adalah pada perangkat daerah belum bisa sepenuhnya menyentuh esensi dari pelaksanaan reformasi birokrasi, pelaksanaan reformasi birokrasi masih sebatas pemenuhan dokumen yang ada pada 8 (delapan) area perubahan.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Transparasi, Akuntabilitas dan Budaya Anti Korupsi Dalam Pemerintah

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Reformasi Birokrasi	50,10	63,69	127,13	64,19	64,21	100,03	64,69	64,62	99,89

Dari tabel 3.6 realisasi capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami

peningkatan walaupun secara presentasi capaian mengalami penurunan namun secara nilai setiap tahun mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena target tahun sebelumnya masih dibawah target tahun 2022.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja kinerja tujuan mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintah :

- a. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
- b. Program aplikasi informatika
- c. Program informasi dan komunikasi publik
- d. Program penyelenggaraan statistic sektoral
- e. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- f. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- g. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- h. Program administrasi pemerintahan desa
- i. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- j. Program pendaftaran penduduk
- k. Program pencatatan sipil
- l. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- m. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- n. Program pembinaan dan pengawasan pemeritahan desa
- o. Program perekonomian dan pembangunan
- p. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- q. Program penelitian dan pengembangan daerah
- r. Program pengelolaan keuangan daerah
- s. Program pengelolaan barang milik daerah
- t. Program pengelolaan arsip
- u. Program penyelenggaraan pengawasan
- v. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
- w. Program kepegawaian daerah
- x. Program pengembangan sumber daya manusia

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tujuan mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintah sebesar Rp. 597.071.512.398 dari anggaran Rp. 621.844.717.558,- atau 96,01% dengan capaian indikator kinerja sebesar 99,89% dan dana yang digunakan sebesar 96,01% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,99% serta tingkat efektifitas sebesar 104,04%.

Gambar 3.1

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
pada perangkat daerah



Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 2 (dua) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai; Tahunan	82,15	81,38	99,06	86,2
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai; Tahunan	2,4	3,10	129,17	2,6
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					106,58	

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah seringkali dirasakan kurang maksimal oleh masyarakat. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang salah satunya mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam penilaian bentuk survei kepada masyarakat. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 adalah 81,38 atau 99,06% dengan predikat **sangat tinggi** dibandingkan dengan target tahun 2022, sedangkan capaian target RPJMD adalah 86,2, sehingga capaian tahun 2022 masih 94,40 dari target RPJMD. Adapun perkembangan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,61	80,83	102,82	80,46	82,20	102,16	82,15	81,38	99,06

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebesar 81,38 atau masuk dalam kategori **“Baik”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah dilaksanakan dengan baik. Nilai hasil survei kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami naik turun, pada tahun 2022 ini mengalami penurunan dari tahun 2021 hal ini disebabkan karena dalam survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan publik masih ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang

diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah unsur pengaduan masyarakat, sehingga hal ini menjadi perhatian dari unit penyelenggara pelayanan publik guna meningkatkan kembali pelayanan yang diberikan guna mengambil kembali kepercayaan masyarakat Kabupaten Tegal. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat pada perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik yang melakukan survei secara mandiri dengan pendampingan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tegal dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

No	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM
1	SETDA	82,22
2	SEKRETARIAT DPRD	91,44
3	INSPEKTORAT	82,00
4	BAPPEDALITBANG	83,08
5	BAPENDA	80,56
6	BPKAD	87,52
7	BKD	89,74
8	BADAN KESBANGPOL	57,41
9	BPBD	87,50
10	DINAS DIKBUD	84,96
11	DINAS KESEHATAN	81,31
12	DINAS PUPR	84,89
13	DINAS PERKIM	81,31
14	SATPOL PP	83,64
15	DINAS SOSIAL	78,43
16	DINAS PERINTRANSNAKER	80,02
17	DINAS P3AP2 DAN KB	84,37
18	DINAS LH	83,82
19	DINAS DUKCAPIL	80,27
20	DINAS PERMASDES	79,36
21	DINAS PERHUBUNGAN	86,02
22	DINAS KOMINFO	78,96
23	DINAS PMPTSP	89,67
24	DINAS PORAPAR	85,19
25	DINAS PERPUSIP	82,38
26	DINAS KPTAN	84,28
27	DINAS PERIKANAN	98,61
28	DINAS KOPERASI, UKM, DAN	89,61

	PERDAGANGAN	
29	RSUD dr. SOESELO	77,01
30	RSUD SURADADI	79,38
31	KECAMATAN MARGASARI	80,06
32	KECAMATAN BUMIJAWA	81,80
33	KECAMATAN BOJONG	86,72
34	KECAMATAN BALAPULANG	82,00
35	KECAMATAN PAGERBARANG	81,03
36	KECAMATAN LEBAKSIU	90,28
37	KECAMATAN JATINEGARA	83,42
38	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	80,78
39	KECAMATAN PANGKAH	89,92
40	KECAMATAN SLAWI	83,10
41	KECAMATAN DUKUHWARU	85,19
42	KECAMATAN ADIWERNA	78,77
43	KECAMATAN DUKUHTURI	82,22
44	KECAMATAN TALANG	86,52
45	KECAMATAN TARUB	78,93
46	KECAMATAN KRAMAT	81,63
47	KECAMATAN SURADADI	79,10
48	KECAMATAN WARUREJA	82,10
49	Perusda Tirta Ayu Kabupaten Tegal	81,23
NILAI IKM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022		81,38

Berdasarkan data tabel 3.9 tersebut, masih terdapat 1 Perangkat Daerah maupun Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang masih mempunyai nilai kurang baik karena hasil Survei Kepuasan Masyarakat masih dibawah 76,61. Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2022 nilai unsur pada masing-masing perangkat daerah maupun Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang paling banyak memperoleh nilai rendah adalah unsur penanganan pengaduan menjadi prioritas perbaikan bagi hampir seluruh Perangkat Daerah. Hal ini menggambarkan kondisi penanganan pengaduan pelayanan publik di UPP Kabupaten Tegal belum optimal dirasakan oleh masyarakat, sehingga kedepan perlu adanya perbaikan terhadap unsur tersebut.

Adapun nilai interval Indeks Kepuasan Masyarakat menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

A (Sangat Baik)	:	88,31 – 100
B (Baik)	:	76,61 – 88,30
C (Kurang Baik)	:	65,00 – 76,60
D (Tidak Baik)	:	25,00 – 64,99

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 adalah sebesar 3.10 (tiga koma sepuluh) atau berpredikat **Baik**. Persentase capaian Indeks SPBE tahun 2022 jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 adalah sebesar 129.17% (seratus dua puluh sembilan koma tujuh belas persen) dengan predikat **sangat tinggi**. Perbandingan hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks SPBE

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1	Indeks SPBE	Nilai; Tahunan	2,4	3,10	129,17	2,6

Capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari tahun 2018-2020 secara berturut-turut adalah 2.58 (dua koma lima delapan), 2.82 (dua koma delapan dua) dan 3.11 (tiga koma sebelas). Sementara, capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari tahun 2021-2022 adalah 2.55 (dua koma lima

puluh lima) dan 3.10 (tiga koma sepuluh). Capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Indeks SPBE 2018-2022

Tahun	Domain	Jumlah Pertanyaan	Indeks SPBE	Target Nasional	Dasar Hukum
2018	Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE	37	2.58	2.6	Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018
2019	Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE	37	2.82	2.6	Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018
2020	Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE	37	3.11	2.6	Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018
2021	Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE	47	2.55	2.6	Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020
2022	Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE	47	3.10	2.6	Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa capaian Indeks SPBE 2018-2020 mengalami peningkatan. Demikian pula juga capaian Indeks SPBE 2021-2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian Indeks SPBE Tahun 2022 telah melampaui target akhir RPJMD 2019-2024 dan capaian nasional.

Beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan atau kenaikan nilai Indeks SPBE tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya program kerja Tim Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan amanat di Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

2. Tersusunnya peraturan pelaksanaan atas Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 seperti Peraturan Bupati Tegal tentang Arsitektur SPBE, Peraturan Bupati Tegal tentang Peta Rencana SPBE, Peraturan Bupati Tegal tentang Manajemen Data dan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tegal.
3. Terimplementasikannya domain Manajemen SPBE melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Keberhasilan capaian Indeks SPBE tahun 2022 melampaui target RPJMD Kabupaten Tegal dan nasional tidak bisa terlepas dari dukungan sumberdaya, baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Dalam konteks sumber daya keuangan, keberhasilan ini didukung kegiatan tahun 2021-2022 seperti:

1. Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko SPBE.
2. Penyusunan Dokumen Manajemen SDM SPBE.
3. Audit Internal Infrastruktur SPBE.
4. Audit Internal Aplikasi SPBE.
5. Pengelolaan Pusat Data dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Sementara, dalam konteks sumber daya manusia keberhasilan ini didukung dengan adanya Program *Digital Talent Scholarship* (DTS) bekerja sama dengan Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo melalui serangkaian pelatihan yang dilakukan di Kabupaten Tegal.

Kendati capaian Indeks SPBE tahun 2022 telah melampaui target RPJMD Kabupaten tegal 2019-2024 namun tetap dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan Indeks SPBE tahun 2023 dengan dukungan anggaran kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

2. Penyusunan Dokumen Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan dan Manajemen Aset TIK.
3. Pembangunan Gedung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Gambar 3.2
Evaluasi SPBE



Program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - d. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - e. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - f. Program Pendaftaran Penduduk
 - g. Program Pencatatan Sipil
 - h. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - i. Program Aplikasi Informatika
 - j. Program Informatika dan Komunikasi Publik
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar Rp. 44.856.329.639,- dari anggaran Rp. 48.968.519.268,- atau 91,60% dengan capaian indikator kinerja sebesar 106,58% dan dana yang digunakan sebesar 91,60% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,4% serta tingkat efektifitas sebesar 116,35%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kinerja, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung sasaran kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	67,61	62,56*	92,53	73,61

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 92,53% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal dan tidak berkelanjutan. Efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun berjalan, sebagaimana praktik yang selama ini terjadi.

Untuk realisasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 62,56 menggunakan capaian tahun 2021 (n-1), capaian ini masih belum melampaui target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 73,61 sehingga progress capaian tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 84,98%. Dengan menyisakan waktu 2 tahun untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2024 dengan nilai 73,61 dibutuhkan kerja keras dimana hasil penilaian SAKIP dari tahun ke tahun masih dikisaran nilai 60-an. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan akuntabilitas kinerja agar semakin baik. Adapun perkembangan nilai SAKIP Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Nilai SAKIP Kabupaten
Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP Kabupaten	63,61	61,36*	96,45	65,61	63,28*	96,44	67,61	62,56*	92,53

*(n-1)

Berdasarkan tabel 3.13 capaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Tegal guna melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan SAKIP, perbaikan tersebut dilakukan baik pada level Pemerintah Kabupaten maupun level Perangkat Daerah.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan yaitu :

- a. Melakukan Perubahan RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
- b. Memperbaiki kualitas tujuan, sasaran strategis dan indikator yang berorientasi pada hasil serta indikator maupun formulasi indikator memenuhi kriteria SMART.
- c. Penguatan kepada perangkat daerah dalam penyusunan laporan kinerja guna lebih meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis yang memadai atas pencapaian kinerja yang berorientasi hasil dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta memastikan agar pimpinan OPD memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

- d. Mengembangkan aplikasi SAKIP secara terintegrasi mulai dari e-planning, e-budgedting dan e-SAKIP sehingga tercipta system informasi yang terintegrasi serta dimanfaatkan secara maksimal sarana monitoring evaluasi kinerja secara bulanan atau triwulanan dan menjamin keandalan, akurasi pengumpulan data kinerja guna mendukung budaya kinerja organisasi di berbagai level.
- e. Meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kabupaten Tegal.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- d. Program Perekonomian dan Pembangunan
- e. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- f. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja meningkatnya kualitas manajemen kinerja sebesar Rp. 24.988.269.488,- dari anggaran Rp. 27.746.600.190,- atau 90,05% dengan capaian indikator kinerja sebesar 92,53% dan dana yang digunakan sebesar 90,05% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,95% serta tingkat efektifitasnya belum efektif.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung capaian kinerja sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP

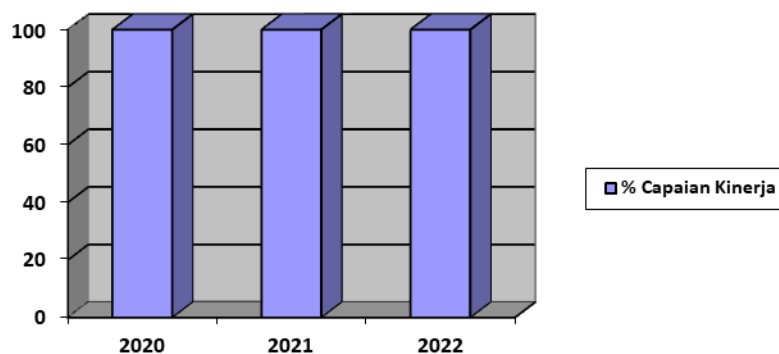
Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 100 % atau dengan kategori Sangat Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk mewujudkan akuntabilitas di bidang keuangan dan aset daerah. Untuk realisasi opini BPK tahun 2022 (n-1) berkategori Wajar Tanpa Pengecualian sudah tercapai target akhir RPJMD. Hal yang sama juga dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dengan hasil WTP, hal ini bahwa laporan keuangan di Kabupaten Tegal telah memenuhi standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berikut ini perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah :

Tabel 3.15
Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

Gambar 3.3
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah



Permasalahan dalam pencapaian opini WTP untuk LKPD Tahun 2022 adalah Data peserta JKN PBPU-BP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal belum sepenuhnya dimutakhirkan dan diverifikasi secara tertib dan terintegrasi sehingga pada Tahun 2021 terdapat pembayaran iuran untuk peserta yang tidak berhak minimal sebesar Rp 131,04 juta dan Penatausahaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memadai antarai lain kesalahan reklasifikasi atas realisasi belanja barang dan belanja modal dana BOS Tahun 2021 sehingga penyusunan laporan keuangan Dinas Dikbud mengalami keterlambatan dan kurang akurat.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja meningkatnya pengelolaan keuangan daerah :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Program Pengelolaan Arsip
- e. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- f. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sebesar Rp. 523.475.653.260,- dari anggaran Rp. 540.493.886.100,- atau 96,85% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dan dana yang digunakan sebesar 96,85% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,15% serta tingkat efektifitas sebesar 103,25% dan dapat dikatakan efektif.

Gambar 3.4
Bupati Tegal menerima Laporan Hasil Pemeriksaan
dari perwakilan BPK



Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian daerah menetapkan satu indikator utama untuk mendukung sasaran kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen
Kepegawaian Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai; Tahunan	76,42	50,49	66,07	80,56

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 66,07% atau dengan kategori Sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian masih jauh dari target yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Indeks profesionalitas ASN terdiri atas 4 dimensi yaitu dimensi kualifikasi (pendidikan), dimensi kompetensi (pelatihan), dimensi kinerja (nilai prestasi kinerja), dan dimensi disiplin. Dari target yang direncanakan 76,42 indeks yang terealisasi adalah 50,49 dengan tingkat capaian sebesar 66,07%. Capaian ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2024 baru 62,67%. Dengan sisa

waktu 2 (dua) tahun berakhirnya RPJMD diharapkan kedepan ada inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN.

Adapun perkembangan nilai indeks profesionalitas ASN sebagai berikut :

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian
Daerah Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Profesionalitas ASN	72,12	66,78	92,59	74,24	72,36	97,46	76,42	50,49	66,07

Berdasarkan tabel 3.17 capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan. hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Tegal guna melakukan upaya perbaikan kedepan.

Pencapaian kinerja indikator sasaran indeks profesionalitas ASN sangat dipengaruhi oleh faktor adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi ASN. Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi pada dimensi kompetensi karena memiliki bobot yang sangat tinggi yaitu 40%.

Capaian tahun 2022 tidak sesuai dengan target yang direncanakan disebabkan ASN yang telah melakukan pengembangan kompetensi tidak tercatat dalam aplikasi SAPK BKN. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam memanfaatkan aplikasi SAPK BKN. BKPSDM Kabupaten Tegal sudah memintakan data pengembangan kompetensi kepada seluruh ASN melalui perangkat daerah untuk selanjutnya dilaporkan dalam aplikasi SAPK, namun sampai dengan bulan desember 2022, data yang masuk tidak maksimal.

Agar kendala-kendala tersebut tidak terulang ditahun-tahun mendatang, BKPSDM akan membangun aplikasi pengembangan kompetensi terintegrasi sehingga pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat terdatabase ditingkat pemerintah daerah selanjutnya NKPSDM dapat melaporkannya melalui aplikasi SAPK.

Hal-hal lain yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal guna meningkatkan indeks profesionalitas ASN :

1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam rangka memenuhi kewajibannya memberikan pelatihan sejumlah 20 JP (Jam Pelajaran) dalam setahun kepada PNS.
2. Seminar online telah dilaksanakan dalam 5 (lima) seri sehingga sebagian besar ASN telah mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk seminar yang merupakan salah satu indikator dalam dimensi kompetensi. Kerjasama dengan Kementerian Kominfo berupa pelatihan-pelatihan turut meningkatkan kompetensi 20 JP (Jam Pelajaran) bagi ASN.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah :

- a. Program Kepegawain Daerah
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sebesar Rp. 3.751.260.011,- dari anggaran Rp. 4.635.712.000,- atau 80,92% dengan capaian indikator kinerja sebesar 66,07% dan dengan capaian kurang dari 100% dan realisasi anggaran yang digunakan sebesar 80,92% maka tingkat efisiensi 19,08% serta tingkat efektifitasnya belum efektif.

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastuktur dasar yang berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1

(satu) indikator utama yakni Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan. Adapaun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian indikator indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan	Angka; Kumulatif	77,27	80,90	104,69%	82,12

Capaian indikator indeks infrastruktur wilayah mantap berwawasan lingkungan melebihi target realisasi tahun 2022 sebesar 80,90 dengan capaian sebesar 104,69% dari target tahun 2022 sebesar 77,27. Pada Tahun 2022 dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan mencapai keberhasilan didukung oleh 3 sasaran dengan 4 indikator yang mencapai realisasi lebih dari 100% seperti meningkatnya kualitas infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan, persentase pekerjaan umum yang mantap mendapat hasil yang baik dengan mencapai target pada tahun 2022, kemudian ada perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang layak yang mendapat hasil baik, rasio konektivitas Kabupaten Tegal yang mendapatkan nilai melebihi target akhir RPJMD 2024 dan indeks lingkungan hidup yang mendapatkan skor sedang artinya memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat.

Dalam mencapai kualitas infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan pada tahun 2022 yang sudah mencapai target 104,69% namun belum mencapai target akhir RPJMD 2024 maka perlu perbaikan dan peningkatan kinerja agar tujuan pada target akhir RPJMD 2024. Perlunya peran aktif pemerintah Kabupaten Tegal dalam menggandeng pihak swasta dan masyarakat terkait dengan infrastruktur yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan Kabupaten Tegal dalam meningkatkan infrastruktur dasar berwawasan lingkungan :

1. Penerapan prinsip-prinsip *Quality Infrastructure Investment* (QII), antara lain dengan : a) memaksimalkan dampak positif infrastruktur dalam mencapai pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan; b) meningkatkan efisiensi ekonomi dari perspektif life-cycle cost; c) mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam investasi infrastruktur; d) memperhatikan ketahanan bangunan terhadap bencana alam dan risiko lainnya; e) mengintegrasikan pertimbangan sosial dalam investasi infrastruktur; dan f) memperkuat tata kelola infrastruktur.

2. Penerapan *Green Infrastructure*

Infrastruktur Hijau merupakan konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan. Pembangunan yang dimulai pada tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga tahap pemeliharaan didesain dengan memperhatikan aspek-aspek yang mampu melindungi, menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Adapun prinsip-prinsip infrastruktur hijau meliputi, pengurangan penggunaan sumber daya (lahan, material, air, sumber daya alam dan sumber daya manusia), pengurangan tumpukan limbah, penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya, penggunaan sumber daya hasil daur ulang, perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian, mitigasi risiko keselamatan kesehatan perubahan iklim dan bencana.

3. Penerapan *Circular Economy Infrastructure*

Circular economy atau sering disebut sebagai "sirkularitas" adalah sistem ekonomi yang bertujuan meminimalkan limbah dan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin, sehingga dapat mengurangi jumlah bahan baru yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dengan memaksimalkan jumlah bahan

yang lama yang telah didaur ulang. Sirkularitas pada prinsipnya memiliki enam prinsip utama, yaitu Rethink, Refuse, Repair, Reduce, Reuse, dan Recycle (6R)

Program yang mendukung dalam capaian meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- d. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
- f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- g. Program Penyelenggaraan Jalan
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- i. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
- j. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- k. Program Penatagunaan Tanah
- l. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- m. Program Penataan Desa
- n. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- o. Program Pengembangan Perumahan
- p. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- q. Program Kawasan Permukiman
- r. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- s. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- t. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- u. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- v. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- w. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- x. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- y. Program Pengelolaan Persampahan
- z. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- aa. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- bb. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- cc. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- dd. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Anggaran yang digunakan dalam meningkatkan kualitas infrastuktur dasar yang berwawasan lingkungan sebesar Rp. 227.886.218.313,- dari anggaran sebesar 250.945.762.400,- atau sebesar 90,81%, dengan capaian kinerja sebesar 104,69% maka terdapat efisiensi sebesar 9,19% dan efektifitas sebesar 115,28% serta dapat dikatakan efektif.

Sasaran 5 : Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap

Dalam rangka meningkatkan infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 2 (dua) indikator utama yakni persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap dan persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang layak. Adapaun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap	Persen; Tahunan	78,80	82,36	104,51	83,59
2.	Persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang layak	Persen; Tahunan	76,93	76,96	100,03	79,15
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					102,27	

1. Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap

Capaian indikator persentase infrastuktu pekerjaan umum yang mantap pada tahun 2022 sebesar 82,36 atau 104,51% dari target 2022 atau dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan target akhir RPJMD

Tahun 2024 adalah 83,59 sehingga belum melampaui target akhir RPJMD.

Tabel 3.20
Capaian indikator persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1	Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap	Persen; Tahunan	78,80	82,36	104,51	83,59

Capaian pada tahun 2022 ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakannya dengan baik. Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap merupakan indikator baru yang digunakan pada tahun 2022 sehingga belum ada capaian untuk tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.21
Capai Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap
Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap	-	-	-	72,48	-	-	78,80	82,36	104,51

Adapun komponen dalam pencapaian target infrastruktur pekerjaan umum yang mantap sebagai berikut :

- a. Infrastruktur sumber daya air yang mantap

Luas daerah irigasi di Kabupaten Tegal adalah 9.281 Ha dengan panjang 276,02 km tersebar pada wilayah Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari dan Kecamatan

Bumijawa. Kondisi daerah irigasi dalam keadaan baik 168 km, sedang 43,98 km, rusak ringan 54,48 km dan rusak berat 9,50 km.

b. Infrastruktur kebinamargaan yang mantap

- ❖ Ruas jalan Kabupaten Tegal sepanjang 847,28 km, dimana kondisi mantap 716,50 km dan kondisi tidak mantap 130,78 km
- ❖ Drainase Jalan Kabupaten Tegal dari panjang jalan Kabupaten 847,28 km yang sudah berdrainase sampai dengan tahun 2022 sepanjang 490,15 km
- ❖ Jembatan yang dibangun dalam kondisi mantap sebanyak 419 unit dengan panjang 5.045,47 meter, kondisi tidak mantap sebanyak 53 unit dengan panjang 533 meter.

c. Infrastruktur keciptakarya yang mantap

- ❖ Cakupan akses layanan air minum
- ❖ Ketersediaan sarana prasarana persampahan
- ❖ Akses sanitasi/air limbah
- ❖ Bangunan Negara yang sesuai standar teknis
- ❖ Bangunan yang memiliki IMB
- ❖ Bangunan dan lingkungan yang tertata

d. Jumlah penyedia jasa konstruksi yang kompetitif

- ❖ Tenaga konstruksi yang tertata, sampai dengan tahun 2022 ada 86 personel yang mempunyai sertifikat kompetensi baik dibidang pekerjaan gedung, jalan dan irigasi

2. Persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang layak

Capaian indikator persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang layak pada tahun 2022 sebesar 76,96 atau 100,03% dari target 2022 atau dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 79,15 sehingga belum melampaui target akhir.

Capaian pada tahun 2022 ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakannya dengan baik.

Adapun yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka pencapaian target persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang layak sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, adapun lokasinya terletak di Desa Dermasuci Kec. Pangkah sebanyak 13 Unit.
- b. Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin sebanyak 16 dari keseluruhan pembangunan dan pengembangan perumahan.
- c. Penurunan luas kawasan kumuh seluas 249,88 Ha dari 487,78 Ha, melalui kolaboratif anggaran dari pusat, propinsi, kabupaten dan desa.
- d. Peningkatan penanganan RTLH di Kabupaten Tegal.
- e. Peningkatan ketersediaan prosentase PSU perumahan.
- f. Pengadaan tanah untuk perluasan tempat Pembuangan Akhir Sampah Penujah, dari 6 bidang tanah dapat diselesaikan sesuai rencana.
- g. Penanganan asset milik Pemda berupa tanah milik Pemda dari 3.153 bidang, yang sudah memiliki sertifikat sebanyak 3.151.

Indikator infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang merupakan indikator baru yang digunakan pada tahun 2022 sehingga belum bisa mengukur capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.22
Capaian infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang layak Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang layak	-	-	-	74,88	-	-	76,93	76,96	100,03

Program yang mendukung dalam capaian kinerja meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- d. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
- f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- g. Program Penyelenggaraan Jalan
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- i. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
- j. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- k. Program Penatagunaan Tanah
- l. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- m. Program Penataan Desa
- n. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- o. Program Pengembangan Perumahan
- p. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- q. Program Kawasan Permukiman
- r. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap sebesar Rp. 188.484.669.943,- dari anggaran Rp. 209.285.125.500,- atau 90,06% dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,27%, dan dengan efisiensi sebesar 9,94% serta tingkat efektifitasnya belum efektif.

Sasaran 6 : Meningkatkan Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan sistem jaringan/konektivitas perhubungan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan rasio konektivitas kabupaten sebagai indikator utama. Adapaun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen; Kumulatif	75,30	79,3	105,31	75,50

Capaian kinerja sasaran meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan dengan didukung indikator rasio konektivitas kabupaten pada tahun 2022 sebesar 79,3 atau 105,50% dari target 2022 atau dengan kategori Sangat Tinggi. Untuk realisasi rasio konektivitas kabupaten tahun 2022 sebesar 79,3 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 75,50 sehingga telah melampaui target akhir.

Rasio konektivitas kabupaten merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga belum dapat capaian pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	-	-	-	75,20	-	-	75,30	79,3	105,31

Dalam penghitungan Rasio konektivitas Kabupaten menggunakan rumusan

$$\frac{(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan Sungai, danau dan penyebrangan})}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}}$$

- ❖ IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut)
- ❖ IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyebrangan) = jumlah lintas Penyebrangan yang berpotensi pada kabupaten tsb kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada kabupaten tersebut)

Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)

- ❖ Jumlah trayek yang di layani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
 - Jumlah Trayek Angkutan Pedesaan = 16 trayek dengan 362 kendaraan
 - Jumlah Trayek Angkutan Perbatasan = 10 trayek dengan 311 kendaraan
 - Jumlah Trayek AKDP = 9 trayek dengan 193 kendaraan
 - Total Jumlah Trayek = 35
- ❖ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu
 - Jumlah Kebutuhan Trayek Angkutan Pedesaan = 21 trayek dengan 387 kendaraan
 - Jumlah Kebutuhan Trayek Angkutan Perbatasan = 14 trayek dengan 393 kendaraan
 - Jumlah Kebutuhan Trayek AKDP = 9 trayek dengan 193 kendaraan
 - Total Jumlah Kebutuhan Trayek = 21+14+9 = 44

IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut)
 $IK1 (\text{angkutan jalan}) = 35 \times 1 : 44 = 0,79$

IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyebrangan)

- ❖ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis di tambah lintasan komersil
- ❖ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan lintas penyebrangan baik lintas penyebrangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan anatar wilayah yang di rencanakan dalam kurun waktu tertentu

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal saat ini Hanya Mengurusi Trayek Lintas Penyeberangan SDP Wisata di Waduk Cacaban Tegal sehingga jumlah lintas penyeberangan sebanyak 1 dengan jumlah kapal penyeberangan sebanyak 33 Kapal

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :

- ❖ Wilayah yang tingkat angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi di bandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP =70, bobot angkutan jalan =30)
- ❖ Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
- ❖ Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan lebih rendah dibanding dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
- ❖ Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyebrangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas :

- ❖ Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- ❖ Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot =0.8
- ❖ Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot =0.5

IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyebrangan) = jumlah lintas Penyebrangan yang berpotensi pada kabupaten tsb kabupaten tsb x

bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada kabupaten tersebut)

$$IK2 (ASDP) = 1 \times 0,8 : 1 = 0,8$$

Sehingga :

Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan Sungai, danau dan penyebrangan)

$$= (0,79 \times 70) + (0,80 \times 30)$$

$$= 55,3 + 24$$

$$= 79,32$$

Capaian Rasio Konektivitas Kabupaten Dengan dibukanya Kembali Pelayaran Sungai Danau di Waduk Cacaban pada pertengahan Tahun 2022, mampu meningkatkan Indeks Konektivitas Angkutan Sungai Danau sebesar 4,02 poin, sehingga konektivitas Kabupaten Meningkat Dari 75,3 menjadi 79,32.

Dengan dibuka nya kembali pelayaran sungai di Waduk Cacaban sehingga meningkatkan frekuensi pelayaran sungai Danau dari frekuensi rendah (0,5) ke frekuensi sedang (0,8) sehingga indeks konektivitas meningkat.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja meningkatnya system jaringan/konektivitas perhubungan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja meningkatnya system jaringan / konektivitas perhubungan sebesar Rp. 12.401.004.010,- dari anggaran Rp. 13.082.310.000,- atau 94,79% dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,31%, dan anggaran yang digunakan sebesar 94,79% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,21% serta tingkat efektifitas sebesar 111,09% dan dapat dikatakan efektif.

Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai Indikator Utama. Adapaun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Kumulatif	55,33	64,27	116,16	55,83

Capaian kinerja tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan didukung indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 sebesar 64,27 atau 116,16% dari target 2022 atau dengan kategori Sangat Tinggi. Untuk realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 sebesar 64,27 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 55,83 sehingga telah melampaui target akhir.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,05	55,05	100	55,19	60,67	109,93	55,33	64,27	116,16

Tabel 3.27
Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kategori IKLH	Nilai
Sangat Baik	90-100
Baik	70-89,9
Sedang	50-69,9
Buruk	25-49,9
Sangat Buruk	0-24,9

Capaian IKLH Kabupaten Tegal tahun 2022 dengan total nilai 64,27 termasuk dalam kategori sedang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup idealnya mengindikasikan kondisi lingkungan secara garis besar dan secara cepat. Berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2022 yang memiliki angka 64,27 ini, dapat disimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kabupaten Tegal pada tahun 2022 berada dalam posisi sedang. Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Kabupaten Tegal sudah memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45 pasal 28 H ayat (1).

Strategi peningkatan IKLH di Kabupaten Tegal yaitu dengan peningkatan IKA dan IKTL. Program peningkatan nilai IKA yang cukup berhasil pada tahun 2022 akan terus ditingkatkan untuk mendorong terus nilai indeks kualitas air. Dalam upaya peningkatan IKTL perlu dilakukan strategi untuk kembali mengidentifikasi data yang belum masuk dalam perhitungan tahun ini dan melakukan peningkatan tutupan lahan yang *adaptable* dengan kondisi wilayah tanpa mengurangi /menghambat proses pembangunan yang ada. Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara dapat dilakukan dengan Program Pengembangan Transportasi Umum Ramah Lingkungan, Pengembangan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor, Pengaturan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Pelarangan Pembakaran Sampah. Meningkatkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan melalui gerakan-gerakan yang mampu mengajak masyarakat untuk dapat peduli terhadap lingkungan.

Gambar 3.5
Pemulihan Lahan Tercemar di Pesarean



Gambar 3.6
Pengambilan Sampel Kualitas Air



Program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- f. Program Pengelolaan Persampahan
- g. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- h. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- j. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- k. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup sebesar Rp. 27.000.544.360,- dari anggaran Rp. 28.578.327.400,- atau 94,47% dengan capaian indikator kinerja sebesar 116,16% dan dana yang digunakan sebesar 94,47% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,53% serta tingkat efektifitas sebesar 122,95% dan dapat dikatakan efektif.

Tujuan 3 : Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahun	3,59 – 5,20	5,14	100	4,85-5,45

Rata-rata capaian kinerja tujuan mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2022 sebesar 5,14 atau 100 % dari target tahun 2022 dengan kategori Sangat Tinggi. Untuk realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 5,14 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 4,85-5,45 sehingga belum melampaui target akhir. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan Produk

Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal untuk bisa mencapai target akhir RPJMD.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena pasca pandemi covid-19 yang melanda hingga tahun 2021 dapat teratasi.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat
Berdasarkan Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata
Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,48	-1,48	-26,64	3,2	3,72	116,25	3,59-5,20	5,14	100

Berdasarkan data Tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 5,14% bila di bandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,31% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,31% tentunya hasil ini tidak berbanding jauh. Capaian kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tentunya tak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh segenap komponen yang ada di Kabupaten Tegal sehingga roda perekonomian mulai bangkit sejak dilanda pandemi covid-19, upaya yang dilakukan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi tersebut di antaranya melalui kebijakan yang memberikan kemudahan berinvestasi dan berusaha sehingga pertumbuhan sektor industri pengolahan utamanya padat karya diharapkan akan meningkat dan lapangan kerja baru pun akan terbuka lebih luas, termasuk peluang berwirausaha di kalangan pemuda dan usaha mikro, kecil dan menengah dan peningkatan pada sektor perdagangan. Salah satu bentuk usaha yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas terkait dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi :

1. Telah dilakukan Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan, dan Fasilitasi bagi UMKM, dimana pada tahun 2022 Bupati Kabupaten Tegal mendapatkan anugrah penghargaan Kepala Daerah Inovatif oleh Suara Merdeka Network. Apresiasi ini diberikan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah yang dinilai memiliki gagasan inovatif dalam pembangunan daerah di masa pandemi. Proses seleksi dan penilaian gagasan oleh Suara Merdeka Network dilakukan sejak tahun 2021 dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kominfo Jawa Tengah. Pada tahun 2022 sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 35,67% dengan laju pertumbuhan sebesar 4,43%.
2. Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal yang merupakan sebuah program pemajuan kewirausahaan untuk mempersiapkan daerah dalam bersaing dengan daerah lain di lini kewirausahaan pemuda. Bentuk kegiatan dari program ini ialah kompetisi penstrategian berwirausaha dan juga pengembangan wirausaha. Harapannya dengan wirausaha muda pemula yang berkualitas akan menciptakan perusahaan perusahaan yang bersaing di strata atas yang tentunya membawa Kabupaten Tegal menjadi lebih baik di sisi perekonomiannya. Program kompetisi Wirausaha Pemuda (WP) 2022 yang tahun ini memasuki chapter keempat diikuti oleh 397 pemuda mengikuti program pencarian calon bos muda ini.
3. Pembangunan di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan untuk dapat memelihara kemandirian swasembada pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki keadaan gizi melalui penganeekaragaman jenis bahan pangan. Upaya yang dilakukan Kabupaten Tegal dalam mengoptimalkan sektor pertanian dengan menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Kerja sama tersebut masuk kedalam Program Kedaireka yang akan menyasar pada pengembangan desa organik di Kabupaten Tegal.

Adapun pengembangan komoditi pertanian organik focus pada tanaman pangan dan hortikultura guna menunjang keberlanjutan pertanian di Kabupaten Tegal. Program Kedaireka Pengembangan Desa Organik harus diarahkan juga untuk menjamin regenerasi petani khususnya pada petani milenial. Untuk itu perlu dilakukan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan petani muda tentang pengelolaan dan usaha pertanian organik guna menunjang regenerasi petani dalam suatu wadah komunitas pertanian organik sebagai motor penggerak pengembangan pertanian organik. Pada Tahun 2022 laju pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal sebesar 12,56% dengan laju pertumbuhan 1,66%. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2021, produksi padi yaitu 414.551 ton dan produksi padi setara beras 260.089 ton. Beberapa produktivitas tanaman palawija di Kabupaten Tegal tahun 2021 yaitu jagung tercatat 128.532 ton dan kedelai 107 ton. Secara umum, produksi beberapa jenis sayuran semusim (bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, cabe, tomat, wortel, dll) selama tahun 2019- 2021 mengalami fluktuasi. Demikian halnya dengan produksi beberapa jenis buah tahunan seperti mangga, durian, jeruk siam, pisang, pepaya, salak, rambutan, sawo dll.

4. Dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata, pada tahun 2022 Kabupaten Tegal memiliki 16 Desa Wisata dan 26 pokdarwis yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati. Menurut data BPS dalam Kabupaten Tegal dalam Angka 2023 Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan wisatawan di Kabupaten Tegal di wisata Guci sebesar 691.239. Wisatawan Guci mengalami peningkatan sebesar 63% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.30
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No	Pertumbuhan ekonomi	2022
1	Kabupaten Tegal	5,14%
2	Provinsi Jawa Tengah	5,31%
3	Nasional	5,31%

Sumber : BPS Kabupaten Tegal dalam Angka 2023

Selain itu juga pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 781,39 (Milliar rupiah). Semua aspek pada lapangan usaha industri mengalami kenaikan yang signifikan dari dua tahun sebelumnya. Perolehan terbesar dalam PDRB lapangan usaha diperoleh dari sektor industri pengolahan dan terendah pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Tabel 3.31
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tegal
(Milliar rupiah 2020- 2022)

Lapangan Usaha Industri		2020	2021	2022
(1)		(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.674,13	4.854,10	5.123,41
B	Pertambangan dan Penggalian	1.561,87	1.644,22	1.606,97
C	Industri Pengolahan	12.426,09	13.366,27	14.545,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22,19	22,81	24,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,25	13,22	13,96
F	Konstruksi	2.677,42	2.881,24	3.216,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.274,29	5.571,85	5.954,28
H	Transportasi dan Pergudangan	727,58	775,45	1.438,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.496,20	1.587,13	1.837,33
J	Informasi dan Komunikasi	1.204,87	1.288,17	1.321,89

K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	817,74	854,67	939,01
L	Real Estat	560,24	580,78	615,18
M, N	Jasa Perusahaan	147,70	152,61	167,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	732,71	730,14	763,92
P	Jasa Pendidikan	1.915,90	1.945,11	2.058,22
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	297,55	304,98	313,54
R,S,T,U	Jasa Lainnya	751,23	762,24	840,84
Produk Domestik Regional Bruto		35.299,98	37.334,99	40.781,39

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2022

Program yang mendukung dalam capaian kinerja tujuan mewujudkan perekonomian rakyat yang berbasis pertanian, industry pengolahan dan pariwisata :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- d. Program Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan
- e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- g. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- i. Program Penyuluhan Pertanian
- j. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- k. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- l. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- m. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- n. Program Pemasaran Pariwisata
- o. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- p. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- q. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- r. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- s. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- t. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- u. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- v. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
- w. Program Pengembangan UMKM

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja kinerja tujuan mewujudkan perekonomian rakyat yang berbasis pertanian, industry pengolahan dan pariwisata sebesar Rp. 17.783.796.282.000,- dari anggaran Rp. 20.914.903.450,- atau 85,02% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dan dana yang digunakan sebesar 85.02% maka terdapat efisiensi sebesar 14,98% sedangkan tingkat efektifitas belum efektif.

Sasaran 8 : Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya produktivitas di sektor pertanian mempunyai 1 (satu) indikator yakni Laju PDRB Sektor Pertanian. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.32
Capaian sasaran meningkatnya produktivitas di sektor pertanian

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahun	2,69 – 3,25	1,67	62%	2,95 - 3,35

Capaian indikator laju PDRB Sektor Pertanian belum sesuai dengan target realisasi PDRB Sektor Pertanian 2022 sebesar 2,69 – 3,25. Capaian indikator Laju PDRB Sektor Pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas di sektor pertanian hanya terealisasi sebesar 1,67 atau 62 % dari target yang ditetapkan atau dengan kategori Rendah. Pada Tahun 2022 laju pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal sebesar 12,56% dengan pertumbuhan sebesar 1,66%. Capaian indikator Laju PDRB Sektor Pertanian tahun 2022 belum melampaui target akhir RPJMD 2019-2024 untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal perlu bekerja keras mengingat target akhir RPJMD tinggal 2 tahun lagi. Indikator Laju PDRB Sektor Pertanian

merupakan indikator baru dalam RPJMD Perubahan 2019-2024 sehingga belum bisa membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan Kabupaten Tegal dalam mengoptimalkan sektor pertanian :

1. Menjalinkan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Kerja sama tersebut masuk kedalam Program Kedaireka yang akan menyasar pada pengembangan desa organik di Kabupaten Tegal.
2. Pengembangan komoditi pertanian organik fokus pada tanaman pangan dan hortikultura guna menunjang keberlanjutan pertanian di Kabupaten Tegal. Program Kedaireka Pengembangan Desa Organik akan diarahkan untuk menjamin regenerasi petani khususnya pada petani milenial.
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan petani muda tentang pengelolaan dan usaha pertanian organik guna menunjang regenerasi petani dalam suatu wadah komunitas pertanian organik sebagai motor penggerak pengembangan pertanian organik.

Sepanjang tahun 2022, produksi pertanian relatif stabil, curah hujan yang cukup membuat petani dapat menanam sepanjang tahun, namun demikian khusus untuk produksi padi memang ada penurunan, namun disisi lain produksi jagung mengalami peningkatan. Perubahan komoditas terutama pada masa tanam II yaitu bulan maret-april, dimana petani lebih banyak beralih menanam jagung, karena pada waktu itu harga jagung mengalami kenaikan dan petani biasanya untuk menambah kebutuhan air irigasi perlu upaya lain, yaitu menggunakan pompa untuk alternatif air irigasi. Penggunaan pompa untuk memenuhi air irigasi sawah tentunya menambah biaya dari sebagian besar petani. Kondisi ini perlu dipikirkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengingat Kabupaten Tegal memiliki lahan baku sawah seluas 38.961 Ha dan sampai saat ini Indeks Pertanaman

baru mencapai 1,67 artinya masih banyak lahan sawah yang masih belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Sepanjang tahun 2022, tidak banyak serangan hama yang terjadi, dan hampir semua kasus gangguan OPT dapat diatasi serta tidak menimbulkan gagal panen.

Upaya yang harus dilakukan kedepan dalam meningkatkan produktifitas sektor pertanian :

1. Memperbanyak pembangunan dam parit, terutama wilayah atas agar lahan sawah dapat ditanami minimal 2 kali dalam 1 tahun.
2. Memperbaiki jaringan irigasi baik dalam rangka menambah tampungan debit air maupun mengurangi kebocoran irigasi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Agen Pengendali Hayati untuk memperbaiki daya dukung lingkungan akibat penggunaan bahan kimia baik pupuk maupun pestisida.
4. Memperbanyak pertanian organik, baik pangan maupun hortikultura untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian sehingga produk pertanian berdaya siang tinggi di pasaran.
5. Mengembangkan kawasan pertanian terintegrasi yang ramah lingkungan.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran meningkatnya produktivitas di sektor pertanian :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengawasan Perikanan Budidaya
- c. Program Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- f. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- g. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
- h. Program Penyuluhan Pertanian
- i. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- j. Program Penangan Kerawanan Pangan
- k. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya produktivitas di sektor pertanian sebesar Rp. 10.451.781.664,- dari anggaran Rp. 11.414.872.450,- atau 91,56% dengan capaian indikator kinerja sebesar 62% dan dana yang digunakan sebesar 91,56% karena capaian belum mencapai 100% maka belum terdapat efisiensi serta belum dapat dikatakan efektif.

Sasaran 9 : Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya produktivitas di sektor industri pengolahan mempunyai 1 (satu) indikator yakni laju PDRB sektor industri.

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; Tahun	1,50-3,56	4,43	124,43	3,75 - 5,23

Capaian sasaran meningkatnya produktivitas di sektor pengolahan industri dengan indikator Laju PDRB Sektor Industri sebesar 4,43 atau 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Hasil dari capaian laju PDRB Sektor Industri sudah sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2022 (kisaran 1,50 – 3,56). Capaian ini sudah melampaui target akhir RPJMD Kabupaten Tegal.

Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19, laju PDRB pada sektor Industri sebagai sektor penyumbang angka PDRB tertinggi telah berhasil mencapai kenaikan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari capaian tahun ke tahun sejak 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri
Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Laju PDRB Sektor Industri	-	-0,46	-	1,50 - 3,56	4,28	120,22	1,50-3,56	4,43	124,43

Laju PDRB sektor Industri Pengolahan yang berhasil menunjukkan trend positif pasca pertumbuhan ekonomi melemah saat pandemi covid-19, salah satunya didukung upaya Pemerintah Kabupaten Tegal melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam mengembangkan sumber daya industri, sarana prasarana dan peran serta masyarakat dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan industri yang berdaya saing. Adapun indikator-indikator yang mendukung pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang meliputi beberapa aspek dalam menciptakan struktur ekonomi yang kukuh sebagai penggerak ekonomi daerah yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Berikut beberapa aspek pembangunan industri antara lain :

a. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan wilayah yang ditujukan untuk berkembangnya kegiatan industri harus ditunjang dengan akses infrastruktur industri dan penunjang yang disediakan pemerintah, infrastruktur tersebut meliputi jaringan energi dan listrik, sumber daya air dan pasokan bahan baku, sanitasi dan transportasi. Adapun infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pendidikan, kesehatan dan tempat pembuangan

sampah. Rencana pengembangan perwilayah industri telah dimasukkan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.

Tabel 3.35
Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tegal

No	Jenis Kawasan Peruntukan Industri	Lokasi Kecamatan
1	Industri Besar dan Menengah	
	KPI Margasari	Margasari
	KPI Pantura	Kramat, Suradadi dan Warureja
2	Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga	Kramat, Adiwerna, Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, Balapulang, Dukuhturi, Margasari dan Warureja

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa pembangunan industri tidak hanya dilakukan dengan pendekatan sektoral yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri dan berdaya saing saja, tetapi juga perlu pendekatan spasial yang dimuat dalam Rencana pengembangan perwilayah industri telah dimasukkan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.

b. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri meliputi 3 (tiga) hal yaitu pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri. Berikut pelayanan peningkatan mutu produk yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium yang merupakan bagian dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

UPTD laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian dalam rangka peningkatan daya saing daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah peningkatan kualitas (quality) mutu produk industri melalui pengujian dan pemesanan serta pelaksanaan sertifikasi pesonil dimana UPTD

Laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian sejak tahun 2008 sudah teregistrasi / terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (ISO/IEC17025;2017) LP-396 - IDN dan sejak Tahun 2017 terakreditasi/teregrestasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia (LSP-LMI) sebagai TUK Mandiri SP3 (Tempat Uji Kompetensi Personil) terverifikasi ulang nomor 002/SK-LSP-LMI/TUK-LM/X/2020 tanggal 9 oktober 2020 dengan skema Operasi mesin dan proses, Menggambar merencana dan mendisain, Fabrikasi, Quality.

Tabel. 3.36

Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2022

Kategori (Pelanggan)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Kab. Tegal	263	336	365	300	417	278
Luar Kab .Tegal	51	136	150	136	209	78
Pendidikan	97	64	110	100	60	25
Total/Tahun	411	536	625	536	686	381

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk menurun di tahun 2022 dikarenakan mesin UTM (*Universal Testing Machine*) yang merupakan satu mesin dengan 3 fungsi pengujian mengalami kerusakan dan perlu adanya perbaikan pada UPTD Laboratorium Perindustrian.

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sumber daya industri meliputi beberapa hal diantaranya sertifikasi produk dan standarisasi IKM dalam upaya meningkatkan daya saing industri daerah. Berikut data sertifikasi produk dan standarisasi IKM :

Tabel 3.37.

Sertifikasi Produk IKM di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Ikm Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	Uji Nutrisi	39	2		2019-2020

2	Uji Kadaluarsa	7			2018-2019
3	PIRT	147	-	-	2018-2022
4	Halal	40	11		2018-2021
5	Pendaftaran Merk	126	3		2015-2022
6	BKI	-	-	4	2018-2019
7	SNI			2	2018

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian kegiatan fasilitasi sertifikasi produk IKM dibiayai oleh APBD I kemudian APBD II dan APBN. Kegiatan fasilitasi yang biayai oleh APBN cenderung pada kegiatan yang lebih besar dan membutuhkan proses lebih lama daripada proses sertifikasi yang lainnya. Selain sertifikasi produk IKM juga dilakukan standarisasi IKM sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.38
Standarisasi IKM di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Standarisasi	Jumlah IKM Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	DOKUMEN MUTU	9	3		2018-2022
2	Good Manufacturing Practice (GMP)	25			2022
2	ISO 9001 : 2000			1	2008
3	ISO 9001 : 2008			1	2011
4	ISO 9001 : 2015			6	2017-2019
5	ISO 14001 : 2015		1		2019

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2022 terdapat 46 IKM yang telah mengikuti standarisasi yang dibiayai baik APBD II, APBD I maupun APBN. Standarisasi yang paling banyak diikuti oleh para IKM yaitu pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP) 25 IKM pada tahun 2022.

d. Pengendalian Izin Usaha Industri

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Industri di Kabupaten Tegal perlu dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Izin Usaha Industri, dalam penerbitan IUI perlu adanya pengendalian melalui Berita acara pemeriksaan verifikasi Teknis IUI yang mana pada Januari – Agustus 2022 Berita Acara dibuat Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal sesuai ajuan IKM yang akan memproses Izin Usahanya sehingga dapat terdata perusahaan maupun IKM mana yang mengajukan, tetapi adanya perubahan peraturan yang mana pengajuan verifikasi IUI dapat terbit otomatis melalui OSS (*Online Single Submission*) mulai Agustus 2021, sehingga ada beberapa IKM yang pengajuannya tidak dapat tercatat pada data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Untuk daftar perusahaan yang diverifikasi sesuai data yang Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39

Data Perusahaan yang telah dilaksanakan pengawasan dan verifikasi teknis atas pengajuan proses izin usaha industri (IUI)

No.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	JENIS KEGIATAN
1	Pt Aneka Makmur Garmino	Pesarean Adiwerna	Pengawasan
2	Pt Sinar Proda Mas	JL. K.H. NAKHRAWI NO. 16 RT. 017 RW. 03 Lawatan Dukuhturi	Pengawasan
3	Pt Putra Tunggal Manufaktur	LIK	Pengawasan
4	Pt Berkah Mandiri Elektrik	Jl. Flamboyan RT 07 RW 02 Desa Lemahduwur Adiwerna	Pengawasan
5	Pt Tirta Yasa	Lebaksiu Kidul Lebaksiu	Pengawasan
6	Pt Bimuda Karya Teknik	LIK	Pengawasan
7	Cv Bisma Agung Mulia	Dukuhwringin Slawi	Pengawasan
8	Cv Sukmasari Putra	Jembayat Margasari	Pengawasan
9	Pt Pandu Artha Niaga	Desa Purwahamba RT02 RW01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	Pengawasan
10	Cv Arinda Berkah Jaya	Tembok Luwung Adiwerna	Pengawasan
11	Pt Fnf Metalindo Utama	LIK	Pengawasan
12	Pt Plaza Pendidikan Indonesia	Desa/Kelurahan Lawatan, Kec. Dukuhturi	Pengawasan
13	Cv Putri Sukses Abadi	Mejasem Barat Kramat	Pengawasan

14	Pt Tegal Trans Maritim	Sidaharja Suradadi	Pengawasan
15	Pt Berkah Jabbar Raky	Suradadi Suradadi	Pengawasan
16	Mohamad Rudini	Desa Jatirawa Rt 04 Rw 05 Tarub	Pengawasan
17	Pt Bahari Logam Jaya	Kendalserut Pangkah	Pengawasan
18	Joddy Kurniawan Pratama	Jatilaba Margasari	Pengawasan
19	Rojai	Sokasari Rt 3 Rw 3 Bumijawa	Pengawasan
20	Sri Mulyati	Dawuhan Rt 19/05 Kel. Dawuhan, Kec. Talang	Pengawasan
21	Cv Artha Karya Gemilang	Jl Raya Penarukan No 8 Rt 29 Rw 05, Penarukan, Adiwerna	Pengawasan
22	Pt Sinergi Mandiri Teknikatama	Jl. Raya Dampyak Km.04 LIK Takaru Blok C05, Dampyak, Kramat	Pengawasan
23	Tholhah	Slarang :Or RT 04 RW 07 Dukuhwaru	Pengawasan
24	Moh. Fauzi	Bumijawa RT 01 RW 01	Pengawasan
25	Cv Barokah Al Atas	Jl. Masjid Baiturrahkim Bedug Kec. Pangkah	Pengawasan
26	Pt Putra Bungsu	Jl. Kh. Umar Asnawai li No 37 Desa Kebasen, Kec. Talang	Pengawasan
27	Pt Mitra Karya Tegal	Jl. Kh Hasan Khariri No 14-15 Rt 06 Rw 01, Bendasari, Dukuhturi, Kabupaten Tegal	Pengawasan
28	Pt Ade Sinar Lestari	Tonggara Kedungbanteng	Pengawasan
29	Ikm Fatah Yasin	Jl Kepudang No.62 Rt.001 Rw.001 Kel. Tembok Kidul, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Pengawasan
30	Pt Kemasan Hijau Internasional	Blubuk Dukuhwaru	Pengawasan
31	Cv Mekar Bersama	Komplek Lik Takaru Blok C60 Jl. Raya Dampyak Km. 4,	Pengawasan
32	Pt Sadiyah Cahaya Logam	Jl Raya Talang No.380, Talang, Talang, Kabupaten Tegal	Pengawasan
33	Pt. Berkah Jaladara Teknik	Lingkungan Industri Kecil (Lik) Blok C Nomor 58, Dampyak, Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52181, Telp. 081902714908, Jawa Tengah	Pengawasan
34	Mohamad Saiful Amal	Bengle Talang	Pengawasan
35	Pt Putra Tunggal Manufaktur	Lik	Pengawasan
36	Cv Almas	Desa Pekauman Kulon Rt 04 Rw 02 Kecamatan Dukuhturi Kab. Tegal	Verifikasi
37	Pt. Anak Muda Gemar Udud	DESA Brekatdesa/Kelurahan Brekat, Kec. Tarub, Kab. Tegal,	Verifikasi
38	Pt Pandu Artha Niaga	Desa Purwahamba Rt02 Rw01 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	Verifikasi
39	Cv 2 Saudara	Mejasem Kabupaten Tegal	Verifikasi

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2022

Pelaksanaan penerbitan berita acara verifikasi teknis IUI oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dimulai pada Tahun

2020-2022, ada 39 dokumen yang telah diterbitkan dari 39 Perusahaan/IKM yang mengajukan melalui Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

e. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pengelolaan sistem Informasi Industri Nasional bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industry yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengaturan, pembinaan dan pengembangan industry yang dapat diakses oleh masyarakat. Berikut data perusahaan yang telah terdaftar dalam SiiNas.

Tabel 3.40
Perusahaan SIINas dan IUI

No.	Uraian	Jumlah IKM	Keterangan
1.	Perusahaan yang sudah memiliki akun SIINas	125	Pelaporan rutin berkala masih belum optimal
2.	Perusahaan yang sudah mengajukan Permohonan Verifikasi Teknis IUI	39	Perusahaan yang terdata hanya yang melakukan pengajuan verifikasi melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

Dari jumlah perusahaan yang dibina oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal terdapat 125 perusahaan yang telah memiliki akun SiiNas dan 39 perusahaan yang telah mengajukan permohonan verifikasi teknis IUI dan terbit dokumen berita acaranya.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran meningkatnya produktivitas di sector industry pengolahan :

- Program Perencanaan dan Pengembangan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya produktivitas di sektor industri pengolahan sebesar Rp. 768.667.126,- dari anggaran Rp. 934.700.000,- atau 82,23% dengan capaian indikator kinerja sebesar 124,43% dan dana yang digunakan

sebesar 82,23% maka terdapat efisiensi sebesar 17,77 sedangkan tingkat efektifitas belum efektif.

Sasaran 10 : Meningkatnya Produktivitas Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya produktivitas di sektor pariwisata mempunyai 1 (satu) indikator yakni Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.41

Capaian sasaran meningkatnya produktivitas di sektor pariwisata

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Persen; Tahun	1,99	4,50	226,13%	2,25

Capaian sasaran meningkatnya produktivitas pariwisata dengan indikator rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten sebesar 4,50 atau 226% dengan kategori Sangat Tinggi. Hasil dari capaian rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD kabupaten telah melampaui target pada tahun 2022 sebesar 1,99. Hasil ini masuk pada kategori capaian sangat tinggi dan sudah melampaui target akhir RPJMD 2024. Capaian ini di dapat pasca pandemi covid 19 dan dibukanya kembali destinasi wisata baru Museum Semedo dan Obyek Wisata Cacaban mulai Oktober 2022. Dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata, pada tahun 2022 Kabupaten Tegal memiliki 16 Desa Wisata dan 26 pokdarwis yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati. Menurut BPS dalam Kabupaten Tegal dalam Angka 2023 Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan wisatawan di Kabupaten Tegal di wisata Guci sebesar 691.239 wisatawan. Hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 63% dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata merupakan hasil dari kerja keras seluruh elemen Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 Kabupaten Tegal

meresmikan wisata Waduk Cacaban setelah di renovasi. Proyek renovasi ini merupakan kerja sama dengan Kementerian PUPR dengan dana kurang lebih 40 M dengan bantuan pinjaman dari Bank Dunia. proyek remedial bendungan Waduk Cacaban ini sangat menguntungkan dan membawa berkah serta manfaat bagi masyarakat petani dan pelaku usaha pariwisata, khususnya warga sekitar waduk yang mencari nafkah dan menggantungkan usahanya dari keberadaan Waduk Cacaban.

Dalam mengapresiasi keberhasilan para pelaku wisata, Kabupaten Tegal mengadakan Award Penghargaan bagi Kelompok Sadar Wisata / Desa Wisata yang berprestasi dalam pembangunan, pengembangan dan pembinaan sektor Kapariwisata di Kab. Tegal melalui Program Citra Positif Pariwisata (CIPTA) Award Tahun 2022, Deswita Cempaka lebih Unggul dari Deswita Rembul yang meraih juara II dan Desawita Sigedong Juara III. penyerahan langsung oleh kepala Dinas Porapar di Gedung Dadali.

Hal-hal yang menjadi kunci keberhasilan Kabupaten Tegal dalam mencapai sasaran meningkatnya produktivitas pariwisata dengan indikator rasio PAD sektor pariwisata sebagai berikut :

1. Penggunaan etiketing retribusi secara konsisten dengan tambahan fasilitas *cashless payment* (non tunai) di Wisata Unggulan.
2. Penjagaan pintu terobosan (depok dan mentik) secara ketat
3. Layanan kolam air panas pancuran 5 di Wisata Guci tanpa pungutan.
4. Fasilitas Wahana wisata pasca renovasi di Wisata Waduk Cacaban dan Guci lebih variatif.
5. Pemanfaatan aset milik pemerintah lebih optimal dan berdaya guna.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran meningkatnya produktivitas di sektor pariwisata :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya produktivitas di sektor pariwisata sebesar Rp. 2.905.544.368,- dari anggaran Rp. 4.874.832.000,- atau 59,60% dengan capaian indikator kinerja sebesar 226,13% dan dana yang digunakan sebesar 59,6% maka walaupun capaian indikatornya melebihi 100% namun capaian anggaran hanya 59,6% berarti merupakan SiLPA.

Sasaran 11 : Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya produktivitas di sektor perdagangan mempunyai 1 (satu) indikator yakni laju PDRB Sektor Perdagangan.

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahun	2,56-3,92	2,62	100%	4,50-5,65

Capaian sasaran meningkatnya produktivitas di sektor perdagangan dengan indikator Laju PDRB Sektor Perdagangan sebesar 2,62 atau 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Hasil dari capaian laju PDRB Sektor Perdagangan sudah sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2022 (kisaran 2,56 % - 3,92 %). Namun capaian ini belum melampaui target akhir RPJMD Kabupaten Tegal.

Strategi yang telah dilaksanakan untuk mencapai Laju PDRB Sektor Perdagangan :

1. Meningkatkan Pembinaan Pedagang agar tertib Niaga
2. Melakukan Pemantauan Harga dan Stok Bapokting agar inflasi dapat dikendalikan
3. Dalam hal penyediaan Sarana Perdagangan yang layak, pada tahun 2022 telah dilakukan rehab/ pemeliharaan Pasar sebanyak 4 Pasar

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan
Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Laju PDRB Sektor Perdagangan	-	-4,20	-	2,56	4,07	158,98	2,56 - 3,92	2,62	100

Capaian indikator laju PDRB Sektor perdagangan dari tahun 2020-2022 mengalami naik turun. Pada tahun 2021 capaiannya 4,07 sedangkan tahun 2022 capaiannya 2,62.

Kendala yang dihadapi dalam penyediaan Sarana Perdagangan yang layak, diantaranya faktor cuaca ekstrem dan bencana alam yang menimpa beberapa pasar. Kendala lainnya dalam pelaksanaan Strategi dalam Program dan Kegiatan pada tahun 2022 adalah faktor perubahan regulasi yang sangat dinamis dari Pemerintah Pusat, yang sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2022.

Strategi kedepan yang akan dilaksanakan untuk peningkatan capaian laju PDRB sektor perdagangan :

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh *stakeholder* pendukung terkait baik internal Pemkab Tegal maupun Pihak Eksternal.
2. Komitmen untuk meningkatkan Indeks Kinerja pada sektor Perdagangan akan terus dilakukan dengan strategi Pemantauan harga untuk capaian Koefisien variasi harga antar waktu.
3. Strategi untuk Peningkatan laju ekspor, dan terciptanya sarana Pasar Rakyat yang nyaman.
4. Dukungan dari Urusan Koperasi dan UMKM untuk peningkatan Indeks Kinerja pada sektor jasa keuangan melalui peningkatan Koperasi Modern dan UMKM naik Kelas juga akan terus dilakukan.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan :

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- d. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- e. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- f. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- g. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
- h. Program Pengembangan UMKM

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja meningkatnya produktivitas di sektor perdagangan sebesar Rp. 3.657.803.124,- dari anggaran Rp. 3.690.499.000,- atau 99,11% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dan dana yang digunakan sebesar 99,11% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,89% serta tingkat efektifitas sebesar 100,89% dan dapat dikatakan efektif.

Tujuan 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 2 (dua) indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.44
Capaian mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	69,43	69,53	100,14	70,83
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	87,03	87,53	100,57	87,21
Rata-rata Capaian					100,35	

Rata-rata capaian kinerja tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2022 sebesar 100,35% atau dengan kategori Sangat Tinggi.

1. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk realisasi Nilai IPM Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 69,53 telah melampaui target 2022 sebesar 69,43 sehingga capaian tahun 2022 terhadap capaian target akhir RPJMD adalah sebesar 98%.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan IPM Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan Program – Program Pembangunan Pemerintah pada sektor kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan sampai dengan kecukupan gizi, sektor lingkungan dan pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan. didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya dan merupakan masa peralihan akibat Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 3,1 persen dibanding tahun 2021.

Dari sisi kesehatan, bayi di Kabupaten Tegal yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan dapat hidup hingga 71,85 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Tegal menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Brebes yang mencapai harapan hidup 69,74.

Dari sisi pendidikan, anak-anak di Kabupaten Tegal yang berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,91 tahun atau hampir setara dengan lamanya

waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 7,25 Tahun dari tahun sebelumnya 6,99 Tahun.

Perkembangan IPM Kabupaten Tegal dari tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.45
Perbandingan IPM Tegal dengan Kab/Kota Sekitar

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA			
Wilayah	2020	2021	2022
Nasional	71,94	72,29	72,91
Jawa Tengah	71,87	72,16	72,79
Kabupaten Tegal	68,39	68,79	69,53
Kab. Brebes	66,11	66,32	67,03
Kota Tegal	75,07	75,52	76,15
Kab. Pemalang	66,32	66,56	67,19

Tabel 3.46
IPM Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
IPM :	67,33	68,24	68,39	68,79	69,53
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,28	71,40	71,60	71,72	71,85
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,34	12,58	12,67	12,89	12,91
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,70	6,86	6,98	6,99	7,25
Pengeluaran (Ribu Rupiah/ orang/tahun)	9.433	9.798	9.612	9.700	10.020

Realisasi Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 telah memenuhi target namun jika dibandingkan dengan IPM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar Kabupaten Tegal, IPM Kabupaten Tegal tergolong rendah walaupun masih lebih baik dari pada Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang.

Permasalahan/penghambat yang dihadapi

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan pola hidup sehat
2. Kurang optimalnya pelayanan kesehatan pada tingkat terendah di desa
3. Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal yang sebagian masih di bawah kemiskinan

Strategi untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia

1. Melaksanakan kampanye pentingnya pola hidup sehat pada masyarakat
2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dengan pelayanan terpadu
3. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang berdampak langsung secara maksimal

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Berdasarkan data Tahun 2022, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tegal sebesar 87,53% menduduki peringkat kelima dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Indeks Pembangunan Gender paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (86,49) sedangkan Indeks Pembangunan Gender yang paling tinggi adalah Kota Pekalongan (95,42). Capaian kenaikan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tegal tentunya tak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh segenap komponen yang ada di Kabupaten Tegal sehingga indeks pembangunan gender juga meningkat, upaya yang dilakukan untuk merealisasikan target IPG di antaranya melalui kebijakan yang memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan, kesehatan serta kesempatan untuk memperoleh standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita. Beberapa upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas terkait dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender :

- a. Telah dilakukan Program Yuh Sekolah Maning dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan guna mengurangi jumlah anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah dari keluarga kurang mampu

- b. Pelaksanaan kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular di POSBINDU PTM yang tersebar di 281 desa dan di faskes dengan kegiatan PANDU PTM serta kegiatan PROLANIS sebagai upaya untuk pelayanan preventif dan kuratif pada pasien dengan *Hipertensi* dan *Diabetes Melitus*.
- c. Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) untuk meningkatkan motivasi dan kapasitas perempuan sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pelatihan ini dilaksanakan bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah berupa pelatihan pembuatan Eggs Roll Singkong dan Stick Cheese Jagung di Desa Kambangan Kecamatan Lebaksiu.

Tabel 3.47
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan
Pekalongan Tahun 2022

No	Kab/Kota	2022
1	Kota Pekalongan	95,42
2	Kota Tegal	93,26
3	Pekalongan	92,56
4	Batang	91,86
5	Tegal	87,53
6	Brebes	86,65
7	Pemalang	86,49

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Tabel 3.48
Komponen Pembentuk Indikator Pembangunan Gender Kabupaten Tegal
Tahun 2020 - 2022

Rincian IPG dan Komponennya	Laki-laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (UHH)	69,68	69,83	69,83	73,47	73,61	73,61
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,23	13,24	13,24	12,32	12,59	12,59
Rata-rata Lama Sekolah	7,60	7,61	7,61	6,32	6,48	6,48

Rincian IPG dan Komponennya	Laki-laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(RLS)						
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	14.465	14.548	14.548	7.461	7.550	7.550

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar 3.7
Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender



Program yang mendukung dalam capaian kinerja mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas :

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kurikulum
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Pembinaan Perpustakaan
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Program Perlindungan Anak
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebesar Rp. 310.667.091.706,- dari anggaran Rp. 460.564.601.194,- atau 94,47% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,35% dan dana yang digunakan sebesar

94,47% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,53% serta tingkat efektifitas sebesar 106,22% dan dapat dikatakan efektif.

Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu Indikator Utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.49

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	0,556	0,5958	107,16	0,560

Capaian Indeks Pendidikan di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 0,5958 atau 107,16% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian ini merupakan data tahun 2018 dikarenakan Indeks Pendidikan merupakan indikator baru sehingga belum dapat menyajikan capaiannya. Adapun beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan terdiri dari capaian rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah. Indeks pendidikan secara umum ditelusuri dari 2 indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf yang diamati dari penyebab langsung, penyebab tak langsung, dan penyebab mendasar.

Pendidikan yang semakin tinggi merupakan cerminan kualitas manusia yang secara langsung dapat memberikan peluang kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah khususnya pembangunan sumberdaya manusia melalui dimensi pengetahuan menjadi salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan

harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks Pendidikan mempresentasikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7-24 tahun karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Rata-rata lama sekolah didefinisikan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Cakupan penduduk yang dihitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk usia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Adapun capaian indikator kinerja rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.50
Capaian Indikator Kinerja Pendukung
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,03	7,25	103,13	7,07
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,73	12,91	101,41	12,79
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					102,27	

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2022 tercapai sebesar 102,27 % atau dengan kategori Capaian Sangat Tinggi.

Capaian Indikator Kinerja rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 adalah 7,25 dan bila dibandingkan target yang telah ditentukan pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2024 sebesar 7,07 sehingga memperoleh prosentase capaian 102,55% dengan kategori sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan tingkat kemajuan untuk rata-rata lama sekolah dapat tercapai;

Demikian pula capaian realisasi Indikator Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 di angka 12,91 telah memenuhi target capaian yaitu dari angka yang ditargetkan sebesar 12,79 pada akhir periode di tahun 2024 mencapai target 100,94% dengan kategori sangat tinggi;

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, rata-rata capaian indikator pendukung sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat Kabupaten Tegal sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan karena salah satu penyebabnya adalah pandemic Covid-19 yang saat ini sudah memasuki masa pemulihan.

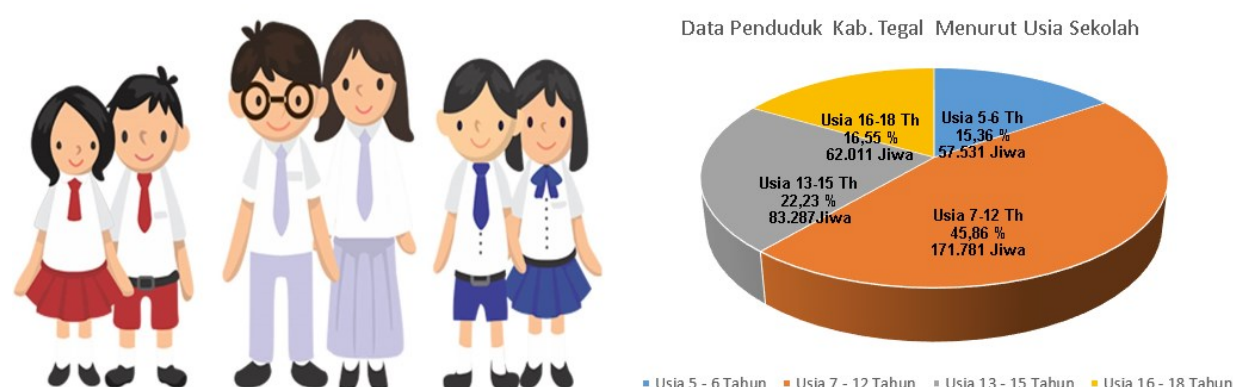
Tabel 3.51
Perbandingan Capaian Kinerja Pendukung
Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat
Tahun 2020 s.d. 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	% Capaian 2021	% Capaian 2020
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,03	7,25	103,13	103,25	103,41
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,73	12,91	101,41	103,95	102,43
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					102,27	103,60	102,92

Angka capaian di atas terlihat mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, hal ini karena angka yang ditargetkan pada tahun 2022 ini mengalami perubahan lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Dan jika dilihat dari angka realisasi

tahun 2022 ini pada dasarnya penduduk di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan sampai dengan kelas 7 (SMP kelas 1) karena mencapai nilai 7,25. Sedangkan untuk harapan lama sekolah dengan realisasi capaian 12,91 itu menunjukkan lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu (7 tahun keatas) di masa mendatang adalah selama 12,91 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Lulus SLTA.

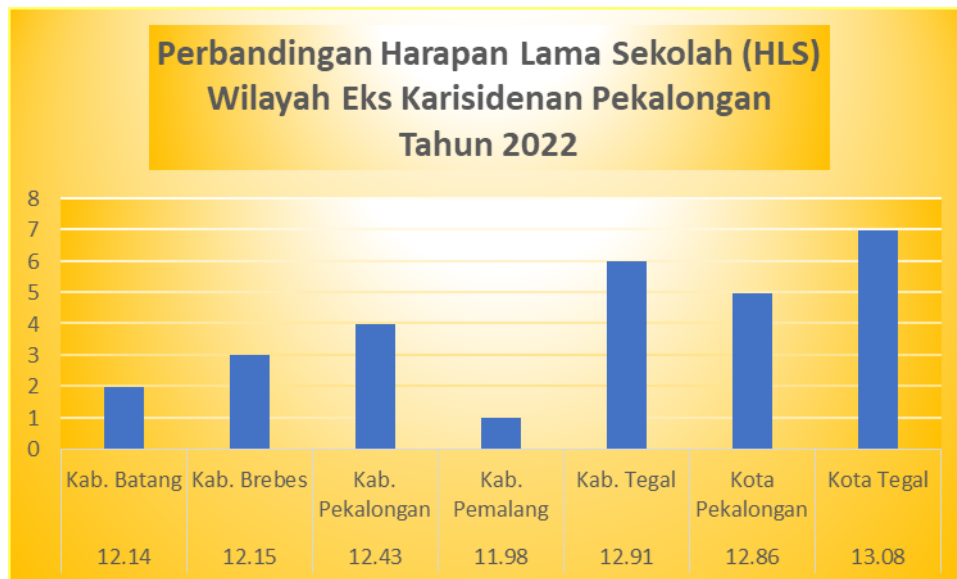
Gambar 3.8
Penduduk menurut kelompok usia sekolah



Sumber : Dukcapil Kab. Tegal (Semester 1 Th. 2022)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah 12,91 tahun yang berarti masih menduduki peringkat kedua tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (11,98 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13,08 tahun).

Gambar 3.9
Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan



Dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan, yang didukung dengan upaya Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas terkait yang terus berusaha meningkatkan Indeks Pendidikan dengan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di antaranya dengan :

- penyediaan dan pemenuhan Sarana dan Prasarana yang memadai dalam bidang pendidikan baik untuk satuan pendidikan di tingkat di tingkat SD, SMP, PAUD maupun Pendidikan Kesetaraan;
- menyediakan biaya personil peserta didik bagi siswa SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan sebagai upaya Penuntasan Anak Putus Sekolah terutama bagi mereka yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar dan belum tercover dalam bantuan pendidikan lainnya; Menyediakan Dana BOS bagi SD dan SMP, dan BOP bagi PAUD dan Pendidikan Kesetaraan baik formal maupun informal;

- Penataan Pendistribusian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di tingkat SD, SMP, PAUD maupun Pendidikan Kesetaraan;
- Penyelenggaraan Bintek Penguatan kompetensi, Workshop, ataupun pelatihan bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik di tingkat SD, SMP, PAUD maupun Pendidikan Kesetaraan;
- Upaya peningkatan kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Kesetaraan;

Gambar 3.10

Pemberian Bantuan Personil Peserta Didik Bagi Siswa Sekolah Dasar Berupa Tas, Seragam, dan Perlengkapan Sekolah



Gambar 3.11

Pemberian Bantuan Personil Peserta Didik Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama Berupa Tas, Seragam, dan Perlengkapan Sekolah



Gambar 3.12

Pemberian Bantuan Personil Peserta Didik di Tingkat Pendidikan Kesetaraan Bantuan berupa Perlengkapan Sekolah, Seragam, dan Uang Saku



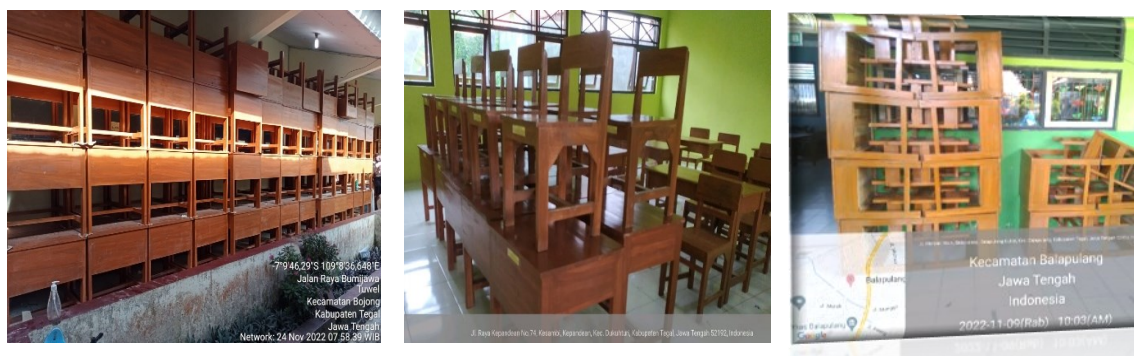
Gambar 3.13
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Bantuan Alat Peraga IPA Fisika Tahun 2022 Bagi Sekolah Menengah Pertama



Gambar 3.14
Bantuan Alat Peraga IPA Biologi Tahun 2022 Bagi Sekolah Menengah Pertama



Gambar 3.15
Pengadaan Meubeler Sekolah



Gambar 3.16
Rehab Sarana Prasarana Sekolah



Program yang mendukung dalam capaian kinerja meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pengembangan Kurikulum
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Program Pembinaan Perpustakaan

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat sebesar Rp. 288.363.650.239,- dari anggaran Rp. 314.177.030.500,- atau 91,78% dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,16 dan dana yang digunakan sebesar 91,78% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,22% serta tingkat efektifitas sebesar 116,75% dan dapat dikatakan efektif.

Sasaran 13 : Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

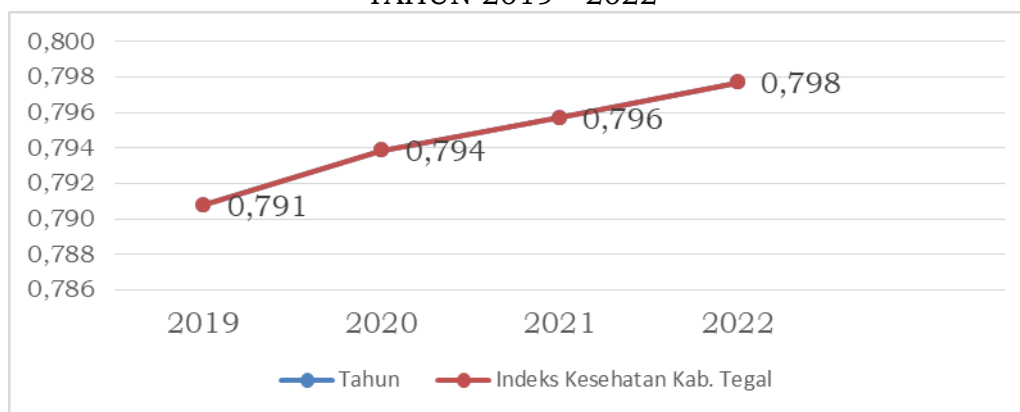
Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.52
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Kesehatan	Point, tahunan	0,801	0,798	99,59	0,804

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan dengan didukung 1 (satu) indikator (indeks kesehatan) pada tahun 2022 sebesar 99,59 % atau dengan kategori Tinggi. Capaian tersebut menurun dari tahun 2021 sebesar 100,46%. Untuk realisasi Indeks kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 0,798 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 0,804 sehingga belum mencapai target akhir. Indeks Kesehatan Kabupaten Tegal dalam empat tahun terakhir tergambar pada grafik berikut.

Gambar 3.17
GRAFIK ANGKA HARAPAN HIDUP KAB. TEGAL
TAHUN 2019 - 2022



Sumber Data: BPS Kabupaten Tegal, 2022

Indeks kesehatan merupakan salah satu komponen dalam menghitung indeks pembangunan manusia (IPM) metode baru. Secara umum, IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Indeks kesehatan dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, sehingga digunakan sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. Angka harapan hidup saat lahir dapat didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Maka diperlukan kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa peduli pada peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Tegal. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Terus meningkatnya nilai UHH Kabupaten Tegal hingga tahun 2022 menunjukkan indikasi perbaikan pembangunan bidang kesehatan.

Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang. Namun, kesehatan seringkali menjadi hilir (dampak) dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Padahal, kesehatan merupakan modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam hidup. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) gaya hidup (life style); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang.

Peningkatan usia harapan hidup penduduk pada saat lahir di suatu wilayah menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin membaik. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, kesadaran yang tinggi, kemauan yang keras dan kemampuan hidup sehat.

Indikator yang dapat menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA), serta peningkatan capaian pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

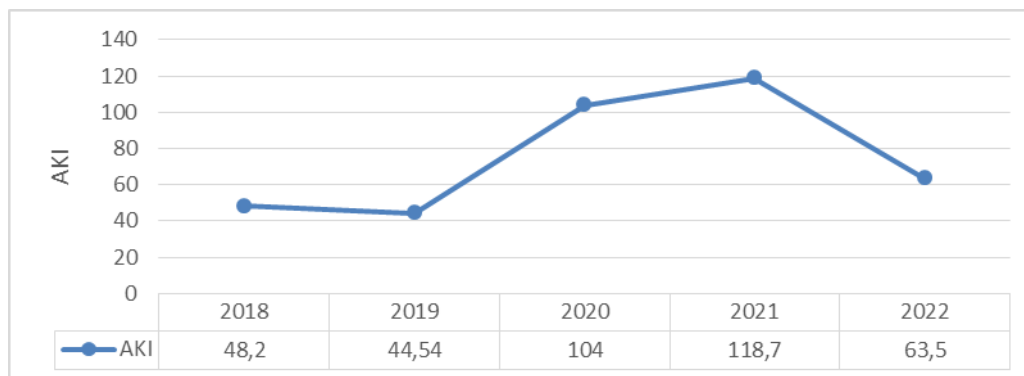
Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya keras untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI). AKI dapat menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Angka kematian ibu dari setiap 100.000 kelahiran hidup, di Kabupaten Tegal meningkat sejak pandemi Covid-19, dari 12 kasus pada tahun 2019, meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2021. Penyebab kasus kematian ibu pada tahun 2021 sebagian besar karena terinfeksi virus covid 19, dari 30 kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021, sebanyak 14 kasus (46,67%) karena terkonfirmasi Covid 19. Angka kematian ibu mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 63,5 (15 kasus). Penurunan angka kematian ibu ini selaras dengan keberhasilan pemerintah dalam upaya penurunan kasus covid-19. Pada tahun 2022 pelayanan kesehatan ibu dan anak mulai membaik sehingga angka kematian ibu dapat ditekan.

Gambaran kecenderungan AKI dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.18
ANGKA KEMATIAN IBU DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2018 – 2022



Sumber: Bidang Kesehatan UKM dan UKP, 2022

AKI tersebut sudah memenuhi target Indikator RPJMN sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. AKI Kabupaten Tegal masih jauh dari target yang diharapkan yaitu 60 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 12 kasus kematian pada tahun 2024.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah kematian ibu, terutama pada masa pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 antara lain Posyandu tetap dilaksanakan pada daerah zona hijau dengan protocol kesehatan dan menerapkan sistem shifting sasaran serta pelaksanaan dilaksanakan di ruang terbuka, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas, Pengadaan alat desinfektan, Pelaksanaan rapid test dan PCR, Merubah alur pelayanan di Puskesmas khususnya di PONEC dan Mampu Persalinan, Melakukan skrining semua ibu hamil dengan rapid test dan swab 10 hari sebelum HPL (Hari Perkiraan Lahir), Merujuk ibu bersalin dengan hasil rapid test reaktif atau tes PCR positif, Penambahan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit, PONEC tetap menyediakan APD lengkap untuk menangani ibu bersalin dengan rapid test reaktif atau tes PCR positif, dan terus mensosialisasikan 5 M pada masyarakat.

Selain hal hal tersebut upaya lain yang sudah dilakukan diantaranya menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan

kesehatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan PONED, Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohort.

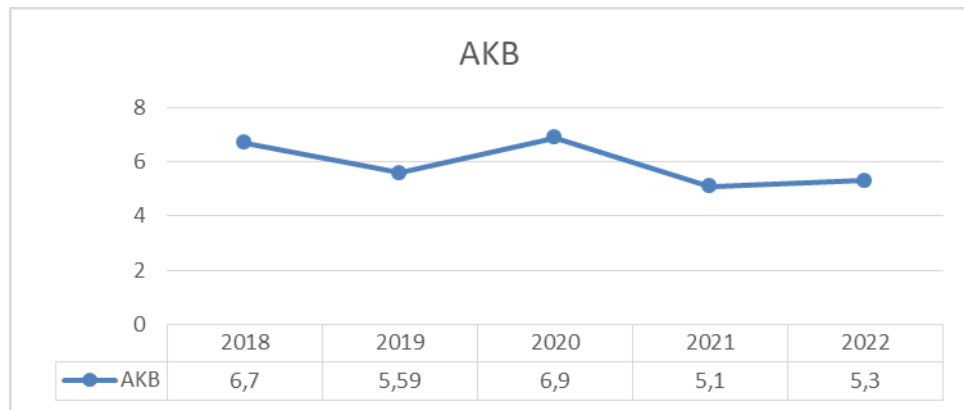
Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti call center penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), data ibu hamil terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan ibu dan anak (SIKIA), puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, pemberian TTD (Tablet Tambah Darah), Pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, Pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Bumil, kerja sama lintas sektor tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (tomas), sekolah, Perangkat Daerah lain), melanjutkan pelaksanaan program gubernur Jawa Tengah 5NG (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng).

Angka Kematian Bayi (AKB) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tegal dalam kurun lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Angka kematian bayi dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018 sampai tahun ke tahun 2022 cenderung mengalami penurunan dari 6,7 pada tahun 2018 menjadi 5,59 pada tahun 2019. AKB kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,9 hal ini terjadi sebagai akibat pandemi Covid-19 yang membatasi upaya pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. AKB pada tahun 2021 menurun menjadi sebesar 5,1 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022

menjadi 5,3 pada tahun 2022. Angka ini lebih rendah dari AKB tahun 2020 yaitu sebesar 6,9 per 1000 kelahiran hidup. Secara rinci AKB di Kabupaten Tegal dalam kurun lima tahun adalah sebagai berikut:

Gambar 3.19
ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 – 2022



Sumber: Bidang UKM dan UKP, 2022

Penyebab kematian bayi paling umum di Kabupaten Tegal adalah karena asfiksia (kondisi saat bayi kekurangan oksigen sebelum atau selama kelahiran), infeksi (sepsis, pneumonia, tetanus, diare), dan berat badan lahir rendah. Dinas Kesehatan Kab. Tegal telah berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan pada bayi secara optimal, terutama pada masa pandemic Covid 19.

Upaya yang sudah dilakukan yaitu mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), mengadakan rumah tunggu kelahiran, Konseling Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemasangan alat kontrasepsi Pasca Persalinan, Penyediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), konseling ASI Eksklusif, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, Pengadaan alkes, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, kerja sama lintas sektor (tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, OPD lain), Pelatihan Kader Motivator ASI.

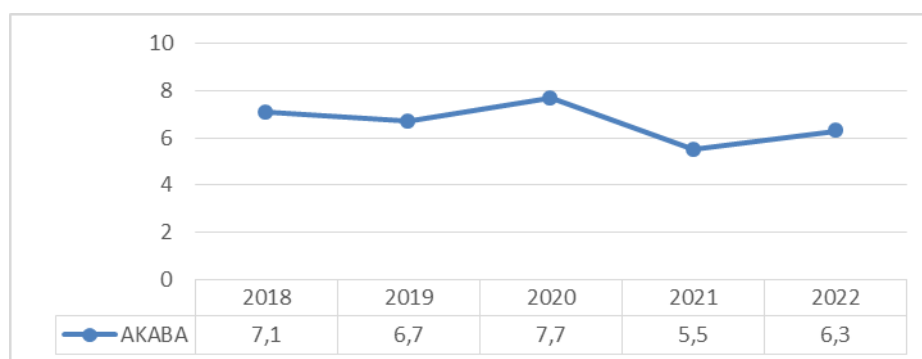
Dengan upaya yang dilakukan mulai dari *screening* oleh bidan dokter dan dokter spesialis serta pemantauan ibu hamil risti melalui program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di mana semua ibu hamil risiko tinggi (risti) dipantau. Selain itu dengan klarifikasi dan Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kematian menjadi pembelajaran dalam penanganan ibu hamil risti.

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKABA dapat pula menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/ Posyandu, dan kondisi sanitasi lingkungan.

AKB dan AKABA pada kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung naik disebabkan karena kasus BBLR dan asfiksia di Kabupaten Tegal masih cukup banyak. BBLR dan asfiksia menjadi penyumbang kematian terbanyak. Hal ini disebabkan karena riwayat kehamilan ibu yang mengidap Kurang energi Kronis (KEK) atau proses persalinan tidak normal. Perlu intervensi terhadap ibu hamil KEK dengan pemberian PMT ibu hamil, untuk petugas perlu update skill penanganan BBLR dan asfiksia.

Angka kematian balita di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan tren fluktuatif. AKABA di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 6,3 per 1000 kelahiran hidup, cenderung meningkat jika dibandingkan AKABA pada 2021 yaitu sebesar 5,5 per 1.000 kelahiran hidup. Kecenderungan AKABA di Kabupaten Tegal dalam waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.20
ANGKA KEMATIAN BALITA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2017-2021



Sumber: Bidang UKM dan UKP, 2022

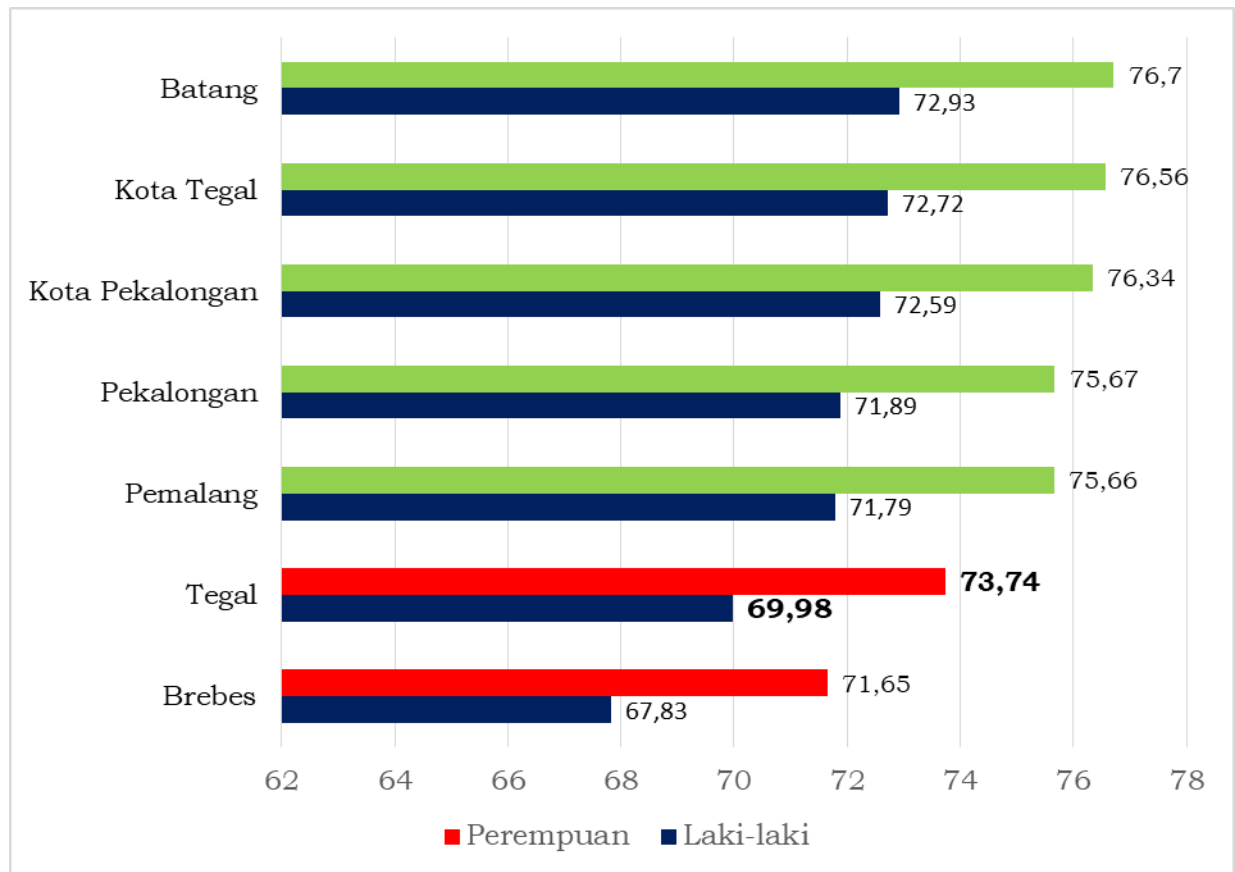
Penyebab kematian balita antara lain infeksi pernafasan, komplikasi bayi prematur, diare, asfiksia, sepsis, cacat bawaan lahir, meningitis, dan kekurangan zat besi. Permasalahan yang terjadi selama tahun 2022, adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu balita terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya serta kebijakan pembatasan kontak langsung dengan balita saat pelayanan kesehatan.

AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2022 angkanya menunjukkan 71,85 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun tahun sebelumnya, yaitu 71,74 tahun pada tahun 2021. Tingginya AHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi AHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, AHH Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah 71,85 tahun masih menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Angka Harapan Hidup (AHH) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (67,33 tahun) sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (74,69 tahun). Gambaran AHH di Eks

Karesidenan Pekalongan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.21
Perbandingan Angka Harapan Hidup di Eks Karesidenan Pekalongan



Sumber : BPS, 2022

Program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat sebesar Rp. 116.552.228.826,- dari anggaran Rp. 129.185.423.694,- atau 90,22% dengan capaian indikator kinerja sebesar 99,59% dan dana yang digunakan sebesar 90,22%, karena capaian kinerja belum mencapai

100% maka belum terdapat efisiensi anggaran dan belum bisa dikatakan efektif.

Sasaran 14 : Meningkatnya Produktivitas Pemuda

Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas pemuda di Kabupaten Tegal, maka Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator yaitu wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis. Adapun realisasi capaian sasaran dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.53
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pemuda

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	400	397	99,25%	500

Capaian kinerja sasaran meningkatnya produktivitas pemuda didukung 1 (satu) indikator wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis pada tahun 2022 adalah 397 orang atau sebesar 99,25% atau dengan kategori Sangat Tinggi, walaupun belum mencapai target pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2022 belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 500 orang. Untuk itu melihat target akhir yang menyisakan 2 tahun maka Pemerintah Kabupaten Tegal harus berupaya keras untuk bisa mencapai target akhir RPJMD.

Wirausaha pemuda merupakan sebuah pemajuan kewirausahaan untuk mempersiapkan daerah dalam bersaing dengan daerah lain di lini kewirausahaan pemuda. Bentuk kegiatan dari program ini adalah kompetisi penstrategian berwirausaha dan juga pengembangan wirausaha. Program ini dilakukan melalui pendampingan pemuda dalam melakukan bisnis startup atau umkm, Pembinaan dalam business maturity level dan 5 Pilar Materi Entrepreneur (Communication Skill,

Personal Development Entrepreneur, Strategy and Skill, Business Roadmap, Digitalization development).

1. Communication Skill

Kemampuan dasar komunikasi diperlukan untuk para calon pengusaha baru, para calon pengusaha baru akan mendapatkan materi tentang teknik-teknik efektif dalam berkomunikasi agar makin mahir dalam berkomunikasi.

2. Personal Development Entrepreneur

Para calon pengusaha baru akan mendapatkan materi tentang bagaimana menemukan sumber ide usaha, penyaringan ide hingga menentukan ide usaha.

3. Strategy and Skill

Para calon pengusaha baru mendapat materi teknik mengidentifikasi peluang usaha, menilai peluang usaha, strategi memilih jenis usaha yang tepat.

4. Business Roadmap

Para calon pengusaha akan mendapatkan materi penyusunan rencana usaha atau blue print usaha sebagai langkah awal acuan menjalankan usaha baru.

5. Digitalization Development

Para calon pengusaha baru akan mendapatkan materi terkait digitalisasi dalam berwirausaha.

Harapannya dengan wirausaha muda yang berkualitas akan menciptakan perusahaan-perusahaan yang bersaing di strata atas yang tentunya membawa Kabupaten Tegal menjadi lebih baik disisi perekonomian.

Wirausaha muda dimulai pada tahun 2019 hingga sekarang, dan sudah diikuti oleh para calon pengusaha muda. Dalam kurun waktu 3 tahun (2020, 2021 dan 2022) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sampai dengan saat ini telah diikuti oleh 397 orang.

Tabel 3.54
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Pemuda
Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	200	200	100	300	300	100	400	480	120

Tahun 2022 pada tahap awal dari 500 pendaftar disaring menjadi 100 besar terbaik, kemudian disaring lagi menjadi top 28 terbaik yang nantinya akan mendapat modal usaha. Program ini sekaligus bertujuan untuk mengurangi pengangguran, memulihkan ekonomi dan meningkatkan produktivitas.

Hal yang dilaksanakan dalam rangka menjaring wirausaha muda antara lain :

1. Sosialisasi yang sebelumnya berlangsung selama 2 bulan, pada tahun 2022 diperpanjang menjadi 3 bulan.
2. Pendaftar yang sebelumnya harus melampirkan ide usaha saat mendaftar, tahun 2022 bisa hanya mendaftar terlebih dahulu kemudian setelah mendapat pelatihan secara webinar setelah itu baru melampirkan ide usahanya.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran meningkatnya produktivitas pemuda :

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya produktivitas pemuda sebesar Rp. 8.289.883.787,- dari anggaran Rp. 8.569.721.000,- atau 96,73% dengan capaian indikator kinerja sebesar 120% dan dana yang digunakan sebesar 96,73% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,27% serta tingkat efektifitas sebesar 124% dan dapat dikatakan efektif.

Tujuan 5 : Menekan Laju Kemiskinan

Salah satu tujuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menunjang misi ke 4 yang tertuang dalam RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menekan laju kemiskinan, yang menetapkan satu indikator utama yaitu Persentase Penduduk Miskin, adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.55
Capaian kinerja Tujuan Menekan Laju Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,45 – 8,12	7,90	100%	5,50

Capaian kinerja tujuan dalam menekan laju kemiskinan didukung 1 (satu) indikator persentase penduduk miskin pada tahun 2022 adalah 7,90 atau sebesar 100% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**, apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 maka sudah melampaui target sebesar 8,45 – 8,12, namun apabila di bandingkan target akhir RPJMD yaitu sebesar 5,50 capaian tahun 2022 belum dapat melampaui target.

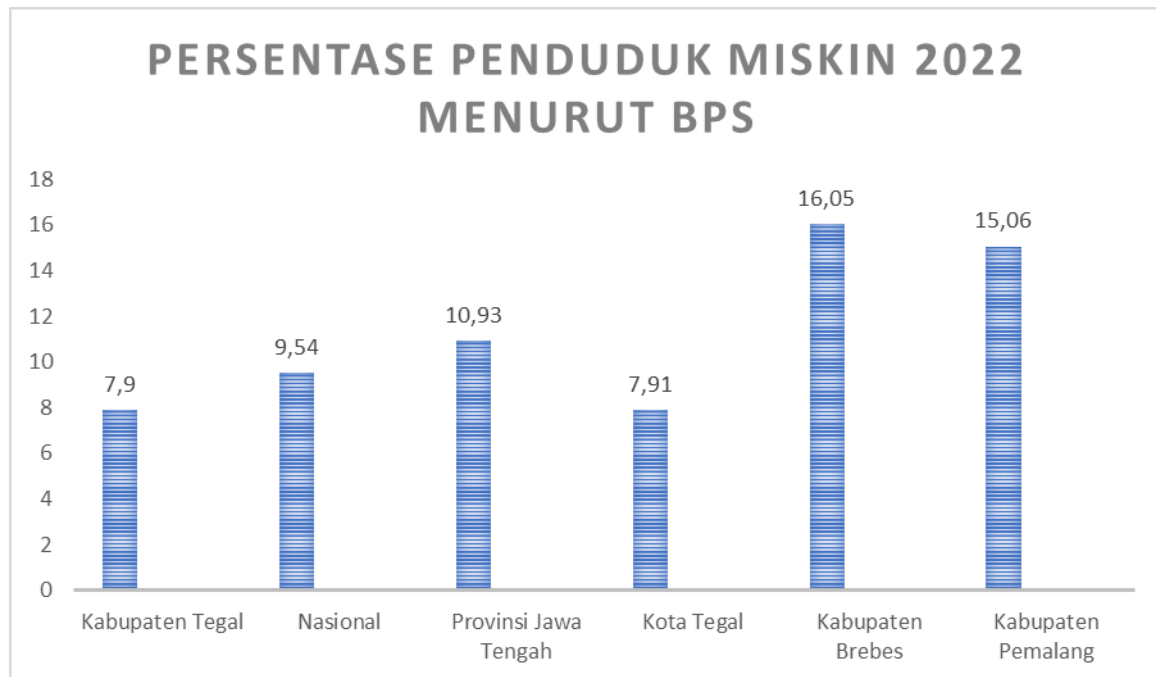
Angka kemiskinan di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,26% atau 9,9 ribu orang dan masuk jajaran 10 besar dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Tengah. Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran menurunkan angka kemiskinan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 3.56
Capaian kinerja Tujuan Menekan Laju Kemiskinan
Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penduduk Miskin	7,01	8,14	83,88	8,41	8,60	97,74	8,45-8,12	7,90	100

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melampaui target indikator kinerja utama persentase penduduk miskin pada tahun 2022 merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak pandemi COVID-19 berimbas pada aktivitas perilaku dan aktivitas ekonomi yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK yang mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin. Oleh karena itu untuk menekan laju kemiskinan Kabupaten Tegal melakukan upaya antara lain :

1. Penyaluran bantuan baik dari pusat atau daerah
2. Menciptakan lapangan pekerjaan melalui program peningkatan nilai investasi penanaman modal
3. Pemberdayaan UMKM melalui Program pelatihan tenaga kerja bagi UMKM.
4. Pemerintah Kabupaten Tegal telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang mempunyai tugas fungsi melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Kabupaten



Dari tabel tersebut dapat dilihat kalau persentase kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2022 lebih rendah bila dibandingkan dengan persentase angka kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Tegal. Keberhasilan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen dalam melaksanakan program yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan seperti memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, kemudian membuka lapangan pekerjaan baru melalui peningkatan nilai investasi yang mencapai 1,89 Triliun pada tahun 2022 sehingga dapat menyerap tenaga kerja sebesar 30 ribu lebih pekerja dan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja menekan laju kemiskinan :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga, Adat dan Masyarakat
- e. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- f. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- g. Program Penempatan Tenaga Kerja

- h. Program Hubungan Industrial
- i. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- j. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- k. Program Promosi Penanaman Modal
- l. Program Pelayanan Penanaman Modal
- m. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- n. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja menekan laju kemiskinan sebesar Rp. 24.227.884.684,- dari anggaran Rp. 28.083.265.300,- atau 86,27% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dan dana yang digunakan sebesar 86,27% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,73% serta tingkat efektifitas belum efektif.

Sasaran 15 : Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Dalam rangka untuk menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Tegal, maka Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan dua (2) indikator yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Adapun realisasi capaian sasaran dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.57

Capaian Sasaran Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen; Kumulatif	0,98	0,95	102%	0,78
2.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen; Kumulatif	0,15	0,17	98%	0,10
Rata-rata capaian					100%	

Rata-rata capaian kinerja sasaran menurunnya kedalaman dan kemiskinan di Kabupaten Tegal untuk menunjang tujuan daerah dalam menekan kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 100% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 0,95 lebih baik dari tahun sebelumnya yang

berjumlah 1,00 dan realisasi indeks keparahan kemiskinan tahun 2022 sebesar 0,17 lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 0,19. Capaian tahun 2022 masih belum melampaui target akhir RPJMD.

Tabel. 3.58
Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan
dengan daerah sekitar

Indikator Kinerja Utama 2022	Wilayah					
	Nasional	Jateng	Tegal	Kota Tegal	Kab. Brebes	Kab. Pemalang
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,56	1,77	0,95	1,15	2,73	2,43
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,38	0,42	0,17	0,28	0,66	0,57

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tegal lebih baik bila dibandingkan dengan Indeks Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota/Kabupaten di sekitar Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa program-program Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang berupa bantuan tunai yang disalurkan, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, kemudian tersedianya lapangan pekerjaan akibat dari peningkatan nilai investasi di Kabupaten Tegal.

Program yang mendukung dalam capaian kinerja menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- e. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan sebesar Rp. 21.061.981.975,- dari anggaran Rp. 23.260.678.300,- atau 90,54% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dan dana yang digunakan sebesar

90,54% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,46% serta tingkat efektifitas sebesar 110,44% dan dapat dikatakan efektif.

Sasaran 16 : Menekan Laju Tingkat Pengangguran

Dalam rangka untuk menekan laju tingkat pengangguran masyarakat di Kabupaten Tegal demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Indikator Utama. Adapun realisasi capaian tujuan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.59
Capaian Sasaran Laju Tingkat Pengangguran

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Kumulatif	10,21 – 9,42	9,64	100%	9,85-8,85

Rata-rata capaian kinerja sasaran menekan laju tingkat pengangguran pada tahun 2022 sebesar 100% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Untuk realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 9,64 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 9,85-8,85 sehingga belum melampaui target akhir.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022 sebesar 9,64 persen. TPT pada Agustus 2021 sebesar 9,97 turun menjadi 9,64 persen pada Agustus 2022. Hal ini menunjukkan penurunan yang tidak signifikan dimana dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 10 orang pengangguran, menurunnya angka pengangguran sebesar 0,33 persen dibanding tahun sebelumnya, merupakan pemulihan ekonomi

masyarakat secara bertahap pasca kondisi Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal.

Tabel. 3.60
Capaian Sasaran Laju Tingkat Pengangguran Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,45	9,82	68,19	10,42	9,97	104,31	10,21 – 9,42	9,64	100

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal rentang tahun 2020 – 2022 tidak mengalami perubahan yang signifikan hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal sepanjang tahun 2022 dalam menekan laju tingkat pengangguran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Tegal, target investasi Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 1,3 Triliun, namun realisasinya pada bulan Januari – November 2022 meningkat sebesar 1,89 Triliun yang terdiri dari Rp 1,03 triliun atau 54,64 persen diantaranya berasal dari penanaman modal asing (PMA), ditambah Rp 485,07 miliar atau 25,58 persen dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan sisanya Rp 374,56 miliar atau 19,72 persen dari usaha mikro. Dari nilai total investasi tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 39.663 orang. Dari kedua investasi berskala besar tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 13.321 orang dengan menerapkan sistem upah minimum kabupaten (UMK). Sehingga dari investasi tersebut akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal.

Selain meningkatkan nilai investasi, untuk menekan laju tingkat pengangguran terbuka Pemerintah Kabupaten Tegal juga berkomitmen

dalam melakukan pemberdayaan masyarakat selama Pandemi COVID-19 khususnya di stakeholder UMKM, hal tersebut dibuktikan dengan di anugrahinya Kabupaten Tegal dua (2) penghargaan Jasa Bakti Koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) Republik Indonesia pada peringatan Hari Nasional (Harnas) UMKM Tahun 2022.

Kemudian hal lain yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menekan laju tingkat pengangguran terbuka antara lain :

1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
 - Pelatihan Menjahit di 15 Desa dengan jumlah peserta 300 orang
 - Pelatihan Montir Mobil di 4 Desa dengan jumlah 60 peserta
 - Pelatihan Mekanik Sepeda Motor di 3 Desa dengan jumlah 100 peserta
 - Pelatihan Komputer di 10 Desa dengan jumlah 100 peserta
 - Pelatihan Mebelair di 2 Desa dengan jumlah 40 peserta
 - Pelatihan Servis HP di 1 Desa dengan jumlah 20 peserta
 - Pelatihan Cara Produksi Pangan di 1 Desa dengan jumlah 20 peserta
 - Pelatihan Tata Boga di 1 Desa dengan jumlah 20 peserta
2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Program yang mendukung dalam capaian menekan laju tingkat pengangguran terbuka:

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Hubungan Industrial
- d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- e. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- f. Program Promosi Penanaman Modal
- g. Program Pelayanan Penanaman Modal
- h. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- i. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja menekan laju tingkat pengangguran terbuka sebesar Rp. 3.165.902.709,- dari anggaran Rp. 4.822.587.000,- atau 65% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100 % dan dana yang digunakan sebesar 65%, maka tingkat efisien belum ada dan tingkat efektifitas belum efektif.

Tujuan 6 : Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

Dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.61
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen; Tahun	86,66	86,96	100,35	90,66

Capaian kinerja tujuan meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2022 sebesar 86,96 atau 100,35 % dari target tahun 2022 dengan kategori Sangat Tinggi. Untuk realisasi capaian kinerja Tegal tahun 2022 sebesar 86,96 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 90,66 sehingga belum melampaui target akhir. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Tabel 3.62
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82,66	82,66	100	84,66	84,66	100	86,66	86,96	100,35

Berdasarkan data Tahun 2022, capaian cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum mencapai 86,96 atau sebesar 100,35 % melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,66. Capaian kenaikan cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum ini tentunya tak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tegal antara lain yaitu :

1. Sebagai salah satu upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga diseluruh wilayah Kabupaten Tegal, yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam, PGOT dan PKL yang berjualan disepanjang bahu jalan, sesuai SPM patroli dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 67 % sedangkan tahun 2022 sebesar 78,90%.

Tabel 3.63

Cakupan Patroli Siaga dan Pelaporan Pengaduan yang Tertangani terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	767	730	730	730	864
3.	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (%)	70	67	67	67	78,90
4.	Persentase Laporan Pengaduan Gangguan Trantibum yang tertangani (%)	81	84	82	82	83,81

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2022

2. Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2018-2022 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.64
Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penegakan Perda					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	108	110	129	529	525
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	82	96	107	485	450
	c. Penyelesaian Penegakan Perda (%)	76	87,2	83	91,68	85,71
2.	Penegakan K3					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	1673	1.623	1669	1667	1662
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	1603	1.587	1604	1608	1600
	c. Penyelesaian Penegakan K3 (%)	96	97,7	96	96,46	96,27
3	SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2022

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 91,68 %, sedangkan pada tahun 2022

mengalami penurunan kembali sebesar 85,71%. Hal ini perlu penanganan yang lebih intensif dan kerjasama yang baik sehingga penanganan pelanggaran Perda semakin meningkat. Kurangnya dukungan tenaga PPNS dan anggaran untuk penegakan Perda secara pro yustisi sangat mempengaruhi penyelesaian Penegakan Perda. Perda yang ditegakkan di tahun 2022 antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Penegakan peraturan perundang-undangan dan patroli dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum merupakan upaya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dari tabel di atas dapat di diskripsikan bahwa antara jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dengan jumlah warga negara yang akan terlayani dan mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada adalah sama yaitu 100 % (seratus persen).

Program yang mendukung dalam capaian kinerja meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- c. Program Peberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- g. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja meningkatnya peraturan daerah dan peraturan kepala sebesar Rp. 5.302.048.161,- dari anggaran Rp. 6.440.696.502,- atau 82,32% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,35% dan dana yang digunakan sebesar 82,32% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 17,68% serta tingkat efektifitas belum efektif.

Sasaran 17 : Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan

Dalam rangka meningkatkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama yakni persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.65

Capaian sasaran meningkatnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persen; Tahun	86,66	86,96	100,35	90,66

capaian kinerja sasaran meningkatnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2022 sebesar 86,96 atau 100,35 % dari target tahun 2022 dengan kategori Sangat Tinggi. Untuk realisasi capaian kinerja Tegal tahun 2022 sebesar 86,96 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 90,66 sehingga belum melampaui target akhir.

Tabel 3.66

Capaian sasaran meningkatnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	82,66	82,66	100	84,66	84,66	100	86,66	86,96	100,35

Berdasarkan data Tahun 2022, capaian cakupan meningkatnya peraturan daerah dan peraturan kepala mencapai 86,96 atau sebesar 100,35 % melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,66. Capaian kenaikan sasaran meningkatnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan ini tentunya tak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tegal antara lain yaitu :

- ❖ Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2018-2022 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.67

Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penegakan Perda					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	108	110	129	529	525
	b. Jumlah Penyelesaian	82	96	107	485	450

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	Penegakan Perda					
	c. Penyelesaian Penegakan Perda (%)	76	87,2	83	91,68	85,71
2.	Penegakan K3					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	1673	1.623	1669	1667	1662
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	1603	1.587	1604	1608	1600
	c. Penyelesaian Penegakan K3 (%)	96	97,7	96	96,46	96,27
3	SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2022

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 91,68 %, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 85,71%. Hal ini perlu penanganan yang lebih intensif dan kerjasama yang baik sehingga penanganan pelanggaran Perda semakin meningkat. Kurangnya dukungan tenaga PPNS dan anggaran untuk penegakan Perda secara pro yustisi sangat mempengaruhi penyelesaian Penegakan Perda. Perda yang ditegakkan di tahun 2022 antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Penegakan peraturan perundang-undangan dan patroli dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan upaya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100

Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dari tabel di atas dapat di diskripsikan bahwa antara jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dengan jumlah warga negara yang akan terlayani dan mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada adalah sama yaitu 100 % (seratus persen).

Program yang mendukung dalam rangka pencapaian meningkatnya peraturan daerah dan peraturan kepala :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakteristik Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- g. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja meningkatnya peraturan daerah dan peraturan kepala sebesar Rp. 5.302.048.161,- dari anggaran Rp. 6.440.696.502,- atau 82,32% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,35% dan dana yang digunakan sebesar 82,32% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 17,68% serta tingkat efektifitas belum efektif.

Tujuan 7 : Menurunnya Resiko Bencana

Salah satu pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang misi pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam tujuan menurunnya risiko bencana, yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama yakni indeks risiko bencana. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.68
Capaian Kinerja Tujuan Menurunnya Risiko Bencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Risiko Bencana	Angka	177,71	176,85	100,48	172,12

Rata-rata capaian kinerja tujuan menurunnya risiko bencana dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2022 sebesar 100,48% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 177,71 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 172,12 sehingga belum melampaui target akhir.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tegal sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.69
Capaian Kinerja Tujuan Menurunnya Risiko Bencana
Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Risiko Bencana	183,52	183	100,28	181,98	181,91	100,04	177,71	176,85	100,48

Berdasarkan data tahun 2022, Indeks Risiko bencana Kabupaten Tegal sebesar 176,85 menunjukkan bahwa Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tegal masih masuk ke dalam kategori tinggi. Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mampu mencapai target yang mengartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya keras dalam menurunkan risiko bencana.

Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Hampir semua ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin

kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal.

Tabel 3.70
Potensi Luas Bahaya Kabupaten Tegal

No.	Jenis Bahaya	Luas Kelas Bahaya (Ha)			Total dan Kelas Bahaya (Ha)	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1.	Banjir	21.048,99	32.311,50	7.628,51	60.989,01	Tinggi
2.	Kebakaran hutan	5.544,33	20,41	10,18	5.574,92	Tinggi
3.	Kekeringan	-	14.146,44	-	14.153,41	Sedang
4.	Tanah longsor	741,7	120,63	86,44	948,77	Tinggi
5.	Gunung api	-	89,59	7,81	97,40	Sedang
6.	Gempa bumi	3.802,70	9.632,38	88,12	13.523,20	Sedang
7.	Abrasi dan gelombang ekstrem	-	11,7	94,27	105,98	Tinggi
8.	Cuaca ekstrem (angin puting beliung)	1.743,88	11.483,35	459,42	13.686,64	Tinggi
9.	Banjir bandang	397,53	567,06	1.442,97	2.407,56	Tinggi

Keterangan: (-) menandakan bahwa pada kecamatan tersebut tidak terdampak oleh potensi luas bahaya

Sumber: Kajian Risiko Bencana BPBD Kab. Tegal

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengurangan risiko bencana adalah pendanaan, sarana prasarana, kompetensi personil, budaya sadar bencana, akses informasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral dan wilayah. Upaya-upaya pemerintah dan masyarakat yang mengarah pada penanganan permasalahan tersebut diharapkan akan berpengaruh signifikan pada penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan risiko bencana dengan melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi terkait pencegahan dan kesiapsiagaan di kawasan rawan bencana untuk merubah *mindset* warga negara di kawasan rawan bencana bahwa kebencanaan bukan hanya terkait bantuan pada saat dan setelah kejadian bencana, tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana upaya semua pihak dalam mengurangi risiko terjadinya bencana.

Gambar 3.22

Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)



2. Melakukan mitigasi bencana berupa penanaman bibit pohon bersama Forum Relawan Penanggulangan Bencana sebanyak 400 bibit pohon di kawasan perbukitan lokasi rawan bencana longsor di Desa Batunyana Kecamatan Bojong pada tahun 2022. Bibit pohon diperoleh secara gratis dari Desa Baros Kabupaten Brebes.

Gambar 3.23

Kegiatan Penanaman di Desa Batunyana Kecamatan Bojong



3. Melakukan kegiatan susur sungai bersama dengan relawan dengan melakukan pembersihan dan mengidentifikasi kerentanan sungai dan pencegahan banjir di aliran sungai di kawasan rawan bencana.

Gambar 3.24
Kegiatan Susur Sungai



4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Diponegoro Semarang untuk melakukan kajian terkait penyusunan dokumen kebencanaan di wilayah rawan bencana sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dokumen yang telah disusun bersama terdiri dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi Banjir, Rencana Kontijensi Banjir Bandang, Rencana Kontijensi Tanah Longsor, dan Rencana Kontijensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi.

Gambar 3.25
Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebencanaan
Bersama Universitas Diponegoro



5. Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Terpadu dalam rangka respon cepat terhadap kejadian bencana untuk meminimalisir dampak kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana. TRC PB Terpadu ini merupakan satuan tim yang dibentuk oleh kepala BPBD Kabupaten Tegal, yang didalamnya terdiri dari lintas sektoral mulai dari Kodim 0712/ Tegal, Polres Tegal, Kejaksaan Negeri, LSM, kelompok masyarakat, dan OPD terkait.

Gambar 3.26
Kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Terpadu



Program yang mendukung dalam rangka menurunkan resiko bencana :

- a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- b. Program Penanggulangan Bencana
- c. Program Penanganan Bencana

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja menurunkan resiko bencana sebesar Rp. 3.521.345.320,- dari anggaran Rp. 3.816.860.000,- atau 92,25% dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,48% dan dana yang digunakan sebesar 92,25% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,75% serta tingkat efektifitas sebesar 108,92% dan dapat dikatakan efektif.

Sasaran 18 : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko

Sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mencapai sasaran meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka menurunkan risik bencana yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama yakni indeks kapasitas daerah. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.71

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah
Dalam Menurunkan Risiko Bencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,72	0,74	102,78	0,89

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan risiko bencana dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2022 sebesar 102,78% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 0,74 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 0,89 sehingga belum melampaui target akhir.

Tabel 3.72

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah
Dalam Menurunnya Risiko Bencana Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kapasitas Daerah	0,60	0,60	100	0,62	0,64	103,23	0,72	0,74	102,78

Berdasarkan data tahun 2022, Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Tegal sebesar 0,74 menunjukkan bahwa tingkat kapasitas daerah dalam menurunkan risiko bencana di Kabupaten Tegal masih masuk ke dalam kategori sedang. Realisasi capaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dari tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 walaupun secara persentase capaian mengalami penurunan, namun persentase capaian dari tahun 2021 selalu diatas 100 persen dan secara nilai setiap tahun mengalami kenaikan karena target tahun sebelumnya masih dibawah tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal khususnya BPBD Kabupaten Tegal berusaha semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat Kabupaten Tegal dalam penanggulangan bencana.

Namun demikian masih ada beberapa kegiatan pada tahun 2022 yang bisa dilaksanakan dengan efisiensi anggaran seperti kegiatan gladi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan sosialisasi penanganan bencana yang pelaksanaanya bersamaan jambore relawan penanggulangan bencana yang didalamnya juga dilaksanakan kegiatan pelatihan dan simulasi serta kegiatan reboisasi tanaman-tanaman produktif.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengurangan risiko bencana adalah pendanaan, sarana prasarana, kompetensi personil, budaya sadar bencana, akses informasi masyarakat

dan koordinasi lintas sektoral dan wilayah. Upaya-upaya pemerintah dan masyarakat yang mengarah pada penanganan permasalahan tersebut diharapkan akan berpengaruh signifikan pada peningkatan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang secara langsung akan berpengaruh pada penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menurunkan risiko bencana dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana pada tahun 2021 dan disahkan dengan Peraturan Bupati pada tahun 2022 yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Tegal sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjalankan manajemen risiko bencana selanjutnya baik pada penyusunan rencana maupun pada perumusan kebijakan dan aksi.
2. Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pada tahun 2021 dan disahkan dengan Peraturan Bupati pada tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau panduan dalam menyusun rencana penanggulangan bencana (*disaster management plan*) yang menyeluruh, terarah dan terpadu di tingkat Kabupaten Tegal.
3. Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi Banjir, Rencana Kontijensi Banjir Bandang, Rencana Kontijensi Tanah Longsor, dan Rencana Kontijensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi pada tahun 2022, dengan tujuan sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana, agar pada saat tanggap darurat dapat terkelola dengan cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi berbagai sumber daya para pemangku kepentingan (*stake holder*).

Gambar 3.27
Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB),
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontijensi



4. Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

kepada penduduk di kawasan rawan bencana pada tahun 2022 yang bertempat di Kecamatan Warureja, Kecamatan Balapulang dan Kecamatan Kedungbanteng dengan masing-masing peserta sejumlah 80 orang yang terdiri dari aparatur dan warga negara di kawasan tersebut.

Gambar 3.28
Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana



5. Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) bekerjasama dengan Relawan Arvanat Satpoludair Tegal dengan jumlah peserta 80 orang, pembentukan Desa Tanggung Bencana (Destana) di Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat dan Desa Padasari Kecamatan Jatinegara , sosialisasi Sekolah Aman Bencana, gladi kesiapsiagaan yang melibatkan Aparatur, Relawan, Sekolah dan Instansi terkait sebanyak kurang lebih 400 peserta, dan penyediaan peralatan kebencanaan.

Gambar 3.29
Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana





6. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan melakukan respon cepat kurang dari 24 jam untuk setiap darurat bencana, menyediakan logistik kebencanaan, melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana bersama tim gabungan atau Tim Reaksi Cepat (TRC) Terpadu dimana pada tahun 2022 teridentifikasi sebanyak 14.101 korban bencana yang semuanya telah ditangani secara cepat.
7. Meningkatkan penanganan pasca bencana dengan melakukan pemberian bantuan stimulan pasca bencana yang pada tahun 2022 diperuntukkan bagi masyarakat di Desa Padasari yang terdampak penurunan tanah, tanah bergerak dan longsor yang masuk kriteria rumah tinggal/tempat usaha/fasilitas umum (tempat ibadah) rusak ringan, sedang dan berat, Pelatihan Pangkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dengan metode *Damage and Loss Assessment* (DaLA) dengan diikuti aparaturnya dan relawan di kawasan rawan bencana, sosialisasi dan bantuan pemulihan ekonomi produktif pasca bencana, dan monitoring di kawasan rawan dan pasca bencana.

Gambar 3.30
Upaya-Upaya Penanggulangan Bencana



Program yang mendukung dalam rangka menurunkan resiko bencana :

- a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- b. Program Penanggulangan Bencana
- c. Program Penanganan Bencana

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja menurunkan resiko bencana sebesar Rp. 3.521.345.320,- dari anggaran Rp. 3.816.860.000,- atau 92,25% dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,78% dan dana yang digunakan sebesar 92,25% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,75% serta tingkat efektifitas sebesar 111,41% dan dapat dikatakan efektif.

Tujuan 8 : Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Dalam rangka meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan Indikator Utama Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.73
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Indeks; Tahunan	55,27	56,91	103	73,69

Capaian kinerja tujuan Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan didukung Indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan pada

tahun 2022 sebesar 56,91 atau sebesar 103% dari yang telah ditargetkan dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Realisasi 56,91 pada tahun 2022 ini belum bisa dikategorikan melampaui bila dibandingkan target akhir tahun RPJMD di tahun 2024 sebesar 73,69. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan diantaranya dengan upaya memperkuat ketahanan budaya daerah Kabupaten Tegal, dengan ruang lingkup hasil karya cipta budaya berupa benda maupun karya tak benda. Hasil karya budaya berupa karya seni, sastra, cagar budaya maupun nilai, norma, etika, estetika, tatakrama dan bahasa daerah yang diyakini memiliki landasan filosofi yang adiluhung.

Indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan Indikator baru dalam perubahan RPJMD di tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target indikator tahun sebelumnya. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal telah melaksanakan upaya-upaya untuk terus meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan di Kabupaten Tegal, diantaranya :

- ❖ Dengan Penguatan nilai kesejarahan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan masyarakat khususnya anak didik pada sejarah dan tradisi Kabupaten Tegal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi dengan adanya kegiatan Lawatan Sejarah yang dimaksudkan untuk memberikan informasi, inspirasi dan pemahaman tentang suatu peristiwa sejarah atau tokoh-tokoh sejarah yang ada di Kabupaten Tegal dalam konteks pengenalan sejarah perjuangan kemerdekaan kepada generasi muda khususnya siswa siswi SLTA se-Kabupaten Tegal. Kegiatan Lawatan Sejarah ini diikuti oleh Pelajar SMA/SMK/MA Se-Kab. Tegal dengan mengunjungi Museum GBN Slawi, Makam Amangkurat, dan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Tegal.

Gambar 3.31
Kegiatan Lawatan Sejarah



Dinas Pendidikan dan kebudayaan juga mengajak para pelajar untuk mengikuti kegiatan Jejak Tradisi yang bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya bangsa kepada generasi muda, menumbuhkan pemahaman generasi muda tentang keanekaragaman budaya bangsa yang satu dengan lainnya mempunyai kekhasan dan keunikan tersendiri, dan menumbuhkan sikap saling menghargai antara pendukung budaya yang satu dan lainnya. Kegiatan Jejak tradisi ini dilaksanakan dengan mengunjungi Rumah Wayang Ki Enthus Susmono, Galeri Pembuatan Batik Benge, dan belajar tentang pembuatan dan cara pemasaran di LaShinta Snack.

Gambar 3.32
Kegiatan Jejak Tradisi kepada Siswa Sekolah

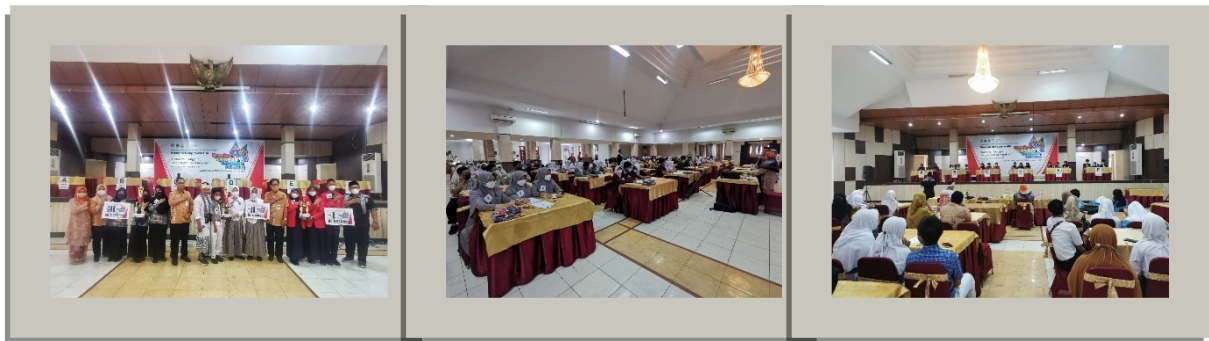


- ❖ Pengelolaan Museum sekolah secara maksimal;
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa museum adalah contoh sumber belajar yang dapat dimanfaatkan keberadaannya sebagai tempat untuk mengolah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan sejarah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam hal ini sebagai penanggungjawab pengelola Museum sekolah slawi, berupaya maksimal dalam pengelolaan untuk memfasilitasi para siswa / pengunjung museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi karena banyaknya benda benda bersejarah yang bisa dijadikan sebagai acuan pembelajaran bagi siswa.

Gambar 3.33
Museum Sekolah



Gambar 3.34
Kegiatan Lomba Cerdas Cermat



- ❖ Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Tradisi di Kabupaten Tegal senantiasa dilaksanakan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermanfaat, memelihara dan melestarikan serta melindungi khasanah adat dan budaya, serta menciptakan kreativitas yang dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.35
Pembacaan Kita Rambang di Desa Danaraja Margasari



Gambar 3.36
Penjamasan Makam Amangkurat



- ❖ Penyusunan Data Base Tahun 2022 dalam bentuk buku yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada generasi muda untuk mengetahui cikal bakal masyarakat serta peristiwa masa lalu yang terjadi di Kabupaten Tegal, dalam hal ini Toponimi Kabupaten Tegal mengangkat Asal-usul Desa di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng. Penulisan buku sejarah toponimi desa-desa di Kecamatan Kedungbanteng merupakan salah satu upaya untuk menelusuri riwayat desa-desa yang ada di Kecamatan Kedungbanteng yang dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang asal usul nama tempat dan sebuah identitas masyarakat yang menempati wilayah tersebut.

Gambar 3.37
Pembagian Buku Sejarah



- ❖ Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal telah melaksanakan Pendataan Objek Diduga Cagar Budaya di lingkungan Kabupaten Tegal. Cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional.

Gambar 3.38
Situs Sejarah



SD N Kajen 1 (Dulu Volksschool)



Makam Sir Gedong



Makam Mbah Buyut Sentor



Makam Mbah Buka



Guci di Desa Pasangan



Keris Jangkung Mangkurat Mas

- ❖ Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya (Pakem) dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Tim Pakem Kabupaten Tegal yang diketuai oleh Kejaksaan Negeri dengan Anggota yang terdiri dari Polres, Kodim, Kemenag, Kesbangpol, dan Dinas Dikbud Kabupaten Tegal.

Gambar 3.39
Monev Pakem



- ❖ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal juga melaksanakan kegiatan Dialog Budaya dan Tradisi dengan menggelar Sarasehan dalam rangka menuju pembakuan tata rias busana adat pengantin Kabupaten Tegal.

Gambar 3.40
Dialog Budaya



Program yang mendukung dalam rangka meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan :

- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Program Pembinaan Sejarah
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Program Pengelolaan Permuseuman

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja menurunkan resiko bencana sebesar Rp. 1.504.920.182,- dari anggaran Rp. 1.644.735.000,- atau 91,49% dengan capaian indikator kinerja sebesar 103% dan dana yang digunakan sebesar 91,49% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,51% serta tingkat efektifitas sebesar 112,58% dan dapat dikatakan efektif.

Sasaran 19 : Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Dalam rangka meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan indikator Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.74
Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatkan Pelestarian dan
Pewarisan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	Indeks; Tahunan	65,50	68,70	104,89	75,50

Capaian Indikator Kinerja Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan, mencapai 104,89% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Dimana pada tahun 2022 realisasi capaian persentase seni dan kesenian yang dilestarikan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu mencapai angka 68,70 dari angka yang ditargetkan yaitu 65,50.

Capaian Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan pada tahun 2022 ini bila dibandingkan dengan target di akhir periode RPJMD tahun 2024 mencapai nilai 90,99% dan termasuk dalam kategori capaian yang tinggi dan diharapkan setelah berakhirnya RPJMD 2019-2024 target Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan bisa mencapai 100% atau bahkan bisa lebih.

Tabel 3.75
Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatkan Pelestarian dan
Pewarisan Kebudayaan Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	-	-	-	-	-	-	65,5	68,7	104,89

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan pada Tahun 2022 sebesar 68,7 dari angka yang ditargetkan 65,5 sehingga prosentase capaian sebesar 104,89 %.

Keberhasilan dalam pencapaian target ini didukung dengan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang Kebudayaan untuk terus memelihara dan melestarikan kebudayaan dengan

melaksanakan program-program dan kegiatan yang dapat mendukung Pengembangan Kebudayaan, terutama Pengembangan Kesenian Tradisional Kabupaten Tegal. Seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu banyak peningkatan di masing-masing indikator bidang kebudayaan antara lain dalam hal seni dan kesenian baik pelakunya maupun seni itu sendiri. Hal ini bertujuan agar eksistensi budaya daerah tetap terjaga kelestariannya terutama budaya Kabupaten Tegal.

Festival seni dan rumah budaya sangat strategis untuk memberi ruang bagi pelaku seni dan budaya untuk menampilkan, mengembangkan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Kabupaten Tegal. Peningkatan apresiasi seni dan penampilan kesenian daerah terus ditingkatkan frekuensinya. Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pertunjukan Kesenian Rakyat Jawa Tengah dan Pagelaran Wayang Golek di Galeri Seni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Pertunjukkan kesenian rakyat dan pagelaran wayang golek ini diharapkan bisa menjadi wahana pelestarian seni tradisi masyarakat dengan berbasis kearifan lokal. Kesenian rakyat yang ditampilkan antara lain Tari Ngacak Balo yang ditampilkan oleh beberapa Siswi SMA Negeri 1 Pangkah, Seni Tradisional Sampyong dari Desa Balapulung Wetan, Orkes Keroncong Gita Puspita serta Wayang Golek dengan dalang enom Ki Farhat Balapulung dengan Lakon : “Illange Pegeblug Mayangkara”

Gambar 3.41
Pertunjukan Kesenian Rakyat Jawa Tengah dan
Pagelaran Wayang Golek



Disamping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan program kegiatan pemeliharaan Gedung Kesenian, yang selama ini Gedung Kesenian tersebut digunakan oleh para Seniman Kabupaten Tegal untuk latihan teater dan latihan tari serta seni karawitan.

Program yang mendukung Kinerja Sasaran Kinerja Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan :

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- c. Program Pembinaan Sejarah
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- e. Program Pengelolaan Permuseuman

Anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja menurunkan resiko bencana sebesar Rp. 1.504.920.182,- dari anggaran Rp. 1.644.735.000,- atau 91,49% dengan capaian indikator kinerja sebesar 103% dan dana yang digunakan sebesar 91,49% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,51% serta tingkat efektifitas sebesar 112,58% dan dapat dikatakan efektif.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan realisasi APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tabel 3.76
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Tegal

URAIAN KELOMPOK, JENIS DAN OBYEK	TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	2.700.741.065.000,00	2.743.662.500.401,50	101,59
PENDAPATAN ASLI DAERAH	475.177.918.000,00	531.112.252.855,50	111,77
Pajak Daerah	133.365.000.000,00	173.244.165.906,00	129,90
Retribusi Daerah	26.826.948.500,00	27.220.169.744,00	101,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.198.601.000,00	16.815.509.083,00	118,43
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	300.787.368.500,00	313.832.408.122,50	104,34
PENDAPATAN TRANSFER	2.219.563.147.000,00	2.206.619.044.546,00	99,42
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.666.729.636.000,00	1.625.199.145.190,00	97,51
Dana Bagi Hasil	34.877.831.000,00	39.882.244.174,00	114,35
Dana Alokasi Umum	1.072.371.078.000,00	1.072.103.946.393,00	99,98
Dana Alokasi Khusus	559.480.727.000,00	513.212.954.623,00	91,73
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	359.781.317.000,00	359.312.887.800,00	99,87
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	359.781.317.000,00	359.312.887.800,00	99,87
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	193.052.194.000,00	222.107.011.556,00	115,05
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	181.200.194.000,00	211.566.275.761,00	116,76
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	11.852.000.000,00	10.540.735.795,00	88,94
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.000.000.000,00	5.931.203.000,00	98,85
Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	5.931.203.000,00	98,85
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
BELANJA	2.439.307.565.000,00	2.207.928.151.237,00	90,51
BELANJA OPERASI	2.067.756.754.171,00	1.893.724.316.872,00	91,58

URAIAN KELOMPOK, JENIS DAN OBYEK	TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1.094.160.364.332,00	1.003.718.251.494,00	91,73
Belanja Barang	882.044.177.319,00	801.844.337.238,00	90,91
Belanja Hibah	84.480.662.520,00	81.103.178.140,00	96,00
Belanja Bantuan Sosial	7.071.550.000,00	7.058.550.000,00	99,82
BELANJA MODAL	361.650.810.829,00	313.682.560.331,00	86,74
Belanja Tanah	6.349.050.000,00	4.312.150.195,00	67,92
Belanja Peralatan dan Mesin	76.890.767.252,00	71.480.408.394,00	92,96
Belanja Bangunan dan Gedung	131.965.835.750,00	101.162.159.460,00	76,66
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.481.293.100,00	125.214.092.930,00	92,42
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.904.782.727,00	11.460.487.352,00	105,10
Belanja Aset Lainnya	59.082.000,00	53.262.000,00	90,15
BELANJA TAK TERDUGA	9.900.000.000,00	521.274.034,00	5,27
Belanja Tak Terduga	9.900.000.000,00	521.274.034,00	5,27
TRANSFER	520.959.006.000,00	514.136.676.274,00	98,69
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	520.959.006.000,00	514.136.676.274,00	98,69
Bagi Hasil Pajak	15.341.509.986,00	11.847.170.839,00	77,22
Bagi Hasil Retribusi	2.546.179.014,00	1.749.306.835,00	68,70
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	503.071.317.000,0	500.540.198.600,00	99,50
SURPLUS / (DEFISIT)	(259.525.506.000,00)	21.597.672.890,50	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	297.025.506.000,00	297.068.508.778,02	100,01
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	297.025.506.000,00	297.025.506.051,02	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		43.002.727,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	100,00
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	281.166.181.668,52	

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, unaudited.

Dari data realisasi APBD 2022 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan tahun 2022 mencapai Rp. 2.743.662.500.401,50 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2.700.741.065.000,00 atau terealisasi sebesar 101,59%. Dari jumlah tersebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp 531.112.252.855,50 atau 111,77% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 475.177.918.000,00. Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp 2.206.619.044.546,00 atau 99,42% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2.219.563.147.000,00. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp 5.931.203.000,00 atau 99,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.000,00. Dengan demikian dari ketiga pos Pendapatan, ada satu yang terealisasi melebihi anggaran.

Capaian kinerja juga dapat dilihat dari Realisasi belanja daerah tahun 2022 realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar Rp 2.207.928.151.237,00 atau 90,51% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp 2.439.307.565.000,00. Untuk belanja operasi terealisasi Rp 1.893.724.316.872,00 atau 91,58% dari anggaran sebesar Rp 2.067.756.754.171,00. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan yang terealisasi sebesar Rp 1.003.718.251.494,00 atau 91,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.094.160.364.332,00, belanja barang yang terealisasi Rp 801.844.337.238,00 atau 90,91% dari anggaran Rp 882.044.177.319,00, belanja hibah yang terealisasi Rp 81.103.178.140,00 atau 96,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 84.480.662.520,00, belanja bantuan sosial yang terealisasi Rp 7.058.550.000,00 atau 99,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 7.071.550.000,00.

Sedangkan untuk belanja modal yang merupakan belanja yang dianggarkan terealisasi sebesar Rp 313.682.560.331,00 atau 86,74% dari anggaran sebesar Rp 361.650.810.829,00.

Realisasi pembiayaan daerah tahun 2022 untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 297.068.508.778,02 atau 100,01% dari anggaran Rp 297.025.506.000,00 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 terealisasi Rp 297.025.506.051,02 atau 100,00% dari anggaran Rp 297.025.506.000,00, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 43.002.727,00.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp 37.500.000.000,00 atau sebesar 100,00 % dari anggaran, berasal dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 30.000.000.000,00, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp 6.000.000.000,00, dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 1.500.000.000,00. Dengan demikian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) tahun 2022 adalah sebesar Rp 281.166.181.668,52.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.77
Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Program	Rencana Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Capaian
1.	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan						
		1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	580.470.118	276.548.000	48%
				2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.246.482.850.000	4.843.736.360	78%
				3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	32.850.998.000	30.914.279.705,00	94%
				4. Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.284.325.300	4.042.697.422,00	94%
				5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	136.000.000	122.812.444,00	90%
				6. Program Pendaftaran Penduduk	155.000.000	127.561.016,00	82%
				7. Program Pencatatan Sipil	145.000.000	128.531.050,00	89%
				8. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	300.213.000	278.810.818,00	93%
				9. Program Aplikasi Informatika	2.662.030.000	2.603.649.897,00	98%
				10. Program Informatika dan Komunikasi Publik	1.412.000.000	1.355.377.184,00	96%
				11. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	196.000.000	162.325.743,00	83%
		2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	668.250.000	594.196.100,00	89%
				2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.766.000.000	1.433.900.781,00	81%
				3. program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	810.652.690,00	521.668.650,00	64%
				4. Program Perekonomian dan Pembangunan	898.514.500	878.001.156,00	98%

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Program	Rencana Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Capaian
				5. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.722.683.000	20.744.057.109,00	91%
				6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	880.500.000	816.445.692,00	93%
		3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	533.424.006.000	517.011.335.581,00	97%
				2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.564.572.000	2.443.709.787,00	95%
				3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.820.679.000	2.708.330.106,00	96%
				4. Program Pengelolaan Arsip	202.500.000	185.183.500,00	91%
				5. Program Penyelenggaraan Pengawasan	940.760.000	674.187.887,00	72%
				6. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	541.369.100	452.906.399,00	84%
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.218.047.000 1.417.665.000	2.340.067.941,00 1.411.192.070,00	73% 100%
		5.	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	6.295.660.000	6.095.480.800,00	97%
				2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.539.802.000	4.979.745.414,00	76%
				3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	18.770.000.000	18.494.485.250,00	99%
				4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	513.394.000	425.956.126,00	83%
				5. Program Penataan Bangunan Gedung	29.559.000.000	23.985.503.499,00	81%
				6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.500.000.000	1.401.339.717,00	93%
				7. Program Penyelenggaraan Jalan	117.372.560.000	108.463.528.293,00	92%
				8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.008.195.000	936.092.134,00	93%
				9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	5.900.800.000	3.828.353.939,00	65%

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Program	Rencana Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Capaian
				10. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	150.000.000	104.068.243,00	69%
				11. Program Penatagunaan Tanah	100.000.000	16.055.000,00	16%
				12. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	80.000.000	79.920.400,00	100%
				13. Program Penataan Desa	4.502.000.000	4.235.175.317,00	94%
				14. Program Peningkatan Kerjasama Desa	75.000.000	73.743.165,00	98%
				15. Program Pengembangan Perumahan			
				16. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	350.000.000	326.866.642,00	93%
				17. Program Kawasan Permukiman	3.433.654.500	3.076.070.954,00	90%
				18. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4.850.880.000	4.832.142.396,00	100%
					8.284.180.000	7.130.142.654,00	86%
		6.	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Haji	13.082.310.000	12.401.004.010,00	95%
		7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	313.913.500	289.325.500,00	92%
				2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.265.042.000	3.832.337.150,00	90%
				3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.887.820.000	1.830.723.350,00	97%
				4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	24.150.000	17.614.100,00	73%
				5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.348.607.200	2.305.504.385,00	98%
				6. Program Pengelolaan Persampahan	16.243.508.100	15.264.158.179,00	94%
				7. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.551.699.500	2.531.176.271,00	99%
				8. Program Pembinaan dan Pengawasan	24.982.000	23.597.850,00	94%

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Program	Rencana Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Capaian
				Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 11. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000 876.858.000 21.747.100	17.929.575,00 866.916.000,00 21.262.000,00	90% 99% 98%
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata						
		8.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3. Program Pengawasan Perikanan Budidaya 4. Program Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 8. Program Pengendalian Kesehatan	350.000.000 145.000.000 490.000.000 100.000.000 2.009.347.700 6.158.667.750 89.230.000 240.000.000	325.441.548,00 142.157.500,00 481.652.104,00 99.784.500,00 1.695.263.019,00 5.630.646.347,00 84.575.073,00 230.107.500,00	93% 98% 98% 99% 84% 91% 95% 96%

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Program	Rencana Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Capaian
				Hewan dan Kesehatan Masyarakat 9. Program Penyuluhan Pertanian 10. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 11. Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.549.543.000 231.684.000 51.400.000	1.496.812.533,00 217.895.000,00 47.446.540,00	97% 94% 92%
		9.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	1. Program perencanaan dan pembangunan industri 2. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota 3. Program pengelolaan sistem informasi industri Nasional	880.500.000 11.000.000 43.200.000	716.735.126,00 10.578.000,00 41.354.000,00	81% 96% 96%
		10.	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Program pemasaran pariwisata 3. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	4.585.582.000 119.250.000 170.000.000	2.675.033.768,00 117.050.600,00 113.460.000,00	58% 98% 67%
		11.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	1. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan 2. Program standardisasi dan perlindungan konsumen 3. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 4. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan 5. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 6. Program pendidikan dan latihan perkoperasian 7. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) 8. Program pengembangan umkm	2.450.900.000 149.479.000 70.000.000 333.200.000 15.000.000 390.600.000 150.000.000 131.320.000	2.430.651.291,00 147.376.873,00 69.946.785,00 329.575.700,00 14.957.500,00 387.419.000,00 146.899.475,00 130.976.500,00	99% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 100%

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Program	Rencana Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Capaian
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas						
		12.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	1. Program pengelolaan Pendidikan 2. Program pengembangan kurikulum 3. Program pendidik dan tenaga kependidikan 4. Program pembinaan perpustakaan	283.047.721.500 140.000.000 30.724.309.000 265.000.000	257.380.297.115,00 123.457.550,00 30.623.890.724,00 236.004.850,00	91% 88% 99% 89%
		13.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	122.469.494.562 3.952.742.300 453.542.698 2.309.644.134	112.409.055.982,00 1.597.028.595,00 428.103.818,00 2.118.040.431,00	92% 40% 94% 92%
		14.	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1.719.000.000 6.850.721.000	1.685.870.269,00 6.604.013.518,00	98% 96%
5.	Menekan Laju Kemiskinan						
		15.	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS	783.000.000 4.914.159.800 9.124.591.000 905.000.000 7.533.927.000	778.262.000 4.679.653.723. 8.790.957.500 895.402.852.000 5.917.705.900	99,39% 95,22% 96,34 98,93% 78,54%

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Program	Rencana Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Capaian
		16.	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial 4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 6. Program Promosi Penanaman Modal 7. Program Pelayanan Penanaman Modal 8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	3.381.682.000 130.000.000 125.000.000 45.000.000 110.000.000 180.000.000 270.000.000 520.000.000 60.000.000	1.869.179.970 122.920.000 93.548.730. 18.696.700 99.829.650 161.907.248 257.198.901 491.084.716 51.536.794	55,27% 94,55% 74,83 41,09% 90,75% 89,94% 95,25% 94,36% 85,89%
6.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat						
		17.	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3. Program Peberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	346.730.000 3.395.685.520 180.000.000 1.174.790.000 862.446.600 243.130.000	271.282.100 2.878.192.442 139.633.606 863.789.647 776.087.250 195.690.500	78,24% 84,76% 77,57% 73,52% 89,98% 80,48%

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Program	Rencana Anggaran (Rp.)	Realiasi Anggaran (Rp.)	Capaian
				7. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	237.914.383	177.372.616	74,55%
7.	Menurunnya Resiko Bencana						
		18.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 2. Program Penanggulangan Bencana 3. Program Penanganan Bencana	764.860.000 2.830.000.000 222.000.000	743.315.000 2.565.913.670 212.116.650	97,18% 90,66% 95,54%
8.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan						
		19.	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pembinaan Sejarah 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 5. Program Pengelolaan Permuseuman	595.171.400 70.000.000 74.828.600 854.735.000 50.000.000	533.118.650 65.720.851 72.007.4000 788.514.735 45.558.546	89,57% 93,88% 96,22% 92,25% 91,11%
Rata –rata Capaian					1.395.030.771.904	1.297.964.817.046	93,04

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai sama atau lebih dari 100%. Terlihat dari 8 tujuan dan 19 sasaran, yang menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Tabel 3.78
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	%
Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan		1 Indikator				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2 Indikator	48.968.519.268	44.856.329.639	4.112.189.629	8,40
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1 Indikator	27.746.600.190	24.988.269.488	2.758.330.702	9,94
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Indikator	540.493.886.100	523.475.653.260	17.018.232.840	3,14
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	1 Indikator	4.635.712.000	3.751.260.011	884.451.989	19,07
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan		1 Indikator				
	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	2 Indikator	209.285.125.500	188.484.669.943	20.800.455.557	9,93
	Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan	1 Indikator	13.082.310.000	12.401.004.010	681.305.990	5,2

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	%
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indikator	28.578.327.400	27.000.544.360	1.577.783.040	5,52
Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertaian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		1 Indikator				
	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	1 Indikator	11.414.872.450	10.451.781.664	963.090.786	8,43
	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	1 Indikator	934.700.000	768.667.126	166.032.874	17,76
	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	1 Indikator	4.874.832.000	2.905.544.368	1.969.287.632	40,39
	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	1 Indikator	3.690.499.000	3.657.803.124	32.695.876	0,88
Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas		2 Indikator				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	1 Indikator	314.177.030.500	288.363.650.239	25.813.380.261	8,21
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Indikator	129.185.423.694	116.552.228.826	12.633.194.868	9,77
	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	1 Indikator	8.569.721.000	8.289.883.787	279.837.213	3,26

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	%
Menekan Laju Kemiskinan		1 Indikator				
	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	2 Indikator	23.260.678.300	21.061.981.975	2.198.696.325	9,45
	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	1 Indikator	4.822.587.000	3.165.902.709	1.656.684.291	34,35
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat		1 Indikator				
	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	1 Indikator	7.215.926.502	5.302.048.161	1.913.878.341	26,52
Menurunnya Resiko Bencana		1 Indikator				
	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Bencana	1 Indikator	3.816.860.000	3.521.345.320	295.514.680	7,74
Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		1 Indikator				
	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan kebudayaan	1 Indikator	1.644.735.000	1.504.920.182	139.814.818	8,5
			1.395.030.771.904	1.297.964.817.046	97.065.954.858	6,95

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakan pemerintahan secara baik dan optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah memperoleh penghargaan baik ditingkat nasional maupun tingkat provinsi, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

1. Innovative Government Award (IGA) 2022 sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dari Kemendagri;
2. Pelayanan Publik Pemkab Tegal Terbaik ke-12 Tingkat Nasional dari Ombudsman RI;
3. TPID Terinovatif Tahun 2022 se Wilayah eks Karesidenan Pekalongan dari Bank Indonesia;
4. Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penghargaan Tanda Jasa Bhakti Koperasi tahun 2022 dari Menteri Koperasi dan UKM;
6. Penghargaan Bhakti Koperasi dengan Kategori Tokoh Gerakan Koperasi Tahun 2022 dari Kementerian Koperasi dan UKM;
7. Kampung Keren Tanpa Rokok Award 2022 dari Kemendagri dan BKKBN;
8. Juara II Lomba Cerdas Cermat Kelompok Tani Tingkat Nasional Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian";
9. Top Pembina BUMD Tahun 2022 dari *Top Business*;
10. Kepala Daerah Perempuan Inspiratif Tahun 2022 dari Tempo Media Grup;
11. Pemimpin Berintegritas dari Harian Radar Tegal;
12. Pembina UMKM (Inovatif dalam membantu pemasaran usaha mikro, ultra mikro dan kecil selama masa pandemic;
13. Pemkab Tegal meraih Predikat Menuju Informatif di ajang KIP Award 2022 tingkat Jawa Tengah;

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan atas penggunaan anggaran tertentu adalah dengan menyusun laporan kinerja. Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, yang didalamnya telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, Pemerintah Kabupaten Tegal secara berkelanjutan telah berupaya mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam setiap tahunnya. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, capaian kinerja tahun 2022 merupakan capaian kinerja tahun ketiga dari pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan. Rata-rata tingkat capaian kinerja dari 8 tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebesar 107,58% . Hasil pengukuran pada 31 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. 29 indikator tercapai dengan kategori **Sangat Tinggi**

- b. 1 indikator dengan kategori **Sedang**
- c. 1 indikator **Rendah**

Pada penyusunan LKjIP Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan sebanyak 8 tujuan dan 19 sasaran strategis dengan 31 indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 yang didalamnya tertuang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah pada bab 8 tabel 8.1 sesuai Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Adapun pencapaian tujuan sasaran per indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Kabupaten Tegal 2022

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Kategori
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat										
1.	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai; Tahunan	64,69	64,62	99,89	Sangat Tinggi
		1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai; Tahunan	82,15	81,38	99,06	Sangat Tinggi
				3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai; Tahunan	2,4	3,1	129,17	Sangat Tinggi
		2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	4.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	67,61	62,56	92,53	Sangat Tinggi
		3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	5.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
		4.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	6.	Indeks Profesionalisme ASN	Skor; Tahunan	76,42	50,49	66,07	Sedang
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.										
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang			7.	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasn Lingkungan	Angka; Kumulatif	77,27	80,90	104,69	Sangat Tinggi

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Kategori
	Berwawasan Lingkungan	5.	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	8.	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	78,80	82,36	104,51	Sangat Tinggi
				9.	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persen; Tahunan	76,93	76,96	100,3	Sangat Tinggi
		6.	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	10.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	75,30	79,3	105,31	Sangat Tinggi
		7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,33	64,27	116,16	Sangat Tinggi
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan										
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertaian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			12.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	3,59 – 5,20	5,14	100	Sangat Tinggi
		8.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	13.	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	2,69 – 3,25	1,67	62	Rendah

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Kategori
		9.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	14.	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; Tahunan	1,50 – 3,56	4,43	124,43	Sangat Tinggi
		10.	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	15.	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Jumlah; Tahunan	1,99	4,5	226,13	Sangat Tinggi
		11.	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	16.	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	2,56 – 3,92	2,62	100	Sangat Tinggi
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi										
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			17.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	69,43	69,53	100,14	Sangat Tinggi
				18.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	87,03	87,53	100,57	Sangat Tinggi
		12.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	19.	Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	0,556	0,5958	107,16	Sangat Tinggi
		13.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	20.	Indeks Kesehatan	Poin; Tahunan	0,801	0,798	99,56	Sangat Tinggi
		14.	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	21.	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	400	397	99,25	Sangat Tinggi

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Kategori
5.	Menekan Laju Kemiskinan			22.	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,45 – 8,12	7,9	100	Sangat Tinggi
		15.	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	23.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,98	0,95	100,2	Sangat Tinggi
		24.		Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,15	0,17	98	Sangat Tinggi	
		16.	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	25.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	10,21 – 9,42	9,64	100	Sangat Tinggi
Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal										
6.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat			26.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	86,66	86,96	100,35	Sangat Tinggi
		17.	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	27.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persen; Tahunan	86,66	86,96	100,35	Sangat Tinggi
7.	Menurunnya Resiko Bencana			28.	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	177,71	176,85	100,48	Sangat Tinggi
		18.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana	29.	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,72	0,74	102,78	Sangat Tinggi
8.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			30.	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan	Indeks; Tahunan	55,27	56,91	103	Sangat Tinggi

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Kategori
					Kebudayaan					
		19.	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	31.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Indkes; Tahunan	65,50	68,7	104,89	Sangat Tinggi

Dari 8 tujuan dan 19 sasaran telah ditetapkan 31 indikator dengan capaian sebagai berikut :

1. 18 indikator telah melebihi/melampaui target.
2. 5 indikator telah sesuai target.
3. 6 indikator tidak mencapai target.

Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2022 menyentuh angka 107,58% yang berarti kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dapat diartikan **Sangat Tinggi**. Dari sudut pandang berbeda, kondisi tersebut juga dapat diartikan bahwa terdapat ketidakakuratan dalam perencanaan dan kurang bisa memprediksi kondisi yang akan datang. Hal tersebut berakibat pada penentuan/penetapan target yang kurang relevan sehingga masih terdapat beberapa indikator yang tidak tersedia data.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Laporan kinerja selain sebagai instrumen untuk mengetahui kinerja juga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja di masa yang akan datang. Dari hasil pengukuran, kinerja yang diperoleh masih terdapat beberapa sasaran yang capaiannya perlu di perbaiki. Dilihat dari faktor-faktor penghambat terealisasinya target tersebut ada beberapa rekomendasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut :

1. Mereviu kembali pohon kinerja/*logical framework* yang telah disusun dengan mengacu pada PermenpanRB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan agar sasaran dan indikator kinerja yang digunakan lebih berorientasi hasil serta memenuhi kriteria SMART (*spesific, achieveble, relevant, dan timebond*) dan cukup baik level Pemda dan PD

3. Menyempurnakan IKU pada PD dengan menambahkan formulasi perhitungan dan sumber data yang digunakan dalam menghitung indikator kinerja, dan memastikan formulasi perhitungan yang digunakan telah sesuai untuk menggambarkan indikator kinerja.
4. Mengoptimalkan aplikasi pengukuran kinerja secara organisasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara organisasi maupun unit kerja.
5. Melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan rencana aksi berkala, dan meningkatkan kualitasnya dengan melengkapi informasi analisis pencapaian kinerja, dan memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan pendukung kinerja pada tahun berikutnya.
6. Meningkatkan kesetaraan kualitas laporan kinerja seluruh OPD dengan informasi yang memadai tentang analisis faktor pengungkit capaian kinerja dan rekomendasi perbaikan (langkah kerja/target) yang spesifik untuk perencanaan tahun berikutnya.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan tindak lanjut PD atas rekomendasi perbaikan hasil evaluasi internal serta membuat pelaporannya.

Strategi yang bisa dilakukan dimasa yang akan datang antara lain :

1. Indikator yang sudah melampaui target pada akhir RPJMD 2024 akan dilakukan evaluasi.
2. Memberikan perhatian khusus penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
3. Memaksimalkan pemanfaatan *e-sakip* sebagai sistem pengumpulan data kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan yang berbasis Teknologi Informasi (TI);
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat Pemda dan PD dengan menyajikan analisis yang memadai atas pencapaian kinerja yang berorientasi hasil dan analisis efisiensi penggunaan anggaran

terhadap pencapaian kinerja serta memastikan agar pimpinan PD memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

5. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi capaian target kinerja secara berkala dengan membangun suatu system pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
6. Berbagai upaya kebijakan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal ke depan guna bisa menekan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal khususnya terkait stimulus ekonomi masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingga kecil harus dikeluarkan melalui berbagai program/kegiatan seluruh Perangkat Daerah yang terkait.
7. Meningkatkan kerja sama dan partisipasi antar Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal dalam meningkatkan manajemen kepegawean daerah.
8. Melakukan evaluasi terhadap program peningkatan produktivitas Pertanian di Kabupaten Tegal
9. Mengingat potensi meningkatnya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Kabupaten Tegal yang cukup besar, maka Perangkat Daerah terkait khususnya Dinas Sosial, Disperinaker, dan Disdakop dan UKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DKPP, Disporapar perlu merumuskan kebijakan strategis yang efektif dan efisien ke depan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 ini selain dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja di tahun bersangkutan dapat pula digunakan sebagai bahan acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Itulah sebabnya dengan capaian kinerja yang sudah baik kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sebaliknya terhadap berbagai kekurangan, dibutuhkan adanya komitmen yang kuat untuk dapat memperbaikinya. Dengan demikian, dokumen ini memiliki arti penting untuk mendorong terwujudnya kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal ke arah yang lebih baik.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. UMI AZIZAH

Jabatan : Bupati Tegal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Slawi, 3 Januari 2022


Dra. UMI AZIZAH

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian
					2022
1	Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini; Tahunan	64,69
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,4
		3	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	82,15
3	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja	4	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	67,61
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	5	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP
5	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	6	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	76,42
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	7	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Angka; Komulatif	77,26
7	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	8	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	78,80
		9	Persentase Infranstruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persen; Tahunan	76,93
8	Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan	10	Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	75,30
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,33
10	Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	12	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	3,59-5,20
11	Meningkatnya Produktifitas Sektor	13	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	2,69-3,25

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2022
	Pertanian				
12	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	14	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; Tahunan	1,50-3,56
13	Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	15	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Persen; Tahunan	1,99
14	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	16	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	2,56-3,92
15	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	17	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	69,43
		18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	87,03
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	19	Indeks Pendidikan	Tahun; Tahunan	0,556
17	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	20	Indeks Kesehatan	Tahun; Tahunan	0,801
18	Meningkatnya Produktifitas Pemuda	21	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	400
19	Menekan Laju Kemiskinan	22	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,45-8,12
20	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	23	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,98
		24	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,15
21	Semakin Rendahnya Laju Tingkat Pengangguran	25	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	10,21-9,42
22	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	26	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	86,66
23	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	27	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persen; Tahunan	86,66
24	Menurunnya Resiko Bencana	28	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	174,62
25	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menurunkan Resiko Bencana	29	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,8

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian
					2022
26	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	30	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Indeks; Tahunan	55,27
27	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	31	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	Indeks, tahunan	65,50

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.486.828.981.690	APBD 100 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	286.940.501.000	APBD 100 %
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	140.000.000	APBD 100 %
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	30.724.309.000	APBD 100 %
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	116.486.530.575	APBD 100 %
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.891.080.000	APBD 100 %
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	453.542.698	APBD 100 %
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.954.463.977	APBD 100 %
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.295.660.000	APBD 100 %
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.539.802.000	APBD 100 %
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.501.699.500	APBD 100 %
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.088.607.200	APBD 100 %
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	18.770.000.000	APBD 100 %
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	29.559.000.000	APBD 100 %
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	16.000.000.000	APBD 100 %
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	105.039.941.000	APBD 100 %
17	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.500.000.000	APBD 100 %
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.008.195.000	APBD 100 %
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	350.000.000	APBD 100 %
20	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.341.269.000	APBD 100 %
21	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	700.000.000	APBD 100 %
22	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.260.000.000	APBD 100 %
23	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	475.230.000	APBD 100 %
24	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.340.000.000	APBD 100 %
25	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	764.860.000	APBD 100 %
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	783.000.000	APBD 100 %
27	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.956.159.800	APBD 100 %
28	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.082.550.000	APBD 100 %
29	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	222.000.000	APBD 100 %
30	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	80.000.000	APBD 100 %
31	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.328.748.000	APBD 100 %
32	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	110.000.000	APBD 100 %
33	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	125.000.000	APBD 100 %
34	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	80.400.000	APBD 100 %
35	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	91.380.000	APBD 100 %
36	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	259.220.000	APBD 100 %
37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	231.684.000	APBD 100 %
38	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	51.400.000	APBD 100 %
39	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.900.800.000	APBD 100 %

40	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN	150.000.000	APBD 100 %
41	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100.000.000	APBD 100 %
42	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	313.913.500	APBD 100 %
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.265.042.000	APBD 100 %
44	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.887.820.000	APBD 100 %
45	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	24.150.000	APBD 100 %
46	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	24.982.000	APBD 100 %
47	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.000.000	APBD 100 %
48	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	126.858.000	APBD 100 %
49	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	21.747.100	APBD 100 %
50	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.094.978.100	APBD 100 %
51	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	155.000.000	APBD 100 %
52	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	145.000.000	APBD 100 %
53	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	136.000.000	APBD 100 %
54	PROGRAM PENATAAN DESA	4.502.000.000	APBD 100 %
55	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	75.000.000	APBD 100 %
56	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.938.000.000	APBD 100 %
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	905.000.000	APBD 100 %
58	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	306.443.000	APBD 100 %
59	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.529.983.000	APBD 100 %
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.533.927.000	APBD 100 %
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.450.310.000	APBD 100 %
62	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.412.000.000	APBD 100 %
63	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.662.030.000	APBD 100 %
64	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	15.000.000	APBD 100 %
65	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	390.600.000	APBD 100 %
66	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	150.000.000	APBD 100 %
67	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	68.320.000	APBD 100 %
68	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	110.000.000	APBD 100 %
69	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	180.000.000	APBD 100 %
70	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	270.000.000	APBD 100 %
71	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	520.405.000	APBD 100 %
72	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	60.000.000	APBD 100 %
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.719.000.000	APBD 100 %
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.556.971.000	APBD 100 %
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	196.000.000	APBD 100 %
76	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	300.213.000	APBD 100 %
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	595.171.400	APBD 100 %
78	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	70.000.000	APBD 100 %
79	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	74.828.600	APBD 100 %
80	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	860.000.000	APBD 100 %

81	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	50.000.000	APBD 100 %
82	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	265.000.000	APBD 100 %
83	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	202.500.000	APBD 100 %
84	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	300.000.000	APBD 100 %
85	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	550.000.000	APBD 100 %
86	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	145.000.000	APBD 100 %
87	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	100.000.000	APBD 100 %
88	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.973.082.000	APBD 100 %
89	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	69.250.000	APBD 100 %
90	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	170.000.000	APBD 100 %
91	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.559.347.700	APBD 100 %
92	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.342.442.750	APBD 100 %
93	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	240.000.000	APBD 100 %
94	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	89.230.000	APBD 100 %
95	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.105.768.000	APBD 100 %
96	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	333.200.000	APBD 100 %
97	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.050.900.000	APBD 100 %
98	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	70.000.000	APBD 100 %
99	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	149.479.000	APBD 100 %
100	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	670.000.000	APBD 100 %
101	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	16.000.000	APBD 100 %
102	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	42.000.000	APBD 100 %
103	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	45.500.000	APBD 100 %
104	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	32.802.698.000	APBD 100 %
105	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.893.703.750	APBD 100 %
106	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.745.705.000	APBD 100 %
107	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	668.250.000	APBD 100 %
108	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.766.000.000	APBD 100 %
109	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	534.369.630.000	APBD 100 %
110	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.820.679.000	APBD 100 %
111	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.991.572.000	APBD 100 %
112	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.333.047.000	APBD 100 %
113	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.417.665.000	APBD 100 %
114	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.020.000.000	APBD 100 %
115	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.107.701.500	APBD 100 %
116	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	623.377.500	APBD 100 %
117	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	580.470.118	APBD 100 %
118	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.246.482.850	APBD 100 %
119	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	260.722.882	APBD 100 %
120	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	989.733.600	APBD 100 %

121	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	810.652.690	APBD 100 %
122	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	350.000.000	APBD 100 %
123	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.395.685.520	APBD 100 %
124	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	180.000.000	APBD 100 %
125	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	250.000.000	APBD 100 %
126	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	672.880.000	APBD 100 %
JUMLAH		2.869.008.063.000,00	

Slawi, 3 Januari 2022

BUPATI TEGAL



Dra. UMI AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. UMI AZIZAH

Jabatan : Bupati Tegal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Slawi, 2 November 2022



BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian
					2022
1	Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini; Tahunan	64,69
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,4
		3	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	82,15
3	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja	4	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	67,61
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	5	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP
5	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	6	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	76,42
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	7	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Angka; Kumulatif	77,26
7	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	8	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	78,80
		9	Persentase Infranstruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persen; Tahunan	76,93
8	Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan	10	Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	75,30
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,33
10	Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	12	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	3,59-5,20
11	Meningkatnya	13	Laju PDRB Sektor	Persen;	2,69-

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian
					2022
	Produktifitas Sektor Pertanian		Pertanian	Tahunan	3,25
12	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	14	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; Tahunan	1,50-3,56
13	Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	15	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Persen; Tahunan	1,99
14	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	16	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	2,56-3,92
15	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	17	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	69,43
		18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	87,03
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	19	Indeks Pendidikan	Tahun; Tahunan	0,556
17	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	20	Indeks Kesehatan	Tahun; Tahunan	0,801
18	Meningkatnya Produktifitas Pemuda	21	Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	400
19	Menekan Laju Kemiskinan	22	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,45-8,12
20	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	23	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,98
		24	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,15
21	Semakin Rendahnya Laju Tingkat Pengangguran	25	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	10,21-9,42
22	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	26	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	86,66
23	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	27	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persen; Tahunan	86,66
24	Menurunnya Resiko Bencana	28	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	177,71
25	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menurunkan Resiko Bencana	29	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,72

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian
					2022
26	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	30	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Indeks; Tahunan	55,27
27	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	31	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	Indeks, tahunan	65,50

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.565.811.211.014	APBD 100 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	283.047.721.500	APBD 100 %
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	140.000.000	APBD 100 %
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	30.724.309.000	APBD 100 %
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	122.469.494.562	APBD 100 %
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.952.742.300	APBD 100 %
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	453.542.698	APBD 100 %
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.309.644.134	APBD 100 %
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.295.660.000	APBD 100 %
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.539.802.000	APBD 100 %
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.551.699.500	APBD 100 %
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.348.607.200	APBD 100 %
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	18.770.000.000	APBD 100 %
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	29.559.000.000	APBD 100 %
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	513.394.000	APBD 100 %
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	117.372.560.000	APBD 100 %
17	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.500.000.000	APBD 100 %
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.008.195.000	APBD 100 %
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	350.000.000	APBD 100 %
20	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.850.880.000	APBD 100 %
21	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.433.654.500	APBD 100 %
22	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.284.180.000	APBD 100 %
23	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	775.230.000	APBD 100 %
24	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.830.000.000	APBD 100 %
25	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	764.860.000	APBD 100 %
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	783.000.000	APBD 100 %
27	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.914.159.800	APBD 100 %
28	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9.124.591.500	APBD 100 %
29	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	222.000.000	APBD 100 %
30	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	80.000.000	APBD 100 %
31	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.381.682.000	APBD 100 %
32	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	130.000.000	APBD 100 %
33	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	125.000.000	APBD 100 %
34	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	80.400.000	APBD 100 %
35	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	91.380.000	APBD 100 %
36	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	259.220.000	APBD 100 %
37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	231.684.000	APBD 100 %
38	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	51.400.000	APBD 100 %
39	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.900.800.000	APBD 100 %

40	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEHIAN	150.000.000	APBD 100 %
41	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	100.000.000	APBD 100 %
42	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	313.913.500	APBD 100 %
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.265.042.000	APBD 100 %
44	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.887.820.000	APBD 100 %
45	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	24.150.000	APBD 100 %
46	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	24.982.000	APBD 100 %
47	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.000.000	APBD 100 %
48	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	876.858.000	APBD 100 %
49	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	21.747.100	APBD 100 %
50	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.243.508.100	APBD 100 %
51	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	155.000.000	APBD 100 %
52	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	145.000.000	APBD 100 %
53	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	136.000.000	APBD 100 %
54	PROGRAM PENATAAN DESA	4.502.000.000	APBD 100 %
55	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	75.000.000	APBD 100 %
56	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.284.325.300	APBD 100 %
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	905.000.000	APBD 100 %
58	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	306.443.000	APBD 100 %
59	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.894.983.000	APBD 100 %
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.533.927.000	APBD 100 %
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	13.082.310.000	APBD 100 %
62	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.412.000.000	APBD 100 %
63	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.662.030.000	APBD 100 %
64	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	15.000.000	APBD 100 %
65	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	390.600.000	APBD 100 %
66	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	150.000.000	APBD 100 %
67	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	131.320.000	APBD 100 %
68	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	110.000.000	APBD 100 %
69	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	180.000.000	APBD 100 %
70	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	270.000.000	APBD 100 %
71	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	520.405.000	APBD 100 %
72	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	60.000.000	APBD 100 %
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.719.000.000	APBD 100 %
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.850.721.000	APBD 100 %
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	181.000.000	APBD 100 %
76	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	300.213.000	APBD 100 %
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	595.171.400	APBD 100 %
78	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	70.000.000	APBD 100 %
79	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	74.828.600	APBD 100 %
80	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	854.735.000	APBD 100 %

81	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	50.000.000	APBD 100 %
82	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	265.000.000	APBD 100 %
83	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	202.500.000	APBD 100 %
84	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	350.000.000	APBD 100 %
85	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	490.000.000	APBD 100 %
86	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	145.000.000	APBD 100 %
87	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	100.000.000	APBD 100 %
88	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.585.582.000	APBD 100 %
89	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	119.250.000	APBD 100 %
90	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	170.000.000	APBD 100 %
91	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.009.347.700	APBD 100 %
92	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.158.667.750	APBD 100 %
93	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	240.000.000	APBD 100 %
94	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	89.230.000	APBD 100 %
95	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.549.543.000	APBD 100 %
96	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	333.200.000	APBD 100 %
97	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.450.900.000	APBD 100 %
98	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	70.000.000	APBD 100 %
99	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	149.479.000	APBD 100 %
100	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	880.500.000	APBD 100 %
101	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	11.000.000	APBD 100 %
102	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	43.200.000	APBD 100 %
103	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	45.500.000	APBD 100 %
104	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	32.850.998.000	APBD 100 %
105	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	898.514.500	APBD 100 %
106	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.722.683.000	APBD 100 %
107	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	656.250.000	APBD 100 %
108	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.640.150.000	APBD 100 %
109	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	533.424.006.000	APBD 100 %
110	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.820.679.000	APBD 100 %
111	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.564.572.000	APBD 100 %
112	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.218.047.000	APBD 100 %
113	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.417.665.000	APBD 100 %
114	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	880.500.000	APBD 100 %
115	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	940.760.000	APBD 100 %
116	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	541.369.100	APBD 100 %
117	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	416.817.200	APBD 100 %
118	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.046.283.850	APBD 100 %
119	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	237.914.382	APBD 100 %
120	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	862.446.600	APBD 100 %

121	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	700.964.690	APBD 100 %
122	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	346.730.000	APBD 100 %
123	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.395.685.520	APBD 100 %
124	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	180.000.000	APBD 100 %
125	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	243.130.000	APBD 100 %
126	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.174.790.000	APBD 100 %
JUMLAH		2.960.266.571.000	

Slawi, 2 November 2022



 BUPATI TEGAL

 Dra. UMI AZIZAH

Tabel 8.2.
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Realisasi 2020	Target Capaian				Satuan	Perangkat Daerah Koordinator
			2021	2022	2023	2024		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	63,69	64,19	64,69	65,19	65,69	Opini; Tahunan	Sekretariat Daerah
2.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,61	80,46	82,15	84,83	86,2	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2	2,30	2,40	2,50	2,60	Skor; Tahunan	Sekretariat Daerah
4.	Nilai SAKIP Kabupaten	63,61	65,61	67,61	70,61	73,61	Nilai; Tahunan	Sekretariat Daerah
5.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini; Tahunan	Sekretariat Daerah
6.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	72,12	74,24	76,42	78,31	80,56	Skor; Tahunan	Sekretariat Daerah
7.	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	72,31	74,01	77,26	79,68	81,36	Angka; Kumulatif	Sekretariat Daerah
8.	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	72,88	74,88	78,80	81,66	83,59	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
9.	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	74,88	75,88	76,93	78,02	79,15	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
10.	Rasio Konektivitas Kabupaten	75,20	75,20	75,30	75,40	75,50	Skor; Tahunan	Sekretariat Daerah
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,05	55,19	55,33	55,48	55,83	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
12.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,46	3,20	3,59 -5,20	4,2 - 5,35	4,85-5,45	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
13.	Laju PDRB Sektor Pertanian	2,18	2,33	2,69 - 3,25	2,78 - 3,46	2,95 - 3,35	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
14.	Laju PDRB Sektor Industri	-0,46	1,26	1,50 - 3,56	2,72 - 3,68	3,75 - 5,23	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
15.	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	1,85	1,86	1,99	2,23	2,33	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Realisasi 2020	Target Capaian				Satuan	Perangkat Daerah Koordinator
			2021	2022	2023	2024		
16.	Laju PDRB Sektor Perdagangan	-4,20	2,56	2,56 - 3,92	2,95 - 4,48	4,50 - 5,65	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
17.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,39	68,73	69,43	70,13	70,83	Nilai; Tahunan	Sekretariat Daerah
18.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,85	86,94	87,03	87,12	87,21	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
19.	Indeks Pendidikan	0,546	0,552	0,556	0,558	0,560	Tahun; Tahunan	Sekretariat Daerah
20.	Indeks Kesehatan	0,794	0,799	0,801	0,802	0,804	Tahun; Tahunan	Sekretariat Daerah
21.	Wirausaha muda Produktif Berbasis Kinerja Bisnis	200	300	400	500	600	Orang; Tahunan	Sekretariat Daerah
22.	Persentase Penduduk Miskin	8,14	8,41	8,45 - 8,12	8,35 - 8,05	8,25 - 7,89	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
23.	Indek Kedalaman Kemiskinan	1,08	1,02	0,98	0,82	0,78	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
24.	Indek Keparahan Kemiskinan	0,19	0,17	0,15	0,12	0,10	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
25.	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,82	10,42	10,21-9,42	10,12-9,14	9,85-8,85	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
26.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	82,66	84,66	86,66	88,66	90,66	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
27.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan	82,66	84,66	86,66	88,66	90,66	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
28.	Indeks Risiko Bencana	183,00	177,71	174,62	172,12	171,84	Angka; Tahunan	Sekretariat Daerah
29.	Indeks Kapasitas Daerah	0,60	0,72	0,8	0,89	0,9	Angka; Tahunan	Sekretariat Daerah
30.	Persenstase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	44,74	50,00	55,27	63,16	73,69	Indeks; tahunan	Sekretariat Daerah
31.	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	57,50	61,50	65,50	70,50	75,50	Indeks; tahunan	Sekretariat Daerah

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021